

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 2, Juli 2019

REZA RINOVA, FAJAR GUSTIAWATY DEWI

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Pada Daerah Pemekaran Di Pulau Sumatera)

**TIKA LARASATI HARJITO PUTRI,
RATNA SEPTIYANTI , WIDYA RIZKI EKA PUTRI**

Pengaruh Faktor Mikroekonomi Dan Makroekonomi
Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan

SARING SUHENDRO

Peran Moderasi Konvergensi Ifrs Dalam Hubungan
Antara Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Return

CHARA PRATAMI TIDESPANIA TUBARAD

Analisis Kinerja Non Financial Terhadap Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja

NIKEN KUSUMAWARDANI

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan
Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (sak Etap) Pada Usaha Barbershop

PUTRI RETNO ARYANI, KURNIA KRISNA HARI

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

**RULI INDRIANI, RATNA SEPTIYANTI,
NINUK DEWI KUSUMANINGRUM, USEP SYAIPUDIN**

Analisis Efek Anteseden Struktur Modal Pada Nilai Perusahaan

SINDY SILVYA ROSA , MIA KUSUMAWATY

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga Bi
Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah
(Studi Pada Bus Di Indonesia)

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 – 1831

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 2, Juli 2019

Penanggung Jawab:

Farichah

Ketua Penyunting:

Dewi Sukmasari

Penyunting Pelaksana:

Neny Desriani

Penyunting Ahli/Mitra Bestari:

Zaki Baridwan

Universitas Gadjah Mada

Lindrianasari

Universitas Lampung

Mahatma Kufepaksi

Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Universitas Lampung

Rindu Rika Gamayuni

Universitas Lampung

Anggota Administrasi/Tata Usaha:

Suleman

Alamat Redaksi/Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Lampung
Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903
dewsukma@gmail.com/nenydesriani82@gmail.com
Frekuensi terbit: enam bulanan

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 2, Juli 2019

Daftar isi i

REZA RINOVA, FAJAR GUSTIAWATY DEWI

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Pada Daerah Pemekaran Di Pulau Sumatera)

1 - 19

**TIKA LARASATI HARJITO PUTRI,
RATNA SEPTIYANTI , WIDYA RIZKI EKA PUTRI**

Pengaruh Faktor Mikroekonomi Dan Makroekonomi
Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan

20 - 34

SARING SUHENDRO

Peran Moderasi Konvergensi Ifrs Dalam Hubungan
Antara Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Return

35-56

CHARA PRATAMI TIDESPANIA TUBARAD

Analisis Kinerja Non Financial Terhadap Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja

57 -67

NIKEN KUSUMAWARDANI

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan
Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (sak Etap) Pada Usaha *Barbershop*

68-84

PUTRI RETNO ARYANI, KURNIA KRISNA HARI

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

85 -98

**RULI INDRIANI, RATNA SEPTIYANTI,
NINUK DEWI KUSUMANINGRUM, USEP SYAIPUDIN**

Analisis Efek Anteseden Struktur Modal Pada Nilai Perusahaan

99-121

SINDY SILVYA ROSA , MIA KUSUMAWATY

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga Bi
Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah
(Studi Pada Bus Di Indonesia)

122-134

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA DAERAH PEMEKARAN DI PULAU SUMATERA)

Reza Rinova

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Fajar Gustiawaty Dewi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Email: fajargd@yahoo.com

ABSTRACT

Expansion of regions is aimed to prosper the community. In 2018 as many as 314 proposals for expansions could not be approved by the Minister of Home Affairs because the impact was not in line with expectations. This study aims to see the direct effect of the financial performance of the newly formed government regions on economic growth. Expansion area are divided into two forms, namely the old expansion area and the new expansion area. The financial performance of the local government is measured using the ratio of decentralization rates, regional dependency ratios, and the effectiveness of LGR (Locally-Generated Revenue) ratios. Population in this study is all the expansion areas of districts/cities on the island of Sumatera. Time-series secondary data year 2013-2017 covering regional original income, total regional income, transfer income, regional original income budget, and realization of Gross Regional Domestic Product (GRDP) were used. Using SPSS tool, the results shows that the ratio of the degree of decentralization has a negative effect on economic growth. Furthermore, regional dependency ratios do not affect economic growth. The LGR effectiveness ratio has a positive effect on economic growth.

Keywords: *Ratio Of Decentralization Degree, Regional Dependency Ratio, LGR Effectiveness Ratio, Economic Growth, and Expansion Area.*

A. PENDAHULUAN

Tanggungjawab sebagai daerah otonomi adalah dalam hal pembangunan dan perkembangan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah tersebut. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab untuk daerah otonom telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya, mengurus kepentingan tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sejahtera.

Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, pengangguran, pelayanan publik, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Penyelenggaraan otonomi daerah sendiri nantinya akan mewujudkan tujuan utama desentralisasi. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan tidak adanya kesenjangan diberbagai daerah. Karena masih banyak ditemukan tidak meratanya kesejahteraan di berbagai daerah sehingga mendorong terjadinya pemekaran daerah. Pemekaran daerah berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 yaitu pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemerintah daerah baru ini pun diharapkan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo (2002).

Pada penelitian ini, tiga indikator yang akan digunakan adalah rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio efektivitas. Nantinya, kinerja keuangan pemerintah daerah ini diharapkan akan menggambarkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik (Berliani, 2016). Terlebih, bagi kabupaten/kota hasil pemekaran. Dibawah ini tabel daerah pemekaran di Pulau Sumatera.

Tabel 1 Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera

NO	Provinsi	Jumlah Daerah Pemekaran
1	Aceh	13
2	Sumatera Utara	16
3	Sumatera Barat	5
4	Sumatera Selatan	9
5	Bengkulu	6
6	Lampung	10
7	Jambi	5
8	Riau	7
9	Kepulauan Riau	6
10	Bangka Belitung	4
Total	10	81

Sumber: *Data Diolah (2018)*

Berita terbaru yang dikutip dari www.kupastuntas.co yaitu usulan pembentukan daerah otonomi baru bagi Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa sebanyak 314 usulan pemekaran daerah untuk saat ini tidak dapat disetujui. Karena, ternyata dampak pemekaran kurang sesuai dengan harapan (dikutip dari www.nasional.tempo.co).

Pada penelitian sebelumnya oleh Astuti (2015) dan Berliani (2016) memuat kesimpulan bahwa rasio efektivitas sebagai kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya Rosdyana, dkk. (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pradiatmi, dkk. (2017) menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti, dkk. (2015) menyatakan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Sari, dkk. (2016) menyatakan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada periode waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator kemajuan suatu daerah dapat diukur, salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Berliani, 2016).

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan

pada pertumbuhan ekonomi. Kuncoro (2014) menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah” bahwa ada dua cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB. Yaitu, PDRB riil (harga konstan) dan nominal (harga berlaku). Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena PDRB riil telah memasukkan faktor inflasi.

Pertumbuhan ekonomi ini akan diukur melalui rumus dibawah ini :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan Daerah

Wachid (2014) “Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai dengan target. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007). Berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

Rasio Derajat Desentralisasi

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD (Total Penerimaan Daerah). Menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat baik

Sumber : *Tim Litbang Depdegri-Tim Fisipol UGM, 1991*

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mardiasmo (2002):

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin rendah tingkat rasio ketergantungan keuangan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi. Berikut tabel skala interval mengenai ketergantungan keuangan daerah:

Tabel 3 Skala Interval Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Pendapatan Transfer / TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

Sumber : *Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991*

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio Efektivitas PAD

Dalam penelitiannya Sularso, dkk. (2011) menyatakan semakin besar realisasi penerimaan PAD maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Prosentasi kinerja keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

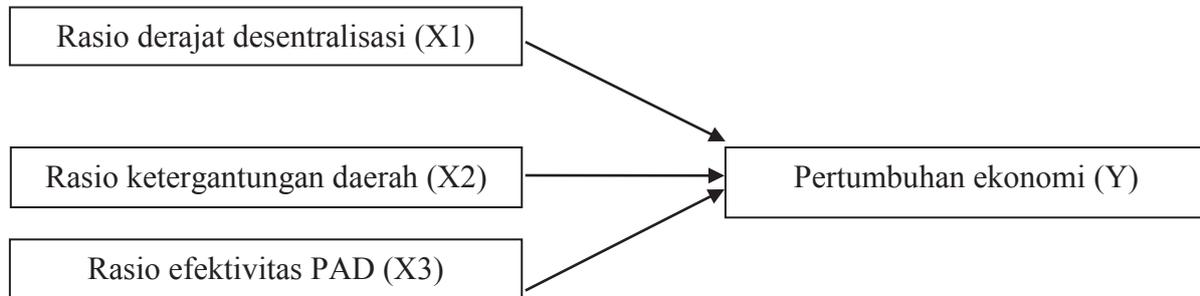
Sumber : *Mahmudi (2010)*

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



Hipotesis Penelitian

Berikut hipotesis berdasarkan model penelitian dalam penelitian ini:

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD maka akan semakin baik pula pelaksanaan desentralisasi di daerah otonomi baru tersebut. Rasio ini juga berfungsi untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan desentralisasi fiskal telah terjadi di daerah pemekaran. Sularso, dkk. (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah salah satunya adalah rasio derajat desentralisasi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan dan teori desentralisasi fiskal pemerintah daerah selaku agen diharapkan mampu menggali potensi PAD didaerahnya masing-masing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2013) menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Selanjutnya, daerah pemekaran merupakan daerah yang harus menyelenggarakan desentralisasi dengan baik. Tidak dipungkiri bahwa banyak daerah pemekaran yang terkadang belum siap untuk menerima tanggungjawab untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Sehingga masih banyak daerah pemekaran yang belum dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan baik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera.

Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio ini ini menggambarkan seberapa besar ketergantungan keuangan daerahnya dengan membandingkan antara pendapatan transfer dari pemerintah pusat/provinsi dan total penerimaan daerah. Jadi semakin tinggi angka ini maka semakin tinggi ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Jika rasio ketergantungan daerah meningkat maka akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi, karena dengan dana transfer yang masih tinggi menyebabkan daerah tersebut memiliki ketergantungan daerah dari pusat untuk mendanai atau membiayai kebutuhan daerahnya sehingga daerah tersebut belum mandiri untuk mengelola keuangannya, sehingga otonomi daerah belum berjalan sesuai dengan semestinya (Sari, dkk., 2016). Dalam penelitiannya Sari, dkk. (2016) menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti, dkk. (2015) menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan yang dipakai dalam penelitian ini seharusnya pemerintah daerah sebagai agen dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal transfer dana. Karena, seharusnya pemerintah daerah mampu atau mandiri dalam hal membiayai dirinya sendiri. Dan, penggunaan dana transfer dapat lebih dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Namun, karena studi ini dilakukan pada daerah pemekaran yang cenderung masih mendapatkan dana transfer yang besar dari pemerintah pusat/provinsi dan dibutuhkan pengelolaan yang baik bagi pemerintah daerah masing-masing maka besar kemungkinan daerah-daerah pemekaran masih bergantung pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat provinsi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera.

Rasio Efektivitas Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Zurkarnain, dkk. (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2015) dan Berliani (2016) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diserap maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan semakin menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Jika dikaitkan dengan teori keagenan pemerintah pada daerah pemekaran diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik melalui realisasi penerimaan PAD. Karena semakin besar realisasi PAD maka semakin baik dan terlihat bahwa pemerintah daerah telah berusaha dengan baik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera.

Hipotesis	
H1	Rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera
H2	Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera
H3	Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran di Pulau Sumatera

C. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintahan daerah pemekaran di Pulau Sumatera. Penelitian dilakukan secara sensus atas laporan realisasi APBD 80 Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera tahun 2013-2017, sehingga diperoleh data berjumlah 400. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada penelitian ini daerah pemekaran dibagi menjadi dua bentuk yaitu daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah. Rentan waktu untuk penentuan daerah pemekaran lama (DPL) adalah daerah yang diresmikan dari tahun 1990-2005. Sedangkan daerah pemekaran baru (DPB) adalah daerah yang diresmikan dari tahun 2006-2018. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS (*Statistical Procut and Service Solutions*) versi 23. Dasar penggunaan linier berganda adalah skema satu variabel dependen (Y) yang berupa pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (X) yang berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
X1	= Rasio Derajat Desentralisasi
X2	= Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
X3	= Rasio Efektivitas
β_{123}	= Koefisien regresi
α	= Konstanta
e	= <i>Error of estimation</i>

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera selama periode tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *Purposive sampling* sehingga total sampel akhir sejumlah 80 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai tahun 2017.

Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari 80 kabupaten / kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera. Dengan menggunakan data gabungan (*pool*) selanjutnya diperoleh sebanyak $5 \times 80 = 400$ data pengamatan. Pada penelitian ini terdapat 61 data yang digunakan sebagai sampel penelitian pada daerah pemekaran lama, dan 19 data pada daerah pemekaran baru. Seiring proses analisis data, ada beberapa data yang dihapus (*Outlier*). Menurut Ghazali (2016) *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data *outlier* ini harus dihapus dari pengamatan. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5 Statistik Deskriptif

	N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation	
	DPL	DPB	DPL	DPB	DPL	DPB	DPL	DPB	DPL	DPB
RDD	265	88	1,61	,41	15,09	8,45	6,3023	4,0886	2,91068	1,42702
RKET	265	88	72,78	75,68	101,45	97,33	90,1216	92,1849	5,79464	4,81657
RE	265	88	51,81	24,16	147,63	161,57	97,3786	91,4752	16,50090	24,93528
PE	265	88	,52	2,85	8,96	8,45	4,9294	5,2124	1,26210	,99473
Valid N (listwise)	265	88								

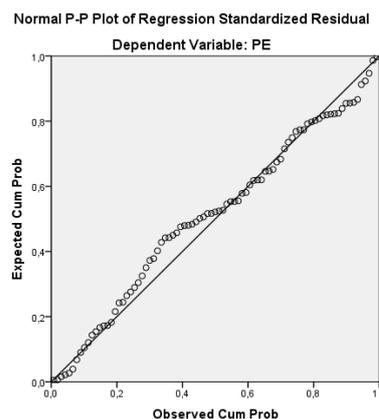
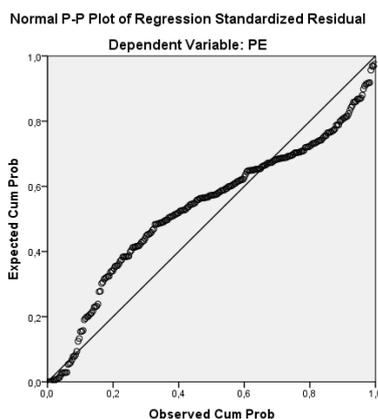
Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Keterangan : DPL (Daerah Pemekaran Lama), DPB (Daerah Pemekaran Baru), RDD (Rasio Derajat Desentralisasi), RKET (Rasio Ketergantungan), RE (Rasio Efektivitas).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada gambar dibawah terlihat P-P plot yang menunjukkan pola distribusi normal, dimana titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam model regresi terdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada daerah pemekaran lama telah memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai

Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang apabila memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,05$ atau sama dengan VIF ≤ 5 berarti model regresi tersebut terbebas dari multikolinieritas.

Model	Collinearity Statistics			
	Tolerance		VIF	
	DBL	DPB	DBL	DPB
(Constant)				
RDD	,883	,952	1,132	1,051
RKET	,890	,968	1,124	1,033
RE	,992	,949	1,009	1,054

Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Tabel 3 Uji Autokorelasi

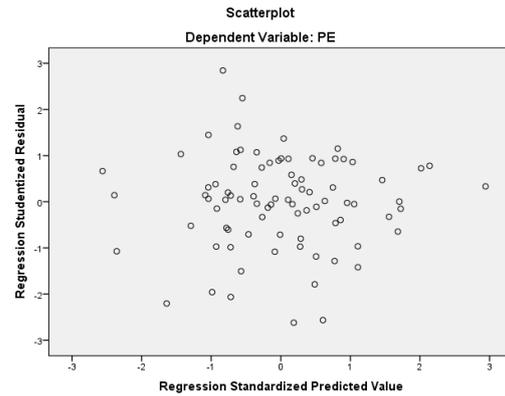
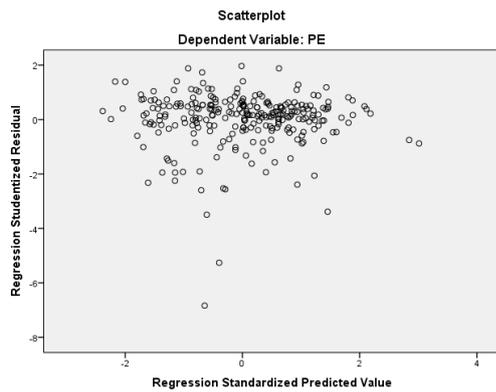
Diketahui bahwa nilai *asympt.sig.* sebesar ,930 dan ,879 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual adalah random atau bebas dari autokorelasi. Karena *Asymp.sig* (2tailed) lebih dari 0,05.

	Unstandardized Residual	
	DPL	DPB
Test Value ^a	,62194 ^b	3,24908 ^b
Cases < Test Value	263	87
Cases \geq Test Value	1	1
Total Cases	264	88
Number of Runs	3	3
Z	,087	,152
Asymp. Sig. (2-tailed)	,930	,879

Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Uji Heterokedastisitas

Pada gambar dibawah dapat dilihat persebaran titik *scatterplots* yang tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi Rasio Derajat Desentralisasi (RDD), Rasio ketergantungan keuangan (RKET), dan Rasio Efektivitas (RE) tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap.



Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Pengujian Hipotesis

Tabel dibawah ini memberikan informasi dimana hasil pengujian koefisien determinasi diketahui *Adjusted R Square* sebesar 0,187 atau 18,7% (DPL) dan 0,175 atau 17,5% (DPB). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel independen yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio efektivitas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R Square		Adjusted R Square	
	DPL	DPB	DPL	DPB
1	,206	,221	,187	,175

Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Tabel dibawah memberikan informasi dimana nilai signifikansi sebesar ,004 dan ,049. Nilai signifikansi tersebut kurang dari nilai α yaitu 0,05 yang artinya hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan) untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Efektivitas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

Tabel 6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model	F		Sig.	
	DPL	DPB	DPL	DPB
1 Regression	4,497	2,594	,004 ^b	,049 ^b
Residual				
Total				

Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Tabel 7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients		t	Sig.		
	B		Std. Error		Beta					
	DPL	DPB	DPL	DPB	DPL	DPB				
(Constant)	4,523	7,515	,635	2,077			,199	3,618	,842	,001
RDD	-,398	-,154	,109	,074	-1,107	-,228	-2,838	-2,074	,005	,041
RKET	,246	-,024	,068	,022	1,095	-,116	,264	-1,064	,792	,291
RE	,010	,005	,006	,004	,093	,142	2,195	1,283	,029	,203

Sumber: *Data Olahan SPSS 23, 2018*

Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan model regresi berganda pada daerah pemekaran dengan persamaan sebagai berikut:

a. Daerah Pemekaran Lama

$$Y = 4,523 + (-0,398 \text{ RDD}) + 0,246 \text{ RKET} + 0,010 \text{ RE}$$

b. Daerah Pemekaran Baru

$$Y = 7,515 + (-0,154 \text{ RDD}) + (-0,024 \text{ RKET}) + 0,005 \text{ RE}$$

Dari hasil statistik diatas juga didapatkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

	Hipotesis	Hasil	
		DPL	DPB
H1	Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Terdukung	Terdukung
H2	Rasio Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Tidak Terdukung	Tidak Terdukung
H3	Rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Terdukung	Tidak Terdukung

Pembahasan

1. Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio derajat desentralisasi yang dihitung dengan rumus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama maupun didaerah pemekaran baru. Diketahui bahwa penyelenggaraan desentralisasi (RDD) belum terlaksana dengan baik didaerah pemekaran lama maupun daerah pemekaran baru. Hal ini terlihat dari rata-rata penerimaan PAD yang terlalu kecil dan masuk kedalam kategori sangat kurang dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Faktor pertama mengapa hal ini dapat terjadi adalah PAD yang ditargetkan terlalu kecil. Lalu adanya desentralisasi membuat pemerintah pusat sulit melakukan kontrol pada sub-nasional (Pemda). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prud'homme (1995) salah satu penyebab kegagalan desentralisasi fiskal adalah korupsi korupsi karena umumnya politisi atau birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kepentingan, jika korupsi bisa dikurangi atau dihilangkan maka akan tercipta efesiensi alokasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari segi masyarakat terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam hal penerimaan PAD. Faktor terakhir adalah Mendagri mengatakan bahwa masih ada daerah yang ingin dimekarkan, namun sampai tiga tahun belum bisa menentukan pusat kotanya. Ada pula yang menggelembungkan jumlah penduduk meski kecamatannya hanya ada lima. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya daerah tersebut belum siap untuk dimekarkan. Jadi semakin banyak terjadinya penyelenggaraa desentralisasi (pemekaran daerah) maka akan semakin menurunkan angka pertumbuhan ekonomi
2. Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio ketergantungan keuangan daerah yang dihitung dengan rumus pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru . Hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis kedua tentang rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi **tidak terdukung atau tidak diterima**. Pada hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) daerah pemekaran lama diketahui bahwa rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurangnya kemampuan untuk mengelola dana transfer secara transparan dan akuntabel dapat melatarbelakangi mengapa hal ini dapat terjadi. Selanjutnya Kharisma (2013) menyatakan apabila dana perimbangan yang mengalir ke daerah tidak dibarengi oleh proses perencanaan yang baik dengan prinsip partisipatif dari masyarakat dan tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel maka dana yang besar tersebut tidak akan mempunyai dampak yang cukup berarti bagi perekonomian daerah tersebut karena hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.

3. Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio efektivitas yang dihitung dengan rumus realisasi penerimaan PAD dibagi anggaran penerimaan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis ketiga tentang rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran lama **terdukung atau diterima**. Nilai koefisien rasio efektivitas sebesar 0,010. Artinya adalah setiap adanya kenaikan rasio efektivitas menunjukkan nilai positif sebesar 0,010 pada kabupaten/kota hasil pemekaran daerah lama di Sumatera. Artinya, setiap kenaikan rasio efektivitas sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,010%. Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2015) dimana rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa penggalan potensi-potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan sudah baik, walaupun begitu penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terbilang masih kecil, karena penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum sebanding atau masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat. Berbeda dengan daerah pemekaran baru, rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasan yang kuat mengapa hal tersebut dapat terjadi ialah kurangnya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah pemekaran baru bagi masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi (studi pada daerah pemekaran di Pulau Sumatera) dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Rasio derajat desentralisasi yang dihitung dengan rumus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi total pendapatan daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru. Artinya kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi di daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru belum terlaksana dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kontribusi PAD. (2). Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio ketergantungan keuangan daerah yang dihitung dengan rumus pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama dan daerah pemekaran baru. Hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis kedua tentang rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi **tidak terdukung atau tidak diterima**. Artinya dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi belum digunakan dengan tepat sasaran. Faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dana transfer secara transparan dan akuntabel.

Faktor lainnya adalah dana transfer yang diberikan tidak dibarengi proses perencanaan yang baik. (3). Dari hasil analisis regresi linier berganda variabel rasio efektivitas yang dihitung dengan rumus realisasi penerimaan PAD dibagi anggaran penerimaan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis ketiga tentang rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi **terdukung atau diterima**. Artinya kinerja pemerintah untuk menyerap PAD sehingga melebihi target penerimaan PAD sudah baik dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada daerah pemekaran baru rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah PAD yang ditargetkan masih relatif kecil.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari publikasi anggaran pemerintah daerah, data PDRB, dan laporan keuangan pemerintah daerah pemekaran. Setelah dilakukan olah data ada data yang nilainya terlalu ekstrem, sehingga ada beberapa data yang dihapus (*outlier*). (2). Kinerja keuangan yang dinilai rasio keuangan pada penelitian ini hanya menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio efektivitas. (3). Dari hasil perhitungan koefisien determinasi (*adjusted R2*) pada bab sebelumnya, ketiga model regresi hanya memiliki nilai *adjusted R2* yang relatif kecil. Hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen relatif kecil.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar: (1). Menggunakan data primer melalui kuesioner bagi aparatur pemerintahan daerah agar data yang digunakan lebih lengkap. (2). Menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode yang lebih panjang. (3). Menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dari penelitian ini agar mendapatkan hasil yang komprehensif. (4). Menambah rasio keuangan lainnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan desentralisasi masih belum baik. Melalui skala interval pada rasio derajat desentralisasi diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masuk kedalam kategori sangat kurang. Hal ini terjadi baik pada daerah pemekaran lama dan baru. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Agar selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk turut serta membangun daerahnya masing-masing melalui kontribusi PAD yang terus ditingkatkan. Langkah yang dapat diambil untuk menggali potensi PAD masing-masing daerah adalah melalui sektor pariwisata. Sebaiknya pemerintah daerah jeli melihat peluang-peluang pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.

2. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa ketergantungan keuangan daerah pemekaran masih sangat tinggi terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. hal ini terjadi baik pada daerah pemekaran lama maupun daerah pemekaran baru. Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dana transfer dengan bijak. Sebaiknya pemberian dana transfer ini dapat dibarengi dengan proses perencanaan yang baik agar dapat membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat. Misalnya, dana transfer yang memang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah digunakan bagi pendidikan dan kesehatan tidak boleh diganggu gugat oleh pemerintah daerah dan terus dipantau pelaksanaannya. Sehingga dana transfer yang digunakan digunakan tepat sasaran.
3. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dikaetahui bahwa keefektifkan kinerja pemerintah daerah pemekaran lama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah pemekaran lama telah berhasil menggali potensi PAD masing-masing daerah. Berbeda dengan daerah pemekaran baru, realisasi penerimaan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah kecilnya anggaran penerimaan PAD yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah pemekaran untuk terus mengoptimalkan penerimaan PAD. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan terus menggali potensi PAD dan penggunaan PAD yang tepat sasaran demi terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengadakan pembayaran pajak kendaraan bermotor keliling bagi daerah-daerah yang jauh dari kantor samsat. Sehingga masyarakat yang tadinya enggan membayar pajak kendaraan bermotor karena jarak yang jauh akan mendapatkan peluang membayar dengan cara yang dekat dan mudah.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Astuti, Wuku. 2015. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada kabupaten dan kota di pulau jawa periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK Vol. 6 No. 1 Universitas Widya Mataram Yogyakarta*.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkt II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *"Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera 2013-2017"*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. (Diakses 21 Mei 2018).

- Berliani, Kartika. 2016. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun ISSN: 1412-6907 Vol. 2, No. 1. Mei-Agustus 2016.*
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasifiskal dan pertumbuhan ekonomi: sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 14, No 2*, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.Pradiatmi, Istia Nur dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh kinerja keuangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di jawa tengah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No 2 Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Prihastuti, dkk, Asepma Hygi; Taufeni Prihastuti, dkk; Restu Agusti. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota riau. *Jurnal Sorot, Vol 10, No.2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.*
- Prud'homme, Remy.1995.The dangers of decentralization.*The World Bank Research Observer vol. 10 no. 2.*
- Rosdyana, Dewi, E. Susy Suhendra, Rowland Bismark Fernando Pasaribu. 2015. Pengaruhdesentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah danketimpangan pendapatan di pulau jawa tahun 2009-2013. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol. 6, Oktober 2015 Universitas Gunadarma. ISSN: 1858-2559.*
- Sari, Greydi Normala. 2016. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomiperkotaan di sulawesi utara tahun 2004-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 18 No 2 tahun 2016 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.*
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di jawa tengah. *Media Akuntansi Riset, Vol 1 No 2 Agustus 2011.*
- Wachid, Abdul. 2014. Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 2.*

Zurkarnain, M.S. 2015. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui alokasi belanja modal di kabupaten dan kota provinsi aceh. *Jurnal Manajemen Sains*, 3 (4), 423-435.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

PENGARUH FAKTOR MIKROEKONOMI DAN MAKROEKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN

Tika Larasati Harjito Putri

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: tikalarasati8@gmail.com

Ratna Septiyanti ²⁾

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: rseptiyanti@yahoo.com

Widya Rizki Eka Putri ³⁾

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: widyarizkiekaputri@gmail.com

ABSTRACT

The purposed of research is to get empirical evidence about the effect of microeconomics and macroeconomics factors to debt policy. This research used the Financial Companies which is listed in Indonesia stock exchange started the year 2014-2018 with total 32 Companies. Samples are selected based on purposive sampling method with the purpose to get sample according to research aim. Sample consists of 160 observations. The analytical technique was multiple regressions. The research results show that microeconomics factors which are proxied by corporate growth, corporate size, and blockholder ownership has significant effect to debt policy. However, macroeconomics factors which are proxied by political stability and inflation rates has no significant effect to debt policy.

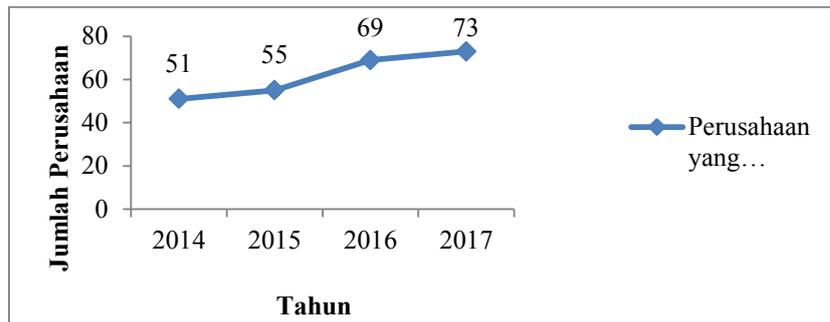
Keywords: *microeconomics factors, macroeconomics factors, and debt policy.*

A. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga dapat menjalankan kegiatan operasi dan mengembangkan usahanya. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui sumber pendanaan internal maupun eksternal. Laba ditahan sebagai sumber dana internal diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Sumber dana eksternal dapat diperoleh melalui penerbitan saham baru atau pinjaman dana berupa hutang (Soraya dan Permanasari, 2017).

Menurut Hanafi (2016), peningkatan penggunaan hutang jika tidak diiringi dengan kemampuan perusahaan dalam memelihara hutang dengan baik dapat mengakibatkan kebangkrutan. Semakin tinggi hutang, semakin besar bunga yang harus dibayar.

Berdasarkan Gambar 1.3 jumlah perusahaan Indonesia yang dimohonkan pailit terus mengalami peningkatan selama periode 2014-2017.



Gambar 1.1 Jumlah perusahaan Indonesia yang dimohonkan pailit selama 2014-2017.¹

Penting bagi pengguna hutang untuk melihat dampak dan korelasi hutang dengan faktor kondisi mikro dan makro ekonomi untuk memutuskan kebijakan utang layak atau tidak untuk dilakukan (Fahmi, 2014).

Faktor mikroekonomi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan *blockholder ownership*. Faktor makroekonomi dalam penelitian ini adalah kestabilan politik dan tingkat inflasi.

Pertumbuhan perusahaan merupakan penambahan kekayaan perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari nilai pendapatannya. Peningkatan pendapatan tersebut membutuhkan sumber dana yang dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. (Sanusi dan Nazar, 2014).

Ukuran perusahaan digambarkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan dan diharapkan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang, selain itu aset perusahaan digunakan sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka pengeluaran perusahaan juga semakin besar (Firmansyah *et al.*, 2016).

Menurut Thomsen *et al.* dalam Dictio (2019), *blockholder ownership* adalah ukuran kepemilikan saham kepemilikan saham yang jumlahnya lebih dari 5% dari jumlah saham yang beredar. Menurut Darsono (2001), di Amerika Serikat kepemilikan 5% dari jumlah saham yang beredar sudah signifikan dalam RUPS, namun di Indonesia masih banyak investor yang menguasai lebih dari 50% dari jumlah saham beredar. Semakin besar penguasaan saham oleh sekelompok kecil perusahaan atau *blockholder* maka makin besar keberanian mereka mengambil pinjaman atau memperbesar kebijakan hutang (Maryasih dan Gemala, 2014).

¹ Sumber Gambar 1.1 : Gumiwang, Ringkang. 2018. "Mengapa Perusahaan Terbelit Utang Hingga Berakhir Pailit?". <http://tirto.id/mengapa-perusahaan-terbelit-utang-hingga-berakhir-pailit-cEow>. (diakses tanggal 12 Agustus 2019).

Kestabilan politik adalah standar untuk mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme (Razak dan Suhadak, 2019).

Ketidastabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).

Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Staikouras dan Wood (2003) dalam Kosmidou (2008), inflasi memiliki efek langsung terhadap beban-beban perusahaan. Beban operasional yang meningkat dapat menurunkan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menggunakan hutang (Firmansyah *et al.*, 2016).

Pemilihan sampel pada perusahaan sektor keuangan dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan data Bank Indonesia, yaitu Surat Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), perusahaan sektor keuangan memiliki jumlah hutang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya selama tahun 2014-2018.

Penelitian-penelitian tentang pengaruh faktor mikroekonomi dan makroekonomi terhadap kebijakan hutang masih memberikan hasil yang belum konsisten. Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang, masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian Nyamita *et al.* (2014); Sanusi dan Nazar (2014); dan menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Namun penelitian Cortez dan Susanto (2012); Memon *et al.* (2015); Ramadhany *et al.* (2015) dan Firmansyah *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Research gap juga terlihat pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh; Nyamita *et al.* (2014); dan M'ng *et al.* (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan Cortez dan Susanto (2012); Hidayat (2013); Memon *et al.* (2015); Firmansyah *et al.* (2016); dan M'ng *et al.* (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Ketidakkonsistenan hasil juga terdapat pada pengaruh antara *blockholder ownership* dengan kebijakan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Wiliandri (2011); serta Lestari (2014) menunjukkan bahwa *blockholder ownership* berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan Maryasih dan Gemala (2014); serta Saputra *et al.* (2017); menunjukkan bahwa *blockholder ownership* berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Pengaruh tingkat inflasi terhadap kebijakan hutang didapatkan juga hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah *et al.* (2016) dan M'ng *et al.* (2017) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Sedangkan Muthama *et al.* (2013) dan Nyamita *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

Oleh sebab itu, peneliti membuat suatu penelitian dengan judul “**Pengaruh Faktor Mikroekonomi dan Makroekonomi Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018)**”.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan yang timbul antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan para manajer (*agents*). Teori keagenan membahas tentang keputusan pendanaan yang diambil oleh pihak manajemen (*agent*) apakah akan memberikan tambahan kekayaan bagi pemegang saham (*principle*) atau meningkatkan nilai perusahaan atau justru memberikan benefit lebih kepada manajemen atas adanya aliran kas bebas jika perusahaan memutuskan berhutang (Firmansyah *et al.*, 2016).

Teori Pecking Order

Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan preferensi dalam penggunaan dana. Urutan dalam Pecking Order Theory adalah laba ditahan, hutang, dan penerbitan saham. Menurut teori pecking order, perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat hutang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Kebijakan Hutang

Menurut Firmansyah *et al.* (2016), kebijakan hutang adalah suatu keputusan pembiayaan yang dilakukan dengan berhutang kepada perbankan konvensional dalam jangka waktu tertentu, atau dapat juga dilakukan dengan perbankan ekspor impor dengan opsi membeli suatu produk pada negara tertentu dengan mendapatkan fasilitas kredit dari bank yang mengelola ekspor ataupun impor tersebut dan dapat juga menjual surat hutang berjangka berupa obligasi kepada pihak investor baik di dalam negeri ataupun diluar negeri dengan opsi tertentu untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasinya.

Faktor Mikroekonomi

Menurut Brigham dan Houston (2011), perusahaan pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor mikroekonomi perusahaan ketika melakukan keputusan kebijakan hutang. Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel, yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan *blockholder ownership*.

1. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan gambaran perkembangan usaha yang dilakukan periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya (Saputra *et al.*, 2017). Menurut Jong *et al.* (2007) dalam Firmansyah *et al.* (2016), perusahaan yang memiliki peluang bertumbuh yang baik dimasa yang akan datang akan tetap menjaga hutangnya tetap kecil, hal ini dikarenakan investor tidak menginginkan memindahkan kekayaannya ke kreditur.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar dan positif perubahan total pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang sudah baik, sehingga konflik agensi dapat diatasi dan tidak membutuhkan biaya pengawasan tambahan dari pihak kreditur.

Berdasarkan teori *pecking order*, semakin besar dan positif perubahan total pendapatan yang tinggi dapat menghasilkan laba yang besar. Sehingga, perusahaan akan memilih untuk menggunakan laba internal perusahaan untuk membiayai perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan terutama karena perusahaan lebih menggunakan laba internal (Sanusi dan Nazar, 2014). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyamita *et al.* (2014) mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan (Sanjaya, 2014). Menurut Ifada dan Yunandriatna (2017), ukuran perusahaan merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat memberikan kemudahan akses pencarian dana dari sumber hutang karena perusahaan mempunyai *collateral assets*. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dan semakin banyak kebutuhan akan modalnya yang berasal dari dana eksternal.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar total aset yang dibiayai melalui hutang dapat semakin memperkecil konflik antara manajer dan pemilik perusahaan, karena biaya pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan dilakukan oleh pihak kreditur semakin besar. Bertambahnya aset perusahaan melalui hutang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, serta menambah kekayaan pemilik perusahaan.

Berdasarkan teori *pecking order*, semakin besar total aset, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan, meliputi biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan. Jika penggunaan laba ditahan untuk mencukupi biaya-biaya tersebut terbatas, sehingga alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Memon *et al.* (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan kebijakan hutang. Hasil yang

sama ditemukan oleh Ifada dan Yunandriatna (2017); dan M'ng *et al.* (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

3. *Blockholder Ownership*

Menurut Dictio (2019), *blockholder ownership* merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan dalam jumlah yang besar, dimana pemilik saham seringkali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan yang didapat dari besarnya saham yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pasal 1, angka 4, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00059/BEI/07-2019, Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hak suara yang lebih besar ini dapat digunakan dalam penentuan kebijakan yang akan diterapkan perusahaan, termasuk kebijakan hutang.

Menurut Maryasih dan Gemala (2014) dan Wiliandri (2011), semakin besar dan memusat penguasaan saham oleh sekelompok pemegang saham akan mendorong perusahaan lebih berani mengambil pinjaman sehingga meningkatkan DER.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar dan memusat *blockholder ownership* semakin besar pula penggunaan hutang karena hutang dapat digunakan untuk mengawasi manajer agar bertindak sesuai tujuan perusahaan, mengatasi konflik agensi yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan dapat memberikan pendapatan atas saham dan laba perusahaan yang semakin tinggi karena adanya kebijakan perlindungan pajak atas bunga pinjaman, sehingga dapat mengurangi konflik agensi karena baik *principal* dan *agent* bersama-sama mendapatkan keuntungan dari hutang. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Blockholder ownership* berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Faktor Makroekonomi

Menurut Khanna *et al.* (2018), faktor makroekonomi perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan untuk kebijakan hutang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah kestabilan politik dan tingkat inflasi.

1. Kestabilan Politik

Kestabilan politik adalah standar untuk mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme (Razak dan

Suhadak, 2019). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).

Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011).

Berdasarkan teori *pecking order*, ketika kestabilan politik naik, risiko politik akan turun, akan mengakibatkan meningkatnya perekonomian negara tersebut (Razak dan Suhadak, 2019), sehingga dalam perekonomian yang meningkat tersebut jika laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan beralih menggunakan hutang untuk menambah modal kegiatan usahanya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kestabilan politik berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

2. Tingkat Inflasi

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana tingkat inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Staikouras dan Wood (2003) dalam Kosmidou (2008), inflasi memiliki efek langsung terhadap beban-beban perusahaan sektor keuangan. Beban operasional yang meningkat dapat menurunkan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menggunakan hutang (Firmansyah *et al.*, 2016).

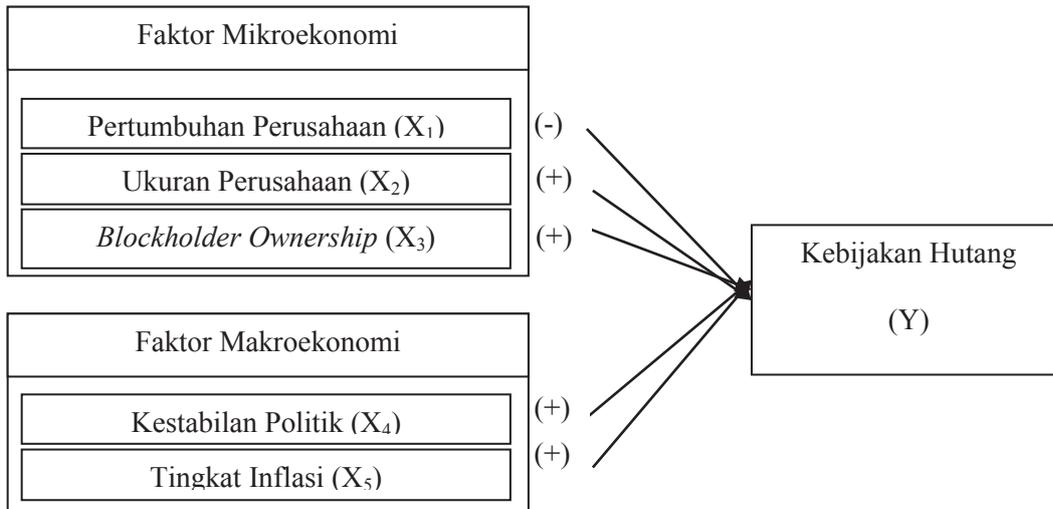
Menurut Mukhlis (2016), bagi perusahaan sektor keuangan terjadinya inflasi dapat mempengaruhi alokasi kredit yang diberikan kepada kreditur. Dengan semakin tingginya inflasi, maka dalam perspektif produsen hal tersebut dapat berarti terjadinya kenaikan output di pasar. Kenaikan tersebut jika diiringi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan sektor keuangan.

Berdasarkan teori *pecking order*, peningkatan tingkat inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional perusahaan, tetapi dilain hal peningkatan inflasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu pendapatan dapat meningkat, untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sektor keuangan ini dan menutupi biaya operasional perusahaan, perusahaan akan menambah modal dengan menggunakan hutang.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Firmansyah *et al.* (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat inflasi dengan kebijakan hutang. Hasil yang sama ditemukan oleh M'ng *et al.* (2017) menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 91 perusahaan.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu (a) Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI, (b) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember dalam mata uang Rupiah selama periode 2014-2018, (c) Perusahaan yang memiliki pertumbuhan total pendapatan yang positif selama periode 2014-2018. Sehingga, perusahaan yang digunakan sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 perusahaan dengan total data penelitian berjumlah 160 data.

Kebijakan Hutang

Rumus yang digunakan untuk pengukuran kebijakan hutang adalah dengan DER (*Debt Equity Ratio*). *Debt to Equity Ratio* ini adalah ukuran yang memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2014). Saputra *et al.* (2017) menggunakan DER sebagai alat ukur kebijakan hutang dengan rumus sebagai berikut :

$$Debt\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$$

Pertumbuhan Perusahaan

Proksi yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan perusahaan adalah perubahan pendapatan perusahaan karena untuk meningkatkan pendapatan tersebut maka diperlukan sumber dana yang dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Sanusi dan

Nazar, 2014). Menurut Sanusi dan Nazar (2014) pertumbuhan perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{GROWTH} = \frac{(\text{Total pendapatan}_t - \text{Total pendapatan}_{t-1})}{\text{Total pendapatan}_{t-1}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Ifada dan Yunandriatna (2017), semakin besar perusahaan dapat memberikan kemudahan akses pencarian dana dari sumber hutang karena perusahaan mempunyai *collateral assets*. Menurut Nyamita *et al.* (2014), ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{total aset}).$$

Blockholder Ownership

Mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00059/BEI/07-2019, *blockholder ownership* adalah kepemilikan saham oleh berbagai pihak diluar kepemilikan oleh publik dengan proporsi kepemilikan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah saham yang beredar agar memiliki hak suara lebih terhadap kebijakan perusahaan. Menurut Wiliandri (2011), *blockholder ownership* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BO} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki blockholder}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kestabilan Politik

Kestabilan politik adalah standar untuk mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme (Razak dan Suhadak, 2019). Ketidakstabilan politik akan mengarah pada kebijakan makroekonomi jangka pendek yang tidak optimal atau meningkatkan kebijakan yang tidak pasti, sehingga menghasilkan lingkungan politik-ekonomi yang tidak pasti, meningkatkan risiko bisnis, dan mengurangi investasi (Aisen dan Veiga, 2011). Kestabilan politik dihitung berdasarkan data indikator kestabilan politik negara Indonesia yang dikeluarkan oleh *The World Governance Indicators* (Razak dan Suhadak, 2019).

Tingkat Inflasi

Menurut Bank Indonesia, tingkat inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi dihitung berdasarkan tingkat inflasi tahunan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	Sig.
Konstanta	-2,407	0,000
SQRT_GROWTH	-0,252	0,002
SQRT_SIZE	0,651	0,000
SQRT_BO	0,725	0,008
SQRT_PS	0,050	0,863
SQRT_INFL	0,142	0,222

Sumber : Data Olahan SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.1, maka model regresi yang didapat ialah:

$$\text{DER} = -2,407 - 0,252\text{GROWTH} + 0,651\text{SIZE} + 0,725\text{BO} + 0,050\text{PS} + 0,142\text{INFL}$$

Keterangan :

DER	= Kebijakan Hutang
GROWTH	= Pertumbuhan Perusahaan
SIZE	= Ukuran Perusahaan
BO	= <i>Blockholder Ownership</i>
PS	= Kestabilan Politik
INFL	= Tingkat Inflasi

Berdasarkan Tabel 4.1, dengan tingkat signifikansi 0,05, variabel GROWTH memiliki nilai signifikan sebesar $0,002 < \text{nilai signifikan } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 atau hipotesis pertama diterima. Variabel SIZE memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < \text{nilai signifikan } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 atau hipotesis kedua diterima. Variabel BO memiliki nilai signifikan sebesar $0,008 < \text{nilai signifikan } 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 atau hipotesis ketiga diterima. Variabel PS memiliki nilai signifikan sebesar $0,873 > \text{nilai signifikan } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 atau hipotesis keempat ditolak. Variabel INFL memiliki nilai signifikan sebesar $0,222 > \text{nilai signifikan } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_5 atau hipotesis kelima ditolak.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,571 ^a	,327	,305	,6235365

Sumber : Data Olahan SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.2, nilai adjusted R Square adalah sebesar 0,327 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), Ukuran Perusahaan (SIZE), *Blockholder Ownership* (BO), Kestabilan Politik (PS), dan Tingkat Inflasi (INFL) terhadap variabel Kebijakan Hutang (DER) sebesar 32,7%, sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam model regresi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nyamita *et al.* (2014), Sanusi dan Nazar (2014), dan Ramadhany *et al.* (2015). Semakin tinggi pendapatan yang mampu dihasilkan maka semakin besar laba perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih mengandalkan laba internal (Sanusi dan Nazar, 2014).

Hal ini mendukung teori agensi, yaitu semakin besar dan positif perubahan total pendapatan dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga konflik agensi dapat diatasi dan tidak membutuhkan biaya pengawasan tambahan dari pihak kreditur.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Memon *et al.* (2015) dan M'ng *et al.* (2017). Menurut Ifada dan Yunandriatna (2014), semakin besar ukuran perusahaan dapat memberikan kemudahan akses pencairan dana dari sumber hutang karena perusahaan mempunyai *collateral assets*.

Hal ini juga mendukung teori *pecking order*, yaitu semakin besar total aset, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan, meliputi biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan. Jika penggunaan laba ditahan untuk mencukupi biaya-biaya tersebut terbatas, maka alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang.

Pengaruh *Blockholder Ownership* Terhadap Kebijakan Hutang

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maryasih dan Gemala (2014), serta Saputra *et al.* (2017). Menurut Maryasih dan Gemala (2014) dan Wiliandri (2011), semakin besar dan memusat penguasaan saham oleh sekelompok pemegang saham akan mendorong perusahaan lebih berani mengambil pinjaman sehingga meningkatkan DER karena dalam mengambil berbagai keputusan perusahaan *blockholder* memiliki kekuasaan yang lebih, termasuk kebijakan hutang.

Pengaruh Kestabilan Politik Terhadap Kebijakan Hutang

Ketika kestabilan politik naik, risiko politik akan turun, akan mengakibatkan meningkatnya perekonomian negara tersebut (Razak dan Suhadak, 2019), sehingga dalam perekonomian yang meningkat tersebut jika laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai

kegiatan perusahaan, maka perusahaan akan beralih menggunakan hutang untuk menambah modal kegiatan usahanya.

Berdasarkan Tabel 4.3, pada tahun 2016 perubahan beban perusahaan sektor keuangan lebih besar daripada perubahan pendapatannya, sehingga perusahaan cenderung menurunkan penggunaan hutangnya. Pada tahun 2014-2018, penanaman modal asing terus meningkat. Perusahaan dapat mengandalkan penanaman modal investasi yang diperoleh.

Tabel 4.3 Pendapatan, Beban Perusahaan Sektor Keuangan, dan Penanaman Modal Invetasi tahun 2014-2018 (dalam triliun Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan sektor keuangan	Rp319,8	Rp347,1	Rp378,3	Rp398,9	Rp415,6
Perubahan (%)	-	8,54%	8,99%	5,45%	4,19%
Beban-beban sektor keuangan	Rp234,1	Rp250,3	Rp280	Rp276,5	Rp276,4
Perubahan (%)	-	6,89%	12,29%	-1,62%	-0,05%
Penanaman modal investasi	Rp463,7	Rp545,4	Rp612,8	Rp692,8	Rp721,3

Sumber : BPS, BKPM, dan Laporan Keuangan, data diolah.

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Kebijakan Hutang

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah *et al.* (2016), serta M'ng *et al.* (2017). Sebaliknya, menurut Mukhlis (2016), semakin tinggi inflasi, kenaikan output akan semakin, jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat untuk membayar pinjaman akan mengakibatkan kredit macet, sehingga menurunkan kinerja perusahaan sektor keuangan dan menambah beban perusahaan. Pada saat titik tertentu dimana beban perusahaan lebih besar daripada pendapatannya, perusahaan akan mengurangi jumlah hutang yang digunakan untuk menurunkan beban bunganya.

Hal ini diperlihatkan dalam Tabel 4.4, pada tahun 2016 perubahan beban perusahaan sektor keuangan lebih besar daripada perubahan pendapatannya, sehingga perusahaan cenderung menurunkan penggunaan hutangnya.

Tabel 4.4 Pendapatan dan Beban Perusahaan Sektor Keuangan 2014-2018 (dalam triliun Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan sektor keuangan	Rp319,8	Rp347,1	Rp378,3	Rp398,9	Rp415,6
Perubahan (%)	-	8,54%	8,99%	5,45%	4,19%
Beban-beban sektor keuangan	Rp234,1	Rp250,3	Rp280	Rp276,5	Rp276,4
Perubahan (%)	-	6,89%	12,29%	-1,62%	-0,05%

Sumber : BPS dan Laporan Keuangan, data diolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.
3. *Blockholder ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,008 atau lebih besar dari 0,05.
4. Kestabilan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,863 atau lebih besar dari 0,05.
5. Tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang dibuktikan melalui pengujian signifikansi dengan hasil nilai signifikansi 0,222 atau lebih besar dari 0,05.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor mikroekonomi lain seperti kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan *corporate governance* dalam penelitiannya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menggambarkan faktor mikroekonomi perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor makroekonomi lain seperti cadangan devisa, PDB, IHSG, dan lain-lain dalam penelitiannya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menggambarkan faktor makroekonomi perusahaan.

REFERENSI

- Aisen, A., dan Veiga, F. J. 2011. How Does Political Instability Affect Economic Growth?. *IMF Working Paper*. WP/11/12.
- Brigham, Eugene F., dan Houston, Joel F. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia. 2019. *Surat Utang Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Darsono. 2001. Corporate Governance: State of the America. *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 7.
- Dictio. 2019. “Apa yang Dimaksud dengan Blockholder Ownership?”. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-blockholder-ownership/120685>. (Diakses tanggal 10 Oktober 2019).
- Fahmi, Irfan. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firmansyah, R. Y., Sudarma, M., dan Widia, Y. P. 2016. Faktor Internal dan Eksternal yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Balance*. Vol. XVIII, No. 1.
- Gumiwang, Ringkang. 2018. “Mengapa Perusahaan Terbelit Utang Hingga Berakhir Pailit?”. <http://tirto.id/mengapa-perusahaan-terbelit-utang-hingga-berakhir-pailit-cEow>. (diakses tanggal 12 Agustus 2019).
- Hanafi, Mamduh M. 2016. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hidayat, M. S. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Utang. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 1, No. 1.
- Ifada, Luluk M., dan Yunandriatma. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Audit*. Vol. 14, No. 1.
- Khanna, Sakshi., Srivastava, Amit., dan Medury, Yajulu. 2015. The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/Vector Autoregressive Approach. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 5, Issue 4.
- Kosmidou, Kyriaki. 2008. The determinants of banks’ profit in Greece during the period of EU financial integration. *Managerial Finance Journal*. Vol. 34. No. 3.
- Lestari, Desi. 2014. Pengaruh Blockholder Ownership, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Dan Nondebt Tax Shield Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Yang Masuk Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. IX. No. 1.
- M’ng, J. C. P., Rahman M., dan Sannacy S. 2017. The Determinants of Capital Structure: Evidence from Public Listed Companies in Malaysia, Singapore, and Thailand. *Cogent Economics and Finance*. Vol. 5.

- Maryasih, L., dan Gemala, M. Z. 2014. Analisis Pengaruh Blockholder Ownership dan Asset Tangibility terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 1. No. 1.
- Memon, P. A., Rus R. B. M., dan Ghazali Z. B. 2015. Firm and Macroeconomic Determinants of Debt: Pakistan Evidence. *Procedia-Social and Behavioral Science*. Volume 172.
- Mukhlis, Imam. 2012. Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16. No. 2.
- Nyamita, M. O., Garbharran, H. L., dan Dorasamy N. 2014. Factors Influencing Debt Financing within State-owned Corporations in Kenya. *Journal of Economics and Behavioral Studies*. Vol. 6, No. 11.
- Ramadhany, R., Aminah, M., dan Permanasari, Y. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Emiten Pertanian di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*. Vol. VI, No. 3.
- Razak, A.M., dan Suhadak. 2019. Pengaruh Worldwide Governance Indicators dan Macroeconomic Terhadap IHSG. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 70 No. 1.
- Sanjaya, R., 2014. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 16, No. 1.
- Sanusi, S. W., dan Nazar, M. R. 2014. Analisis Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Dividen Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 12. No. 2.
- Saputra, Doni H., Munthe, Inge L. S., dan Sofia, Myrna. 2017. Pengaruh Cash Flow, Kebijakan Dividen, Struktur Aktiva, Blockholder Ownership, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1.
- Soraya, dan Permanasari, M. 2017. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Non Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit*. Vol. 19, No. 1.
- Wiliandri, Ruly. 2011. Pengaruh Blockholder Ownership dan Firm Size terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2.
- Web www.bi.go.id
- Web www.bkpm.go.id
- Web www.bps.go.id
- Web idx.co.id
- Web www.info.worldbank/governance/wgi

PERAN MODERASI KONVERGENSI IFRS DALAM HUBUNGAN ANTARA AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN RETURN

Saring Suhendro

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

email: ssuhendro74@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of accrual information quality and the role of IFRS convergence on earnings informativeness measured by ERC in relation to stock price movements occurring in Indonesia. Using manufacturing companies that went public and were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2004-2013. The use of sample companies in 2004-2007 was before the IFRS convergence and in 2008-2013 after the IFRS convergence. The results showed that earnings response coefficient on earnings information decreased due to reported earnings containing high discretionary accruals. While investor perceptions (ERC) increased after the IFRS convergence.

Keyword: IFRS convergence, investor perceptions, return

A. PENDAHULUAN

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengumumkan bahwa *International Financial Report Standards* (IFRS) diadopsi di Indonesia pada tahun 2012 melalui konvergensi (IAI, 2011). Konvergensi ini dilakukan dalam berbagai tahap. Tahun 2007, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah dikonvergensi dengan IFRS dan mulai diterapkan sebagai tahap pertama pada tahun 2008. Proses ini terus berlanjut hingga tahun 2012 dengan merevisi PSAK yang mengadopsi IFRS.

Konvergensi IFRS ke dalam PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama dari sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Upaya konvergensi standar akuntansi ke IFRS ini dilakukan agar standar akuntansi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan khususnya informasi laba. Konvergensi IFRS yang menekankan pada nilai wajar (*fair value*) akan menghasilkan laba akuntansi dan merupakan signal bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi dan kualitas laba yang lebih tinggi (Ball, 2006).

Kualitas laba dapat ditunjukkan dengan agresivitas pelaporan keuangan yang lebih rendah. Semakin tinggi agresivitas pelaporan keuangan maka semakin rendah kualitas laba (Barth, Landsman, dan Lang, 2008). Agresivitas pelaporan keuangan merupakan aktivitas manajemen dalam rangka menaikkan/menurunkan laba akuntansi namun masih dalam batas *generally accepted accounting principles* (Frank *et al.*, 2009).

Aktivitas ini menunjukkan kesempatan opportunistik manajer dalam memanipulasi laba akuntansi untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menyebabkan informasi laba akuntansi nilainya menjadi kurang relevan (La Porta *et al.*, 1997).

Sloan (1996) mendokumentasikan bahwa saham yang memiliki akrual positif atau laba yang meningkat, maka pada tahun berikutnya *return*-nya cenderung rendah. Collins dan Hribar (2000) mengkonfirmasi temuan ini dengan menggunakan data akrual kuartalan. Interpretasi dari temuan ini bahwa akrual menunjukkan simpton dari manajemen laba, tetapi investor tidak menyadari hal tersebut dan meyakini bahwa profitabilitas periode berikutnya akan tetap tinggi. Beberapa peneliti menguji apakah *mispricing* dapat disebabkan oleh akrual yang mencerminkan perilaku opportunistik manajemen (akrual diskresioner). Jones (1991) mengembangkan model untuk menghitung komponen akrual diskresioner dan non-diskresioner. Subramanyam (1996) dan Xie (2000) menunjukkan bahwa komponen akrual diskresioner memprediksi *return*, namun untuk komponen non-diskresioner tidak diuji.

Subramanyam (1996) menggunakan model Jones (1995) menunjukkan bukti bahwa akrual diskresioner pada periode berjalan berdampak positif terhadap reaksi pasar. Reaksi pasar terhadap kualitas laba ditunjukkan dengan besarnya abnormal return saham atas laba yang dilaporkan perusahaan atau dikenal dengan *earnings response coefficient* (Scott, 2000). Imhoff dan Lobo (1992) menemukan bukti empiris bahwa semakin berkualitas laba suatu perusahaan maka semakin tinggi persepsi investor yang ditunjukkan dengan ERC yang positif. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah kualitas laba maka semakin rendah koefisien ERC. Hal ini membuktikan bahwa informasi terkait dengan kualitas laba yang dilaporkan akan mempengaruhi persepsi investor.

Defond dan Park (2001) menguji pengaruh abnormal akrual terhadap respon pasar yang dilihat dari koefisien ERC nya. Perusahaan yang melaporkan *good news* dengan *abnormal working capital accrual* yang menaikkan laba, maka ERC akan semakin rendah bila dibandingkan dengan melaporkan *abnormal working capital accrual* yang menurunkan laba. Sedangkan dampak penerapan IFRS (*fair value accounting*) pada hubungan *return-earnings* telah diuji oleh Kip (2009). Pengaruh IFRS diuji menggunakan model regresi untuk dua periode tahun berbeda dan industri berbeda, yaitu industri keuangan, asuransi, dan *real estate* yang paling banyak dipengaruhi oleh *fair value accounting*. Sedangkan penggunaan *fair value accounting* secara insidental adalah industri manufaktur dan industri lainnya. Temuannya menunjukkan bahwa IFRS (*fair value accounting*) berdampak ERC yang positif.

Di Indonesia penelitian yang meneliti dampak dari konvergensi IFRS pada hubungan *return-earnings* dalam rangka menguji apakah konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur memiliki dampak terhadap ERC belum pernah dilakukan. Hanya sedikit penelitian terdahulu yang menguji hubungan laba-*return* terkait dengan adopsi IFRS dan penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada salah satu elemen tertentu dan menghubungkannya dengan ERC (Kip, 2009).

Penelitian ini menggunakan ukuran *ERC* dari regresi *return-earnings* untuk mengukur persepsi investor terhadap kualitas laba. Penelitian ini menguji pengaruh informasi kualitas akrual dan peran konvergensi IFRS terhadap keinformatifan laba yang diukur dengan *ERC* dalam hubungan dengan pergerakan harga saham yang terjadi di Indonesia. Peneliti memfokuskan pada satu pengukuran akrual diskresioner sebagai indikator penting yang berhubungan dengan kualitas laba. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh akrual diskresioner pada laba terhadap kualitas laba (*ERC*) dengan konvergensi IFRS sebagai variabel pemoderasi merupakan konteks yang lebih powerful untuk mempelajari bagaimana meningkatkan keinformatifan informasi akuntansi.

Beberapa studi menyatakan bahwa IFRS tidak hanya berdampak pada level negara, tetapi juga berdampak terhadap perusahaan (Chua *et al.*, 2010; Adika dan Anggraini, 2012, dan Latif, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti dampak konvergensi IFRS pada level perusahaan.

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 669 tahun amatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008. Penelitian ini mengestimasi akrual diskresioner menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow *et al.*, (1995) menggunakan ROA untuk mengontrol operasi perusahaan sebagaimana yang disarankan oleh Kothari *et al.* (2005). Peneliti menggunakan perubahan laba (ΔNI) atau *unexpected earnings* dalam model karena laba komponen transitori hanya temporer dan hanya mempengaruhi laba tahun ini saja sehingga akan mempengaruhi arah *ERC* (Freeman dan Tse, 1992; Easton dan Zmijewski, 1989). ΔNI merupakan perbedaan antara laba sebelum *extraordinary items* untuk tahun ini dan tahun lalu. Peneliti memasukan beberapa variabel kontrol yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan.

Regresi dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu model pertama tanpa variabel kontrol dan model kedua memasukkan variabel kontrol. Hasilnya, baik pada model pertama dan model kedua menunjukkan bahwa akrual diskresioner menurunkan kualitas laba yang ditunjukkan dengan koefisien β_3 (*ERC*) bernilai negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor mempersepsikan akrual diskresioner negatif dan dianggap mengurangi kualitas laba. Sedangkan setelah penerapan konvergensi IFRS sejak tahun 2008 nilai koefisien β_4 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa investor mempersepsikan lebih percaya pada laba yang dilaporkan sehingga kualitas laba meningkat. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa bahwa IFRS (*fair value accounting*) berdampak pada *ERC* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, bagi investor yang menganggap evaluasi kualitas laba yang diakibatkan dari tingkat agresivitas pelaporan keuangan ketika membuat keputusan investasi. Jika investor memberikan perhatian khusus pada saat akan menginvestasikan dananya, maka mereka harus menginvestigasi apakah perusahaan tersebut melakukan agresivitas pelaporan keuangan melalui akrual diskresioner.

Kedua, bagi literatur akuntansi dapat memperkuat pengembangan teori positif bidang ilmu akuntansi khususnya yang berhubungan dengan praktek keuangan dalam hubungannya dengan pemberlakuan sebuah standar akuntansi serta dampaknya terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Akhirnya, bagi regulator untuk terus mengadopsi standar akuntansi mengacu pada standar IFRS.

Bagian selanjutnya dari penelitian ini diorganisasikan seperti berikut ini. Bagian 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 akan membahas mengenai metodologi penelitian. Sedangkan untuk pembahasan hasil dan kesimpulan dijelaskan pada bagian 4 dan 5.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan banyak digunakan sebagai teori yang mendasari penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Teori ini menunjukkan hubungan antara *principal* (pemilik sumber dana) dan *agent* (manajemen). Teori ini menjelaskan adanya pemisahan fungsi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan antara kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan kedua belah pihak yaitu *principal-agent* diikat dalam suatu kontrak (*contracting theory*) dimana *agent* berperan mewakili *principal* dalam pembuatan keputusan-keputusan bisnis dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hubungan para pihak tersebut membentuk *agency relationship* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Dalam konteks hubungan tersebut, kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing sehingga muncul potensi *agency problem*. *Agent* memiliki potensi besar untuk memaksimalkan kepentingannya dalam kontrak jangka pendek yang dimotivasi oleh beberapa hal. Salah satu motivasi manajemen laba adalah adanya bonus dan insentif yang manajer peroleh yang didasarkan atas kinerja perusahaan yang diukur dengan laba yang dihasilkan (Healy dan Wahlen, 1999). Manajemen laba yang didasarkan pada motivasi ini akan menimbulkan potensi besar yaitu manajemen akan melakukan manajemen laba perusahaan yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu (Jensen dan Meckling, 1976). Penyebab manajemen laba ini karena adanya *asymmetric information* antara manajer dan pemegang saham maupun manajer dan pihak eksternal perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). *Asymmetric information* ini terjadi karena manajemen perusahaan memiliki informasi lebih tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham.

Namun, pemegang saham dapat membatasi perilaku manajer melalui proses monitoring. Proses ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa manajemen tidak melakukan tindakan tertentu yang menyimpang atau cenderung membahayakan perusahaan. Upaya ini menimbulkan biaya monitoring (Jensen dan Meckling, 1976).

Agresivitas Pelaporan Keuangan

Agresivitas pelaporan keuangan merupakan aktivitas manajemen dalam rangka memanipulasi (menaikan/menurunkan) laba akuntansi yang masih dalam batas *generally accepted accounting principles* (Frank *et al*, 2009). Manipulasi laba merupakan suatu tindakan manajemen yang dengan sengaja mengambil langkah-langkah tertentu untuk melaporkan laba sampai pada tingkatan yang diinginkan. Aktivitas manajemen laba merupakan tindakan manipulasi laba dengan cara menggunakan keleluasaan manajemen dalam pelaporan sesuai dengan yang standar akuntansi dan aktivitas yang terstruktur dalam cara yang tidak akan menurunkan nilai perusahaan.

Schipper (1989) berpendapat bahwa manajemen laba merupakan suatu bentuk campur tangan manajemen terhadap proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Bentuk campur tangan ini bisa mengambil bentuk angka-angka yang dinyatakan sesuai dengan pemilihan kebijakan pelaporan atau akrual diskresioner. Bentuk campur tangan manajemen terhadap pelaporan keuangan akan mengubah laporan yang dilaporkan dapat bertujuan untuk menyesatkan pengguna laporan ataupun untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999).

Manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan menurunkan kualitas laporan itu sendiri karena dapat memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Apabila laba yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan mendasar dari keadaan ekonomi perusahaan melainkan keinginan manajemen sendiri, maka kualitas laba pada laporan keuangan akan berkurang (Levitt, 1998).

Penggunaan akrual dalam mendeteksi manajemen laba merupakan suatu langkah yang selama ini digunakan dan dipercaya keakuratannya dalam melakukan deteksi. Akrual diskresioner digunakan sebagai proksi untuk mendeteksi manajemen laba dengan menggunakan beberapa model ekspektasi akrual seperti Model Jones (1991), modified Jones (1995), Kasznik (1999), DeFond (2001), Yoon dan Miller (2002), Kothari *et al.* (2005), Gul dan Jaggi (2005).

Earnings Response Coefficient (ERC)

ERC merupakan ukuran hubungan antara laba dan *return* saham. ERC mengukur keinformatifan laba dalam hubungan dengan *return* saham. Volatilitas yang sering digunakan oleh peneliti untuk melihat hubungan antara informasi laba yang dilaporkan perusahaan dengan reaksi pasar dalam merespon informasi tersebut. ERC juga mengukur seberapa banyak informasi baru tentang kandungan laba dan informasi diukur dengan menguji pengaruh terhadap *return* saham sekitar tanggal pengumuman. Namun, beberapa peneliti menguji hubungan antara laba dan *return* selama satu tahun. Selain itu, mereka juga menggunakan ERC sebagai ukuran hubungan antara *unexpected earnings* dan *unexpected return* (Easton dan Zmijewski, 1989, Collins dan Kothari, 1989).

Ball dan Brawn (1968) menunjukkan bukti empiris bahwa terjadi fenomena abnormal *return* dalam hubungan antara informasi laba dengan respon pasar. Reaksi pasar dapat dilihat dari nilai koefisien ERC, sebagaimana yang diteliti oleh Kormendi dan Lipe (1987). Penelitian Kormendi dan Lipe (1987) menunjukkan bahwa laba dan ERC berhubungan positif dengan atribut laba perusahaan secara time series. Dechowet *al.* (1994) mengaitkan akuntansi akrual dengan ERC yang juga menangkap adanya fenomena abnormal *return*.

Abnormal *return* dari pasar modal dapat diidentifikasi dari *good news* perusahaan yang berdampak positif terhadap abnormal return, dan *bad news* perusahaan yang berdampak negatif terhadap abnormal *return*. Respon pasar terhadap *good news* maupun *bad news* atas informasi laba dapat diukur menggunakan ERC. ERC mengukur tingkat abnormal *return* pasar dalam merespon komponen laba *unexpected* yang dilaporkan dari perusahaan yang menerbitkan saham. Semakin tinggi ERC, maka investor akan memandang kinerja perusahaan dimasa depan akan lebih baik dibandingkan kinerja periode berjalan (Ramakrishnan dan Thomas, 1991).

Defond dan Park (2001) menguji dampak akrual diskresioner yang diantisipasi oleh ERC. Apabila pasar mengantisipasi adanya akrual pada suatu perusahaan maka pengaruh akrual tersebut dapat dilihat dari harga saham dan ERC. Defond dan Park (2001) mengekspektasi bahwa perusahaan yang melaporkan *good news* dengan peningkatan modal kerja akrual diskresioner akan memiliki ERC yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan penurunan modal kerja akrual diskresioner. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan peningkatan laba pada modal kerja akrual diskresioner akan meningkatkan ERC daripada perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan laba yang menurun modal kerja akrual diskresioner. Pasar mengantisipasi akrual diskresioner tersebut dalam harga saham.

Konvergensi IFRS

Implementasi IFRS di Indonesia masih tahap konvergensi bukan adopsi penuh IFRS. Standar yang telah dikeluarkan mengacu pada praktek IFRS adalah PSAK tentang instrumen keuangan. Pada konvergensi IFRS fase pertama (2008 – 2012), per 1 Desember 2012 DSAK IAI telah menerbitkan: 40 PSAK, 20 ISAK, dan 11 PPSAK berikut revisi terkait serta 10 PSAK Syariah.

Tujuan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi lokal adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (IAI, 2011). Adopsi IFRS akan memberikan manfaat bagi investor yaitu: pertama, IFRS akan memberikan informasi akuntansi yang lebih akurat, lebih komprehensif dan lebih tepat waktu. Kedua, IFRS akan mengurangi biaya yang digunakan untuk mengolah informasi akuntansi karena dapat diperbandingkan secara internasional. Ketiga, pasar akan menjadi lebih efisien sebab biaya yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan menjadi lebih rendah. Keempat, IFRS menghilangkan perbedaan standar akuntansi, yang secara

langsung membuka peluang untuk terjadinya transaksi ekuitas antar negara. Kelima, adopsi IFRS dapat menurunkan risiko yang disebabkan oleh asimetri informasi sebagai akibat dari meningkatnya kualitas informasi akuntansi (Ball, 2006).

Laba yang dipengaruhi oleh akuntansi nilai wajar karena pengukuran berikutnya dari aset dan *impairment* menyebabkan keuntungan atau kerugian. Apabila sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan harus diukur menggunakan nilai wajar, maka kemungkinan besar laba akan berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Pada saat kerugian akibat *impairment* maka perusahaan harus mengakui dengan segera keuntungan atau kerugian tersebut. Dengan demikian, laba dipengaruhi oleh akuntansi nilai wajar dan berpengaruh pula ke *return* saham.

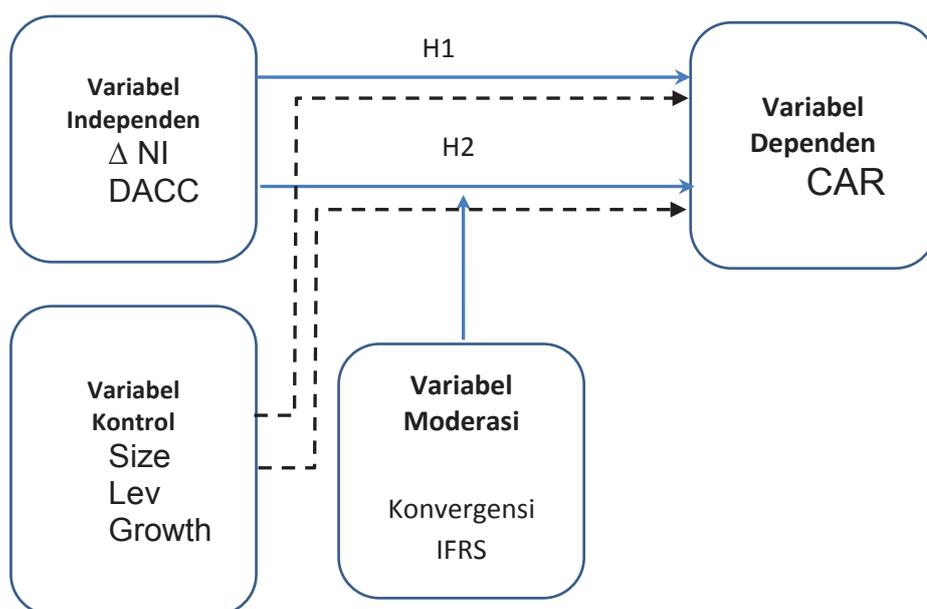
Meskipun penerapan IFRS yang mengacu pada *fair value* menimbulkan pro dan kontra namun penelitian dibidang ini masih terus dilakukan untuk mencapai suatu kesimpulan manfaat keberadaan IFRS. Pendukung akuntansi *fair value* mengklaim bahwa *fair value* dapat menambah relevansi nilai informasi laporan keuangan, dengan menjadikannya lebih berguna bagi investor untuk tujuan penilaian perusahaan (Barth *et al.* 2001; Barth, 2004; Ball, 2006). Penelitian yang menyelidiki konsekuensi pelaporan keuangan dari penerapan IFRS seperti Barth *et al.* (2008) menyatakan bahwa laba akuntansi lebih informatif (nilai) dan kualitas yang lebih tinggi setelah penerapan IFRS.

Beberapa penelitian di beberapa negara berbeda menunjukkan praktek manajemen laba tidaklah berkurang setelah mengadopsi IFRS (van Tendeloo dan Vanstraelen, 2005; Jeanjean dan Stolowy, 2008; Paananen, 2008; Kabir, Laswad dan Islam, 2010). Ahmed, Neel dan Wang (2013) berpendapat bahwa fleksibilitas yang terkandung dalam IFRS menyebabkan pengadopsiannya tidaklah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Selanjutnya, ketika pertimbangan manajemen membuat pengakuan suatu transaksi diperketat (manajemen laba akrual), itu cenderung mendorong manajer untuk mencari cara melakukan manajemen laba dengan transaksi yang lebih terstruktur (Schipper, 2003).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menguji dampak manajemen laba terhadap persepsi investor yang diukur dengan koefisien ERC dan dirumuskan dalam hipotesis pertama (H1). Sedangkan pengaruh konvergensi IFRS dalam hubungan antara *return* dan laba untuk melihat dampak konvergensi IFRS dalam pergerakan koefisien ERC ditunjukkan dalam hipotesis kedua (H2). Variabel kontrol yang digunakan dalam model ini adalah ukuran perusahaan (*size*), *leverage* perusahaan (*lev*), dan pertumbuhan perusahaan (*growth*). Hal ini dilakukan untuk melihat pilihan alternatif manajemen untuk melakukan praktek manajemen laba ketika pilihan terhadap metode tertentu dibatasi (Watts dan Zimmerman, 1986; (Siregar dan Utama, 2008; dan Purwanti, 2011).

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Kualitas Laba

Perusahaan mempengaruhi dan memanipulasi laba yang dilaporkan melalui pilihan kebijakan akuntansi atau dikenal dengan akrual diskresioner. Akrual diskresioner yang merupakan residual akrual digunakan sebagai ukuran tingkat manajemen laba. Jones (1991) membagi akrual menjadi *normal accrual* (non-diskresioner) dan *abnormal discretionary* (akrual diskresioner) dengan melakukan model regresi *time series*. Residual dari regresi diatribusikan ke diskresioner manajemen laba.

Sloan (1996) dan Xie (2001) menemukan bahwa akrual secara umum memiliki power untuk memprediksi *return* saham periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang disebabkan oleh akrual diskresioner tidaklah direspon baik oleh pasar (investor) sebagai *good news*. Semakin tinggi akrual diskresioner (manajemen laba) yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah harga saham.

Defond dan Park (2001) menguji dampak akrual diskresioner yang diantisipasi oleh *ERC*. Apabila pasar mengantisipasi adanya akrual pada suatu perusahaan maka pengaruh akrual tersebut dapat dilihat dari harga saham dan *ERC*. Defond dan Park (2001) mengekspektasi bahwa perusahaan yang melaporkan *good news* dengan peningkatan modal kerja akrual diskresioner akan memiliki *ERC* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan penurunan modal kerja akrual diskresioner. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan peningkatan laba pada modal kerja akrual diskresioner akan meningkatkan *ERC* dibandingkan perusahaan yang melaporkan *bad news* dengan laba yang menurun modal kerja akrual diskresioner. Pasar mengantisipasi akrual diskresioner tersebut dalam harga saham. Temuan Defond dan Park (2001) membuktikan bahwa pasar tidak sepenuhnya menyesuaikan pada implikasi harga.

Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi/rendah dapat mengurangi kredibilitas dari informasi laba yang dilaporkan. Praktek manajemen laba ini (yang diprosikan dengan akrual diskresioner) berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar (investor) dalam keputusan investasi. Berdasarkan hubungan persepsi antara kualitas laba dan akrual diskresioner.

Karena *ERC* merupakan proksi dari persepsi pasar terhadap kualitas laba, maka akrual diskresioner yang mencerminkan kualitas laba akan dipersepsikan negatif oleh investor. Hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: investor mempersepsikan negatif terhadap kualitas laba (akrual diskresioner)

Pengaruh Konvergensi IFRS dalam Hubungan antara Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Kualitas Laba

Penerapan IFRS (*fair value accounting*) diyakini dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dipublikasikan karena manajer ditekan untuk membuat suatu laporan yang benar dan jujur serta dibatasi dalam aktivitas manajemen laba (Hoque, Easton dan van Zijil, 2014). Penggunaan konsep *fair value* pada pelaporan keuangan akan menjadikan informasi lebih informatif dikarenakan lebih sering terjadinya fluktuasi harga dan dilakukan penyesuaian harga maka seharusnya *ERC* menjadi lebih tinggi (Kip, 2009). Temuan Kip (2009) menunjukkan bahwa IFRS mempengaruhi *ERC*. *ERC* yang lebih tinggi menunjukkan informasi yang lebih kepada investor dan akan dipersepsikan laba lebih persisten.

Chua *et al* (2012) menyatakan bahwa kualitas akuntansi akan mengalami peningkatan berdasarkan penurunan *earnings management* dan meningkatnya *timely loss recognition*. Latif (2012) menunjukkan terjadinya peningkatan informasi setelah adopsi IFRS di Uni Eropa. Armstrong *et al.* (2010) menginvestigasi respon investor terhadap informasi laba dengan menguji reaksi pasar modal menggunakan ukuran *ERC* terhadap peristiwa adopsi IFRS dilakukan di negara Eropa. Hasil penelitian Armstrong *et al.* (2010) menunjukkan bahwa pasar merespon positif terhadap peningkatan kualitas informasi akuntansi setelah adopsi IFRS. Investor dapat bereaksi positif terhadap informasi laba IFRS apabila investor berharap bahwa penerapan IFRS dapat menghasilkan kualitas informasi laba yang lebih tinggi, relatif terhadap penerapan standar akuntansi lokal. Sedangkan Paglietti (2009) dan Gebhardt & Farkas (2011) menginvestigasi *value relevance* dari informasi akuntansi sebelum dan sesudah mengimplementasikan IFRS secara mandatori. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi meningkat setelah mengadopsi IFRS.

Berdasarkan argumen dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya interaksi antara konvergensi IFRS dengan agresivitas pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laba.

Hal ini terjadi karena konvergensi IFRS akan membatasi pelaporan akrual diskresioner yang agresif dan menekan perilaku opportunistik manajemen sehingga menghasilkan laba yang lebih persisten dan mempengaruhi informasi laba perusahaan. Berkenaan dengan informasi laba tersebut, maka investor akan merespon positif kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan reaksi pasar lebih baik.

Berdasarkan hubungan persepsi antara kualitas laba dan akrual diskresioner, peneliti menduga konvergensi IFRS mempengaruhi kualitas laba. Semakin banyak standar akuntansi yang dikonversi ke IFRS dan diimplementasikan oleh perusahaan dari tahun ke tahun, maka investor mempersepsikan kualitas laba akan meningkat (menurun). Dengan semakin banyaknya PSAK yang dikonvergen ke IFRS maka perilaku manajemen laba diduga akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sebelum konvergen ke IFRS (Adika dan Anggraita, 2013). Oleh karena itu, diharapkan koefisien β_4 berbeda dari nol.

H2: persepsi investor terhadap kualitas laba meningkat setelah konvergensi IFRS

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2013. Penelitian ini hanya membatasi pada perusahaan manufaktur karena model untuk mengukur praktek manajemen laba dikembangkan untuk menguji praktek itu pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Penggunaan sampel perusahaan tahun 2004-2007 adalah sebelum konvergensi IFRS dan tahun 2008-2013 setelah konvergensi IFRS. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2004-2013 secara berturut-turut;
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan rugi laba serta laporan arus kas secara lengkap; dan
3. Laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Dua hipotesis yang telah dikembangkan akan diuji secara empiris dengan menggunakan metode *multiple linear regression*. Data keuangan perusahaan-perusahaan yang digunakan diambil dari *Datastream* dan akan diuji dengan menggunakan *Eviews 6*.

Definisi Operasional Variabel

Return

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *cummulative market-adjusted return* (CAR). Untuk menghitung CAR maka perlu dihitung:

- a. Return aktual saham adalah return yang sesungguhnya terjadi pada saat atau tanggal

tertentu pada periode pengamatan, pada penelitian ini adalah return pada selama 15 bulan yaitu tiga bulan setelah tahun berakhirnya fiskal.

- b. Return abnormal (*abnormal return*), menggunakan *market adjusted return model* adalah perbedaan antara return ekspektasi dengan return pasar, yang dirumuskan menjadi:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{m,t}$$

Dimana:

$AR_{i,t}$ = Abnormal Return saham *i* pada periode *t*

$R_{i,t}$ = Return aktual saham *i* pada periode *t*

$R_{m,t}$ = Return pasar pada periode *t*

Model tersebut digunakan dengan anggapan bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return saham adalah indeks harga pasar pada saat itu, dengan demikian return abnormal adalah return yang melebihi return pasar (Schweitzer, 1989 dalam Mulyani *et al.*, 2007). Sedangkan return pasar diwakili dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dihitung secara tahunan dengan rumus:

$$\frac{I_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

Di mana:

R_m = Return pasar

$IHSG_t$ = Indeks harga saham gabungan pada periode *t*

$IHSG_{t-1}$ = Indeks harga saham gabungan pada periode *t-1*

Return aktual saham periode dihitung dengan rumus:

$$\frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Di mana:

$R_{i,t}$ = Return saham *i* pada periode *t*

$P_{i,t}$ = Harga saham *i* pada periode *t*

$P_{i,t-1}$ = Harga saham *i* pada periode *t-1*

Kemudian, rumus perhitungan CAR adalah:

$$CAR_{it} = \sum AR_{it}$$

Dimana: AR_{it} = *abnormal return* untuk saham *i* pada periode *t*

Agresivitas Pelaporan Keuangan

Proksi dari agresivitas pelaporan keuangan menggunakan akrual diskresioner. Akrual diskresioner diestimasi menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi (Dechow *et al.*, 1995) menggunakan ROA untuk mengontrol operasi perusahaan sebagaimana yang

disarankan oleh Kothari et al., (2005).Dechow et al. (1995) membuktikan bahwa *Modified Jones Model* lebih unggul dibandingkan dengan model manajemen laba akrual lainnya. Untuk menghitung akrual diskresioner dilakukan regresi untuk memperoleh nilai residual. Tahap penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{ACC_{it}}{ASSET_{it-1}} = \alpha_{0it} + \alpha_{1it} \frac{(\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it})}{ASSET_{it-1}} + \alpha_{2it} \frac{PPE_{it}}{ASSET_{it-1}} + \alpha_{3it} ROA_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- ACC_{it} : Total akrual perusahaan *i* pada periode *t*
- ASSET_{it-1} : Total asset perusahaan *i* pada periode *t*
- ΔREV_{it} : selisih pendapatan perusahaan *i* pada periode *t* dibandingkan periode *t-1*
- ΔAR_{it} : selisih piutang usaha perusahaan *i* pada periode *t* dibandingkan periode *t-1*
- PPE_{it} : *gross property, plant and equipment* perusahaan *i* pada periode *t*
- ROA_{it} : laba sebelum *extraordinary item* perusahaan *i* pada periode *t*
- ε_{it} : akrual diskresioner perusahaan *i* pada periode *t*
- α₀ : konstanta
- α_{1-3it} : koefisien

Konvergensi IFRS

Untuk meneliti di bidang konvergensi IFRS ke dalam PSAK di Indonesia tidak dapat digunakan metode sebelum dan sesudah adopsi IFRS, melainkan hanya dapat melihat trend dari tahun ke tahun saja seperti yang dikutip dari pernyataan beberapa ahli terkait dengan konvergensi IFRS di Indonesia yaitu Dr. Ratna Wardhani, Dosen Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, (2014) menyatakan bahwa “Indonesia menerapkan strategi konvergensi dalam pengadopsian IFRS ke dalam PSAK, Indonesia tidak menggunakan strategi *Big Bang* seperti di Australia atau Hongkong... sehingga penelitian terkait dengan konvergensi IFRS di Indonesia hendaknya fokus pada dampak sebelum dan sesudah dari standar aturan tertentu dalam PSAK yang telah dikonvergensi dengan IFRS atau fokus untuk melihat trend dampak dari konvergensi dari tahun ke tahun.”

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh ahli lainnya yang memperkuat pendapat ahli pertama (Dr. Sylvia Veronica Siregar, anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014), menyatakan bahwa: “Proksi yang digunakan untuk melihat tren konvergensi IFRS di Indonesia, dapat menggunakan variabel dummy 1,2,3,..dan seterusnya untuk mewakili tahun *t* tersebut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur variabel proses konvergensi IFRS ke dalam PSAK yang terjadi di Indonesia ditandai dengan melihat trend proses konvergensi dari tahun ke tahun dengan menggunakan variabel dummy dengan skala nominal yang menunjukkan tahun periode tahap awal sampai dengan setelah disahkannya aturan PSAK yang telah dikonvergensi dengan IFRS yaitu (2008, 2009, 2010,...,2013) = (1, 2, 3,...,6).Angka konvergensi IFRS yang semakin besar menunjukkan asumsi bahwa semakin banyak standar akuntansi keuangan yang telah disesuaikan dengan IFRS.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah 1) *leverage*. *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pembiayaan eksternal yang digunakan untuk pendanaan operasi dan perluasan atau memproksikan pengaruh kewajiban atas kontrak-kontrak yang telah mengikat perusahaan. Memasukkan *leverage* konsisten dengan *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba ketika ada kemungkinan untuk melanggar perjanjian kontrak karena adanya pinjaman dari pihak lain (Watts dan Zimmerman, 1986). Variabel ini diproksikan dengan *debt-to-asset ratio*; 2) ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan merupakan proksi kemampuan informatif atas harga. Perusahaan-perusahaan yang besar memiliki insentif yang lebih besar dalam melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang kecil oleh karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mendapatkan perhatian lebih banyak dari investor dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Siregar dan Utama, 2008). Ukuran perusahaan diwakili logaritma total aset; 3) Pertumbuhan penjualan (*growth*). Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Oleh karena perusahaan memiliki prospek pertumbuhan perusahaan dimasa depan, maka dorongan untuk melakukan manajemen laba pun diduga terjadi (Purwanti, 2011). Pertumbuhan penjualan diukur dengan total penjualan_t-penjualan_{t-1} dibagi dengan penjualan_{t-1}.

Model Empiris

Untuk menguji hipotesa H₁ dan H₂, maka digunakan estimasi regresi menggunakan model sebagai berikut:

$$CAR_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta NI_{it} + \beta_2 DACC_{it} + \beta_3 \Delta NI_{it} * DACC_{it} + \beta_4 \Delta NI_{it} * DACC_{it} * IFRS_{it} + \beta_5 IFRS_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 LEVERAGE_{it} + \beta_8 GROWTH_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

CAR_{it}	: <i>cumulative market-adjusted return</i> perusahaan i pada periode t
ΔNI_{it}	: Laba bersih yang dilaporkan perusahaan i pada periode t
$DACC_{it}$: akrual diskresioner perusahaan i pada periode t
$\Delta NI_{it} * DACC_{it}$: interaksi antara laba dengan akrual diskresioner perusahaan i pada periode t (ERC)
$\Delta NI_{it} * DACC_{it} * IFRS_{it}$: interaksi antara laba, akrual diskresioner, dan konvergensi IFRS perusahaan i pada periode t
$IFRS_{it}$: konvergensi IFRS perusahaan i pada periode t
$SIZE_{it}$: total asset perusahaan i pada periode t
$LEVERAGE_{it}$: rasio dana yang disediakan oleh kreditur perusahaan i pada periode t
$GROWTH_{it}$: pertumbuhan penjualan perusahaan i pada periode t
ROA_i	: laba sebelum <i>extraordinary item</i> perusahaan i pada periode t
β_0	: konstanta
β_{1-9}	: koefisien regresi

Persamaan (2) dikembangkan untuk menguji dampak praktek manajemen laba akrual yang diprosikan dengan nilai akrual diskresioner terhadap persepsi investor yang ditunjukkan dengan koefisien ERC. Berdasarkan persamaan (2) diekspektasi interaksi antara ΔNI dan $DACC$ atau koefisien (β_3) akan memiliki tanda negatif. Untuk menguji H2 yaitu dampak konvergensi IFRS pada praktek manajemen laba akrual terhadap *ERC* (β_4) dimana angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk tahun 2008-2013, sedangkan variabel konvergensi IFRS sebelum tahun 2008 akan menggunakan angka 0. Variabel nominal 1 sampai 6 digunakan untuk menunjukkan tingkat adopsi IFRS oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena Indonesia mengkonvergensi IFRS secara bertahap dimulai dari tahun 2008. Periode tahun sebelum 2008 (2004-2007) akan digunakan angka 0. Interaksi antara ΔNI , $DACC$, dan IFRS atau koefisien (β_4) diharapkan akan memiliki tanda berlawanan (positif) atau berbeda dari nol.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika deskriptif

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2004-2013 di Bursa Efek Indonesia dan tidak pernah mengalami *delisting* serta menyediakan semua data perusahaan yang diperlukan untuk pengujian empiris. Data diambil dari *Datastream* dari Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEB UI. Tabel 1 melaporkan ringkasan statistik deskriptif mean, median, max, min, dan standar deviasi dari keseluruhan sampel.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev.
CAR	0,06	0,06	0,56	(1,24)	0,12
ΔNI	0,07	0,07	1,01	(1,43)	0,13
DACC	(54,44)	(53,04)	179,55	(580,62)	79,54
IFRS	2,10	2,00	6,00	0,00	2,17
LEV	34,67	31,50	280,06	0,04	27,21
SIZE	21,14	21,02	26,08	17,55	1,58
GROWTH	0,10	0,10	1,91	-1,79	0,29

Tabel 1 (Lanjutan)

CAR adalah kumulatif *return* yang disesuaikan dengan pasar (*cumulative market-adjusted return*) untuk periode 12 bulan yang berakhir akhir tahun fiskal; ΔNI adalah perbedaan antara laba sebelum *extraordinary item* untuk tahun berjalan dan tahun lalu dibagi dengan total aset awal tahun. *DACC* adalah nilai akrual diskresioner. *IFRS* adalah variabel nominal 0 untuk periode tahun sebelum 2008 dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk tahun 2008 sampai 2013; *Lev* adalah leverage perusahaan yang diukur dengan menggunakan *debt to asset ratio*; *Size* adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pada tahun t ; *Growth* adalah pertumbuhan penjualan yang diukur dengan total penjualan $_t$ /penjualan $_{t-1}$.

Tabel 2 melaporkan matriks korelasi Pearson (ρ) antara *CAR*, ΔNI , *DACC*, *IFRS*, dan variabel kontrol. Korelasi yang rendah antar variabel yang mengukur persepsi investor mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi investor terhadap kualitas informasi akrual. Korelasi antara *IFRS* dan *DACC* positif dan signifikan ($\rho=0,302$, $p\text{-value} = 0,000$) menunjukkan bahwa *IFRS* mempengaruhi *DACC* secara positif.

Tabel 2
Pearson Correlation Matrix

Variabel	CAR	ΔNI	DACC	IFRS	LEV	SIZE	GROWTH
CAR	1						
ΔNI	0,450 (0,000)	1					
DACC	0,095 (0,014)	0,014 (0,722)	1				
IFRS	0,103 (0,008)	0,109 (0,005)	0,302 (0,000)	1			
LEV	-0,382 (0,000)	-0,372 (0,000)	-0,101 (0,009)	-0,153 (0,000)	1		
SIZE	0,192 (0,000)	0,211 (0,000)	0,190 (0,000)	0,169 (0,000)	0,028 0,477	1	
GROWTH	0,083 (0,032)	0,167 (0,000)	0,045 (0,249)	0,002 (0,962)	-0,171 (0,000)	0,051 (0,185)	1

Pearson correlation matrix untuk variabel penelitian. *CAR* adalah kumulatif *return* yang disesuaikan dengan pasar (*cumulative market-adjusted return*) untuk periode 12 bulan yang berakhir akhir tahun fiskal; ΔNI adalah perbedaan antara laba sebelum *extraordinary item* untuk tahun berjalan dan tahun lalu dibagi dengan total aset awal tahun. *DACC* adalah nilai aktual diskresioner. *IFRS* adalah variabel nominal 0 untuk periode tahun sebelum 2008 dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk tahun 2008 sampai 2013; *Lev* adalah leverage perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio*; *Size* adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pada tahun t ; *Growth* adalah pertumbuhan penjualan yang diukur dengan total penjualan $_t$ /penjualan $_{t-1}$.

Pengujian asumsi klasik ditujukan untuk melihat apakah model yang ada memenuhi persyaratan model regresi. Pengujian tersebut meliputi pengujian autokorelasi, heteroskedastitas, dan multikolinieritas untuk memastikan bahwa parameter yang dihasilkan efisien.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji Breusch-Godfrey. Kriteria pengujian adalah apabila nilai *p-value* dari Chi-square uji $< 5\%$ maka terdeteksi adanya autokorelasi. Hasil pengujian persamaan pada lampiran 1 menunjukkan *p-value* $> 5\%$ yang menyatakan tidak adanya autokorelasi.

Untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas digunakan uji White Heteroskedasticity. Apabila *p-value* dari *scaled explained SS* kurang dari 5% , maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan oleh hasil pada lampiran 2 menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Oleh karena adanya masalah dan heteroskedastisitas, maka *white estimator* digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil uji empiris dengan menggunakan OLS dan mengaplikasikan *white estimator* dapat dilihat pada Tabel 3.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan korelasi antar variabel independen dalam hal ini ΔNI , *DACC*, *IFRS*, *SIZE*, *LEV*, dan *GROWTH*. Tabel 2 menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen yang melebihi 0.8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dari yang akan diuji secara empiris terbebas dari masalah multikolinieritas.

Persepsi Investor terhadap Agresivitas Pelaporan Keuangan

Pengujian hipotesis pertama (*H1*) dan hipotesis kedua (*H2*) dilakukan menggunakan persamaan 2. Pengujian ini menggunakan dua regresi (model 1), yaitu regresi pertama tanpa memasukan variabel kontrol dan regresi kedua (model 2) dengan memasukan variabel kontrol. Hasil pengujian empiris kedua regresi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Earnings Response Coefficient dan Persepsi Investor

Variabel	Prediksi tanda	Koef	Model 1	Model 2
Intersep	-	β_0	0,0333 (0,000)	- 0,1583 (0,004) ***
ΔNI	+	β_1	0,2673 (0,000) ***	0,1547 (0,000) ***
DACC	-	β_2	0,0002 (0,000)	0,0001 (0,024)
$\Delta NI * DACC$	-	β_3	- 0,0032 (0,001) ***	- 0,0031 (0,000) ***
$\Delta NI * DACC * IFRS$	+	β_4	0,0005 (0,010) ***	0,0004 (0,018) ***
IFRS	?	β_5	0,0031 (0,119)	0,0009 (0,643)
SIZE	+	β_6		0,0114 (0,000) ***
LEV	-	β_7		- 0,0011 (0,000) ***
GROWTH	+	β_8		- 0,0127 (0,354)
Adjusted R2			0,294	0,352
F-Statistic			56.592 ***	4.257 ***

CAR adalah kumulatif *return* yang disesuaikan dengan pasar (*cumulative market-adjusted return*) untuk periode 12 bulan yang berakhir akhir tahun fiskal; ΔNI adalah perbedaan antara laba sebelum *extraordinary item* untuk tahun berjalan dan tahun lalu dibagi dengan total aset awal tahun. DACC adalah nilai akrual diskresioner. IFRS adalah variabel nominal 0 untuk periode tahun sebelum 2008 dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk tahun 2008 sampai 2013; *Lev* adalah leverage perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio*; *Size* adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pada tahun t ; *Growth* adalah pertumbuhan penjualan yang diukur dengan total penjualan $_t$ /penjualan $_{t-1}$.

Nilai *p-value* ditunjukkan dalam tanda kurung.

*** signifikan pada level 0,01, ** signifikan pada level 0,05, dan * signifikan pada level 0,1.

Pada tabel 3 untuk model regresi 1, menunjukkan bahwa $\Delta NI(\beta_1)$ berhubungan positif signifikan dengan *return* (*CAR*) yaitu sebesar 0,2673 dengan *p-value*=0,000. Hasil positif dan signifikan pada level 1 persen mengindikasikan bahwa perubahan laba meningkatkan persepsi investor terhadap keinformatifan laba. Setelah memasukan variabel kontrol (model

regresi 2), hasil pengujian juga menunjukkan koefisien $\Delta NI(\beta_1)$ yang positif signifikan yaitu 0,1547 dengan *p-value* 0,000.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa investor mempersepsikan negatif kualitas laba (akrual diskresioner). Persepsi investor terhadap akrual diskresioner yang mencerminkan *return* saham dapat dilihat pada tanda dan arah dari koefisien interaksi antara perubahan laba dan akrual diskresioner. Tabel 3 regresi 1 menunjukkan bahwa koefisien $\Delta NI * DACC$ (β_3) atau *ERC* adalah negatif signifikan pada level 1 persen yaitu $-0,0032$ (*p-value*=0,000). Koefisien (β_3) juga negatif signifikan pada model regresi kedua pada yaitu $-0,0031$ (*p-value*=0,000). Koefisien negatif signifikan mengindikasikan bahwa investor mempersepsikan bahwa dengan adanya akrual diskresioner akan mengurangi kualitas laba dan menurunkan *return* saham dimasa depan. Atau dengan kata lain, dengan investor mengetahui bahwa perusahaan melakukan manajemen laba (akrual diskresioner) maka keinformatifan laba akan berkurang. Jadi hipotesis pertama (H1) terdukung. Hal ini sejalan dengan penelitian Sloan (1996); Xie (2001); dan Defond dan Park (2001) yang menyatakan bahwa agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi/rendah dapat mengurangi kredibilitas dari informasi laba yang dilaporkan.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Imhoff dan Lobo (1992) bahwa semakin berkualitas laba suatu perusahaan maka semakin tinggi persepsi investor yang ditunjukkan dengan *ERC* yang positif. Hal ini membuktikan bahwa informasi terkait dengan kualitas laba yang dilaporkan akan mempengaruhi persepsi investor.

Dampak IFRS terhadap Persepsi Investor

Tabel 3, menguji hipotesis kedua (H2) apakah konvergensi IFRS akan meningkatkan keinformatifan laba. Peneliti menginteraksikan konvergensi IFRS dan akrual diskresioner dalam hubungan antara laba dan *return* saham. Pada kedua regresi tanpa atau dengan memasukan variabel kontrol interaksi ketiga variabel tersebut menunjukkan koefisien yang nilai positif dan signifikan. Nilai koefisien interaksi dari $\Delta NI * DACC * IFRS$ (β_4) atau *ERC* adalah positif signifikan sebesar 0,0005 pada regresi (*p-value*=0,000) untuk regresi model 1 dan 0,0004 dengan *p-value* 0,018 dengan memasukan variabel kontrol.

Hasil diatas mengindikasikan bahwa setelah konvergensi IFRS maka meningkatkan kepercayaan investor pada informasi laba yang dilaporkan. Investor meyakini bahwa penerapan IFRS mampu mengurangi perilaku opportunistik manajer dalam memanipulasi laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 telah dapat mengurangi diskresi manajemen dan meningkatkan keinformatifan dari laba yang dilaporkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kip (2009) yang menunjukkan secara jelas bahwa adopsi IFRS akan mempengaruhi *ERC* dan keinformatifan laba yang dilaporkan. Dengan demikian, hipotesis kedua terdukung.

Pelucio-Grecco *et al.* (2014) berpendapat bahwa suatu aturan akuntansi yang diterapkan dapat membatasi praktek manajemen laba apabila aturan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara meningkatkan tingkat komparabilitas juga transparansi informasi yang dilaporkan tersebut. Aturan yang mengatur tersebut berupa standar akuntansi yang mengadopsi standar akuntansi internasional. Penurunan praktek manajemen laba akrual perusahaan dapat menjadi indikator mengenai efektivitas konvergensi aturan IFRS dapat menekan sikap oportunistik manajemen sehingga menaikkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan (Pelucio-Grecco *et al.*, 2014).

Persepsi investor terhadap IFRS dalam menekan praktek manajemen laba disebabkan oleh karena banyaknya pengungkapan yang diharuskan oleh IFRS (Van Zijl, dan Dunstan (2013). Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka adopsi IFRS oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia mampu mengurangi praktek manajemen laba. Hwang, Chiou dan Wang (2013) menyatakan bahwa aturan yang menyangkut pengungkapan terbukti efektif dalam mengurangi praktek manajemen laba karena aturan yang efektif dapat membatasi diskresi manajemen dalam membuat laporan laba yang akan dipublikasikan (Pelucio-Grecco, 2014). Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2008 kualitas laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia telah mengalami peningkatan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh konvergensi IFRS terhadap persepsi investor terhadap keinformatifan laba yang dilaporkan yang dilihat dari koefisien *earnings response coefficient* (ERC). Konvergensi IFRS di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2008 dan secara bertahap terus dilakukan adopsi pada standar akuntansi keuangan yang ada ke IFRS.

Persepsi investor (ERC) terhadap informasi laba menurun disebabkan karena laba yang dilaporkan mengandung akrual diskresioner tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak memberikan kepercayaan pada laba tinggi setelah mengetahui adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen sebagai akibat perilaku oportunistik.

Persepsi investor (ERC) meningkat setelah konvergensi IFRS. Meningkatnya persepsi investor karena konvergensi IFRS diyakini dapat mengurangi praktek manajemen laba akrual perusahaan. Dengan berkurangnya manajemen laba akrual, investor dapat memperoleh informasi yang lebih berkualitas sehingga keputusan investasi yang dibuat akan lebih tepat.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada pemilihan sampel yang digunakan yaitu pada perusahaan manufaktur. Sedangkan industri manufaktur penggunaan *fair value* bersifat lebih insidental (Kip, 2009). Namun, penelitian ini menggunakan jenis industri manufaktur saja dan ada kemungkinan data penelitian ini terdapat *sample selection bias*.

Selain itu, penelitian ini tidak melakukan *robustness test* untuk menguji hasil uji empiris dengan membandingkannya dengan uji lain.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan keuangan, asuransi dan *real estate* yang merupakan jenis industri paling dipengaruhi oleh IFRS (*fair value accounting*) karena harus menilai sebagian besar aset dan kewajibannya menggunakan nilai wajar. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat pengaruh konvergensi IFRS terhadap praktek DACC negatif yang menurunkan laba maupun DACC positif yang menaikkan laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adika, Asri Widyawati dan Anggraita, Viska. 2013. Pengaruh Konvergensi IFRS Efektif Tahun 2011, Kompleksitas Akuntansi, dan Probabilitas Kebankrutan Perusahaan Terhadap Timelines dan Manajemen Laba. *Paper* pada Simposium Nasional Akuntansi di Manado.
- Ahmed, Anwer, Neel, Michael, & Wang, Dechun. 2013. Does Mandatory Adoption of IFRS Improve Accounting Quality? Preliminary Evidence. *Contemporary Accounting Research*, 30(4), 1344-1372.
- Armstrong, C., Guay, W.R., dan Weber, J. 2010. The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting. *Journal of Accounting and Economics*. 50. 179-234.
- Ball, R. J. and P. Brown. 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research* 6, 159-178.
- Ball, Ray. 2006. International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. *Accounting and Business Research*, 36, 5-27
- Barth M.E, Landman, W.R., Young, D., dan Zhuang, Z. 2014. Relevance of Differences between Net Income based on IFRS and Domestic Standards for European Firms. *Journal of Business Finance & Accounting*. [Vol 41, Issue 3-4](#), pages 297–327,
- Bowen, R. Burgstahler, D., dan Daley. 1987. The Incremental Content of Accrual Versus Cash Flow Data. *The accounting review*.62,723-747.
- Beaver, W.H. 1968. The information content of annual earnings announcement. *Journal of Accounting Research Supplement* to 6.67-92.
- Callen, J.L dan Segal, D. 2004. Do Accruals Drive Firm-Level Stock Returns? A Variance Decomposition Analysis. Article online: 29 APR 2004.
- Chua, Yi Lin (Elaine), et al. 2012. The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence from Australia. *Journal of International Accounting Research*, 11 (1): 119-146.
- Collins, D., E. Maydew, and I. Weiss. 1997. Changes in the Value-Relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Years. *Journal of Accounting and Economics*, 24, 39-67
- DeFond, M.L. and J. J. Jiambalvo. 1994. Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals. *Journal of Accounting and Economics* 17, 145-1476.

- DeFond, M. L. and C. W. Park. 2001. The Reversal of Abnormal Accruals and The Market Valuation of Earnings Surprises. *The Accounting Review* 76, 375-404.
- Frank, M.M., Linch, L.J., dan Rego, S.O. 2009. Tax Aggresiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*. vol. 84, no.2. 567-496.
- Gebhardt, G., dan Farkas, Z.N. 2011. Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks [*Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 38, Issue 3-4, pp. 289-333, 2011*](#)
- Healy, Paul M, & Wahlen, James M. 1999. A review of the Earnings Management Literature and ts implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383.
- Holler, Annette. (2008). Have Earnings Lost Value-Relevance? Revisiting Latest Evidence on EVA. *The Business Review, Cambridge*, 10(2), 245-254.
- Houqe, Muhammad Nurul, Easton, Samuel, & Zijl, Tony van. (2014). Does mandatory IFRS Adoption Improve Information Quality in Low Investor Protection Countries? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 23(2)*, Pages 87–97
- Jones, J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research* 29, 193-228.
- Kip, Andre. 2009. *The effect of Fair Value on the Earnings Response Coefficient*. Master thesis. University of Amsterdam.
- Kormendi dan Lippe. 1987. The Relation Between Stock Return and Accounting Earning Given Alternative Information. *The Accounting Review* 65.
- La Porta, R., Lopez-de Silanes, F., Shhleifer A., Vishny, R. 1997. Legal Determinant of External Finance. *The Journal of Finance*. 52. 1131-1150.
- Latif, Dwianto Muhktar. 2012. Pengujian Kualitas Informasi dan Asimetri Informasi Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS di Uni Eropa. *Thesis*. Magister Sains dan Doktor Ilmu-ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Levitt, Arthur. 1998. "The Numbers Game". *Unpublished Remarks*
- Paglietti P. 2009. The Value Relevance of Accounting Information in Italy Following IFRS Adoption, *IR Top, VI, n. 4, October/December*.
- Pelucio-Grecco, Marta Cristina, Geron, Cecília Moraes Santostaso, Grecco, Gerson Begas, & Lima, João Paulo Cavalcante. 2014. The Effect of IFRS on Earnings Management in Brazilian non-financial Public Ccompanies. *Emerging Markets Review*, 21, 42-66.
- Purwanti, Ari. 2011. Pengaruh Insentif Ekspropriasi terhadap Pengelolaan Laba dengan Mempertimbangkan Transaksi Hubungan Istimewa, Keberadaan Pengendali dalam Manajemen, Efektifitas Dewan Komisaris dan Dewan Audit, Serta Pemegang Saham Terbesar Kedua. Disertasi PIA FE-Universitas Indonesia.
- Rendleman, R.J. Jr., Jones, C.P., Latané, H.A. 1982. Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and The Importance of Risk Adjustments. *Journal of Financial Economics* 10, 269-287.

- Ramakrishnan, Ram, T.S dan Thomas, JK. 1991. Valuation of Permanent, Transitory, and Price-Irrelevant Component of Reported Earnings.
- Schipper, Katherine. 1989. Commentary on Earnings Management. *Accounting Horizons*
- Subramanyam, K. R. 1996. The pricing of discretionary accruals. *Journal of Accounting and Economics* 22, 249-281.
- Scot, William. R. 2010. *Financial Accounting Theory*, Second Edition, Canada: Prentice Hall.
- Sloan, R. G. 1996. Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review* 71, 289-316
- Wilson, G. P. 1986. The Relative Information Content of Accruals and Cash Flows: Combined Evidence at The Earnings Announcement and Annual Report Release Date. *Journal of Accounting Research* 24, 165-200.
- Wilson, G. P. 1987. The Incremental Information Content of Accrual and Funds Components of Earnings After Controlling for Earnings. *The Accounting Review* 62, 293-322.
- Whelan, Catherine, & McNamara, Ray. 2004. The Impact of Earnings Management on the Value-relevance of Financial Statement Information. *SSRN working paper*.
- Watts, R., & Zimmerman, J. 1990. Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective. *Accounting Review*, 65(1), 131.
- Xie, H. 2001. The Mispricing of Abnormal Accruals. *The Accounting Review* 76, 357-373.

Lampiran 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.211742	Prob. F(2,658)	0.1103
Obs*R-squared	4.467400	Prob. Chi-Square(2)	0.1071

Lampiran 2

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	21.38728	Prob. F(8,660)	0.0000
Obs*R-squared	137.7270	Prob. Chi-Square(8)	0.0000
Scaled explained SS	377.1913	Prob. Chi-Square(8)	0.0000

ANALISIS KINERJA NON FINANCIAL TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

Chara Pratami Tidespania Tubarad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: chara_tidespania@yahoo.com

ABSTRACT

Nowadays the performance of Civil Servants (PNS) related to service to the community has always been the spotlight. The low work discipline, awareness, and service shown by some of the Civil Servants has an impact on negative stereotypes provided by the community. Therefore there is a need for significant improvements so the performance of government employees can be as expected. Because undisciplined work behavior can result in a reduction in the performance of Civil Servants in general, especially in the Lampung Regional, coupled with negative opinions from the public because in the presentation of financial statements they cannot be accountable and timely. Non-financial performance affects work performance and job satisfaction affects work performance

Keywords: *Kinerja Non Financial, Prestasi Kerja, Kepuasan Kerja*

A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kepuasan berbagai pihak maka perusahaan perlu melakukan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam upaya memuaskan berbagai pihak dan tetap selaras dengan strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pengukuran kinerja finansial dan kinerja non finansial yang bisa mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan berbagai pihak telah terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan Maisel (1996) menunjukkan bahwa perusahaan lebih menitikberatkan pada penekanan pengukuran finansial dibanding dengan *businnes performance* dan *organizational Effectiveness*. Ukuran finansial yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah *sales growth and profitability, product cost and margin, EPS, ROA, dan ROI*. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan ternyata menganggap ukuran finansial lebih penting atau lebih ditekankan. Pengukuran finansial pada dasarnya lebih objektif walaupun kurang diperhitungkan didalan pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan kinerja pada organisasi, dibutuhkan sistem pengukuran kinerja yang nantinya akan berfungsi sebagai pemberi informasi dimana dapat menjadi acuan para manajer dalam mengambil suatu keputusan yang tepat demi kemajuan perusahaan umumnya,

pengukuran kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari segi keuangan dan dari segi non-keuangan. Kinerja non keuangan tidak kalah penting karena dapat digunakan sebagai alat pelengkap informasi untuk mengukur kinerja karyawan yang dibutuhkan para manajer. Sistem pengukuran kinerja dapat memberikan kejelasan tugas dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada karyawan mengenai kinerja, dampak suatu tindakan, dan hubungan antar bagian yang berbeda dalam operasional perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat memberikan informasi yang jelas kepada karyawan mengenai apa yang menjadi tanggung jawab kerjanya. Dalam pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan mempunyai dampak terhadap kepuasan kerja yang dapat mendorong prestasi kerja karyawan. Dengan kepuasan kerja yang diperoleh, diharapkan kinerja yang tinggi dapat dicapai para pegawai. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak hanya kemampuan pegawai saja yang diperlukan dalam bekerja tetapi juga tingkat kepuasan dalam bekerja sangat mempengaruhi pegawai untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Selama ini kinerja dari pegawai pemerintahan (PNS) terkait pelayanan kepada masyarakat selalu menjadi sorotan. Rendahnya kedisiplinan kerja, kesadaran, serta pelayanan yang ditunjukkan oleh sebagian kalangan pegawai pemerintahan tersebut berdampak pada stereotip negatif yang diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya pembenahan-pembenahan signifikan agar kinerja pegawai pemerintahan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat termasuk juga di dalamnya menyajikan laporan keuangan instansi yang akuntabel dan tepat waktu. Pada PMK Nomor 177/PMK.05 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga kinerja pegawai khususnya bendahara dan staf keuangan dituntut harus disiplin dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan tersebut, karena Perilaku bekerja yang tidak disiplin dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja Pegawai Negeri Sipil secara umumnya, ditambah dengan pendapat negatif dari masyarakat karena dalam penyajian laporan keuangannya tidak dapat akuntabel dan tepat waktu. Peningkatan kedisiplinan pegawai harus terus ditingkatkan demi birokrasi pemerintahan yang lebih baik dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2006: 25).

Dari definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Yuwono, 2004:23).

Kepuasan Kerja

Menurut As'ad (2008) bahwa kepuasan kerja yang sederhana dan operasional adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan. Ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini melihat kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Jadi determinasi kepuasan kerja menurut batasan ini meliputi perbedaan individu (*individual differences*) maupun situasi lingkungan pekerjaan. Di samping itu, perasaan orang terhadap pekerjaan tentulah sekaligus merupakan refleksi dari sikapnya terhadap pekerjaan.

Luthans (2005:243) menyebutkan ada 5 dimensi kepuasan kerja, yaitu:

- a. *The work itself*, karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.
- b. *Supervision*, supervisi yang adil, terbuka dan mau bekerjasama dengan bawahan akan mempengaruhi karyawan dalam bekerja.
- c. *Coworkers*, rekan kerja atau tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja, tim yang “kuat” menjadi sumber dukungan, kenyamanan, nasihat dan bantuan bagi karyawan.
- d. *Pay*, sistem pemberian upah yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu, dan standar pengupahan akan menciptakan kepuasan kerja.
- e. *Opportunity of promotion*, kesempatan promosi yang adil dan didasarkan pada kinerja dan senioritas (lama bekerja) akan meningkatkan kepuasan kerja

Telaah Penelitian Sebelumnya

Yuliansyah (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Non-Finansial Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian, Job Tension Sebagai Faktor Pemediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sistem pengukuran kinerja non-keuangan, *job tension*, terhadap kinerja anggota kepolisian. Penelitian dilakukan di institusi kepolisian di Provinsi Lampung dengan jumlah sampel sebanyak 160 responden dan dilakukan analisis data menggunakan program SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja non-keuangan akan menurunkan *job tension* dan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja individu. Hasil analisis perbandingan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja polisi, menemukan bahwa pengaruh langsung Sistem Pengukuran Kinerja Non Finansial terhadap Kinerja Karyawan lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui *job tension*.

Yuliansyah dan Razimi (2015) dengan judul *Non-financial performance measures and managerial performance: the mediation role of innovation in an Indonesian stock*

exchangelisted organization. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengukuran kinerja non-keuangan (NF) terhadap kinerja individual melalui inovasi dalam suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengukuran kinerja NF memiliki pengaruh positif terhadap kinerja individu dan variabel inovasi merupakan mediasi penuh (*fully mediated*) hubungan sistem pengukuran kinerja non finansial terhadap kinerja individu.

Ruhana (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja (Studi Pada Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Wilayah Malang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penilaian kinerja, kepuasan kerja dan prestasi kerja, mengetahui dan menganalisis pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja secara signifikan, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja secara signifikan, mengidentifikasi pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja secara signifikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 63 responden menggunakan teknik propotionale random sampling. Berdasarkan hasil analisis jalur, dapat diketahui bahwa variabel penilaian kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan kerja dengan nilai Beta 0.885 atau 88,5% sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Variabel kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi kerja dengan nilai Beta 0.479 atau 47,9% sedangkan sisanya adalah 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Variabel penilaian kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel prestasi kerja dengan nilai Beta 0.443 atau 44,3% sedangkan sisanya adalah 55.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini.

C. METODE PENELITIAN

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari sistem pengukuran kinerja variabel dependen adalah kinerja financial dan non financial pegawai dan variabel mediasi yaitu kepuasan kerja. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. (Riduwan, 2010) skala linkert memiliki 5 alternatif pilihan, yaitu: STS : Sangat Tidak Setuju, TS : Tidak Setuju, N : Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju. Nilai masing masing setiap jawaban diberi nilai berdasarkan skala linkert adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1
Tidak Setuju	(TS)	= 2
Netral	(N)	= 3
Setuju	(S)	= 4
Sangat Setuju	(SS)	= 5

Hubungan model kausalitas membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan hubungan tersebut, dengan demikian alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Structural Equation Modelling* (SEM). Model *multilevel* bisa diestimasi dengan menggunakan model persamaan structural (Ferdinand 2002). Hubungan model kausalitas penelitian ini merupakan hasil justifikasi secara teoritis dari berbagai sumber yang didukung oleh hasil kajian empiris, sehingga terbentuk sebuah model penelitian. Model penelitian ini menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas di antara variabel perlu diuji untuk mengkonfirmasi model melalui uji empiris. Untuk menguji sebuah teori, mungkin sebuah teori yang baru dikembangkan sendiri oleh peneliti, atau teori yang sudah dikembangkan sejak lama, pokoknya harus berupa sebuah teori, dan untuk pembuktiannya dibutuhkan sebuah pengujian empiris (Ferdinand 2002).

Pengujian terhadap model dikembangkan dengan berbagai kriteria Goodness of Fit, yakni Chi-square, Probability, RMSEA, GFI, dan TLI (Tabel 4).

Kriteria *Goodness of Fit*, yakni *Chi-square*, RMSEA, GFI, dan TLI

<i>GOODNESS OF FIT INDEX</i>	KETERANGAN	<i>CUT OFF VALUE</i>
X^2 - <i>Chi square</i>	Menguji apakah covariance populasi yang diestimasi sama dengan covariance sample (apakah model sesuai dengan data) (Haire et al., 1998)	Diharapkan kecil, lebih kecil dari nilai X^2 tabel
<i>Probability</i>	Uji signifikansi terhadap perbedaan matriks covariance data dan matriks covariance yang diestimasi (Hair et al., 1998)	$\geq 0,05$
RMSEA	Mengkompensasi kelemahan Chi-square pada sample besar (Hair et al., 1995)	$\leq 0,08$
GFI	Menghitung proporsi tertimbang varians dalam matriks sampel yang dijelaskan oleh matriks covariance populasi yang diestimasi (analog dengan R^2 dalam regresi berganda) (Bentler, 1983)	$\geq 0,90$
AGFI	GFI yang disesuaikan terhadap DF (Arbukle, 1999)	$\geq 0,90$
CMIN/DF	Kesesuaian antara data dengan model	$\leq 2,00$
TLI	Pembandingan model yang diuji terhadap baseline model (Hair, 1995, Arbukle, 1997)	$\geq 0,95$
CFI	Uji kelayakan model yang tidak sensitive terhadap besarnya sample dan kerumitan model (Arbukle, 1997)	$\geq 0,94$

Sumber :Ferdinan (2002)

Adapun model persamaan Strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$VP = \beta_1 SFN + e_1$$

$$KK = \beta_2 SFN + e_2$$

$$KJ = \beta_1 VP + \lambda_2 KK + e_3$$

Keterangan :

M = Value Perusahaan

SFN = Sistem pengukuran kinerja

KK = Kepuasan kerja

KJ = Kinerja pegawai

e = error

β = koefisien path variabel eksogen terhadap endogen

λ = koefisien path variabel endogen terhadap endogen

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah disusun diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan menggunakan SEM AMOS. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai C.R (*Critical Ratio*) dan nilai P (*Probability*) dengan batasan statistik yang disyaratkan yaitu nilai CR (*Critical Ratio*) di atas 1,96 dan nilai P (*Probability*) di bawah 0.05.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Pilot Test

Uji Validitas

Hasil perhitungan koefisien korelasi (r_{xy}) untuk pengukuran kinerja non finansial 9 item pertanyaan, kepuasan kerja sebanyak 20 item dan prestasi kerja 9 pertanyaan yang nilainya diatas r tabel (0,3) sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 0,6. Dengan demikian mengacu pendapat Nunnally dalam Ghozali (2005), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner penelitian ini dapat dinyatakan handal / reliabel. Artinya kuesioner ini memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan model atau desain yang berbeda.

Uji Kelayakan Indikator

Analisis *Structural Equation Model*

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Structural Equation Model*. Model analisis jalur ini digunakan analisis SEM (*Structural Equation Model*) yaitu sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah

rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Analisis dilakukan dengan program LISREL8.8. Analisis ini dipilih untuk mengetahui Pengaruh kinerja non finansial terhadap kinerja pegawai dengan motivasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.. Analisis ini sekaligus untuk membuktikan hipotesis penelitian ini yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Uji Kecocok Model (*Goodness of Fit*)

Nilai X^2 – Chi Square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara matrik kovarians sampel dengan matrik kovarians populasi yang diestimasi tidak dapat diterima. Artinya matrik kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah tidak sama, sehingga model dinyatakan tidak fit. *Goodness of Fit Indices* (GFI) merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model dalam menghasilkan *observed matriks kovarians*. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan GFI $> 0,90$. Hasil menunjukkan nilai GFI sebesar $0,73 < 0,9$, sehingga model memiliki fit yang marginal.

Adjusted Goodness of fit Index – AGFI sebagai pengembangan indeks GFI, merupakan indeks yang telah disesuaikan dengan rasio *degree of freedom* model yang diusulkan dengan dengan *degree of fredom* dari null model. Hasil penelitian menunjukkan nilai AGFI sebesar 0,66 yang nilainya mendekati dari nilai AGFI yang direkomendasikan $> 0,9$, sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki fit yang marginal (cukup baik).

The Root Mean Square Error of Approximation – RMSEA; mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model *matriks kovarians* populasinya. Nilai RMSEA menunjukkan *goodnes of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasikan $\leq 0,080$, sementara hasil pengujian sebesar 0,078 yang menunjukkan bahwa model adalah baik. *Ex Expected Cross Validation Index*) ECVI digunakan untuk menilai kecenderungan bahwa model, pada sampel tunggal, *cross validates* (dapat divalidasi silang) pada ukuran sampel dan populasi yang sama. Hasil ECVI model adalah sebesar 6,85 sedangkan ECVI Saturated Model adalah sebesar 8,12. Dengan demikian ECVI model lebih rendah daripada ECVI Saturated Model, sehingga dapat disimpulkan bahwa model baik untuk direplikasi untuk penelitian berikutnya.

Aikake's Information Criterion AIC digunakan untuk menilai mengenai masalah *parsimony* dalam penilaian model fit. Hasil AIC model adalah sebesar 684,64 sedangkan AIC Saturated sebesar 812,00. Dengan demikian AIC model lebih kecil dari AIC Saturated, sehingga model dapat dinyatakan fit. *Non-Normed Fit Index* (NNFI) digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat kompleksitas model. Hasil penelitian menemukan NNFI sebesar $0,92 > 0,9$ sehingga model dapat dinyatakan fit.

Comparative Fit Index – CFI , merupakan indeks kesesuaian *incremental* yang membandingkan model yang diuji dengan model null. Nilai yang direkomendasikan CFI $\geq 0,9$.

Hasil pengujian sebesar 0,93, menunjukkan bahwa model adalah baik. Dari hasil pengukuran *Goodness of Fit Index* di atas, dapat disimpulkan sebagian besar parameter telah memenuhi persyaratan yang diharapkan, dan hanya parameter saja yaitu Chi Square yang memiliki nilai probabilitas $< 0,05$, $GFI < 0,9$ dan $AGFI < 0,9$. Namun menurut Ghazali (2005: 42) menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah karena itu dicari ukuran model fit yang lain. Ditinjau dari nilai RMSEA, ECVI, AIC, NNFI dan CFI telah memenuhi persyaratan *goodness of fit*.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Pengukuran kinerja non finansial terhadap Prestasi Kerja

Sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif pertama bahwa “Terdapat pengaruh positif penilaian kinerja non finansial terhadap prestasi kerja” Hasil pengujian dengan analisis LISREL 8.8 dapat diketahui pengaruh langsung pengukuran kinerja non finansial terhadap motivasi kerja memiliki koefisien jalur sebesar 0,42 dan t_{hitung} sebesar $3,25 > 1,96$ sehingga hubungan tersebut signifikan. Koefisien path positif menunjukkan bahwa pengukuran kinerja non finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. Artinya semakin baik sistem pengukuran kinerja non finansial maka semakin tinggi pula prestasi kerja, sehingga hipotesis pertama didukung.

Pengaruh Pengukuran kepuasan kerja terhadap Prestasi kerja

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan “Terdapat pengaruh positif penilaian kepuasan kerja terhadap prestasi kerja”. Hasil pengujian dengan analisis LISREL 8.8 dapat diketahui pengaruh langsung pengukuran kinerja non finansial terhadap kepuasan memiliki koefisien jalur sebesar 0,32 dan t_{hitung} sebesar $3,39 > 1,96$ sehingga hubungan tersebut signifikan. Nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa pengukuran kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Artinya semakin meningkatnya kepuasan kerja maka semakin tinggi prestasi kerja pegawai dan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini didukung.

Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat Hasibuan (2003:88) bahwa alasan untuk melakukan penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerja mereka. Selain itu, hal ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria dalam Januarti dkk (2015), yaitu dengan adanya penerapan sistem penilaian kinerja yang efektif diharapkan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan maupun pengembangan karir karyawan. Penilaian Kinerja adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kepuasan kerja karyawan akan pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Alasan penilaian dilakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja para karyawan dengan

memberikan pengakuan terhadap hasil kerja mereka (Hasibuan, 2003). Penilaian kepuasan kerja karyawan akan dapat dipahami melalui sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan, semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Hasil penelitian mendukung penelitian Januarti dkk (2015) yang menemukan bahwa Kepuasan Kerja pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Wilayah Malang dipengaruhi oleh Penilaian Kinerja sebesar 88,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan pada penelitian ini.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengukuran kinerja non finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai negeri di Lampung. Artinya semakin baik sistem pengukuran kinerja non finansial maka semakin tinggi pula prestasi kerjanya.
2. Pengukuran kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Artinya semakin meningkat kepuasan kerja pegawai maka semakin tinggi prestasi kerja pegawai.

Saran

Berdasar kesimpulan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pegawai negeri sipil di Lampung. Peningkatan pengukuran kinerja non finansial terutama pada indikator yang dinilai paling rendah oleh pegawai yaitu mengenai hubungan pegawai dengan Layanan tuntutan pengadilan, (misalnya, Mengisi tarif, tingkat keyakinan, proses pengadilan). Hal ini perlu adanya standar pelayanan dan standar tarif yang ditetapkan, dan bersifat transparan, serta komunikasi yang selalu terjalin dengan baik antar bagian/departemen yang ada termasuk pada bagian layanan pengadilan dengan pegawai secara umum.

REFERENSI

- Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- As'ad, M, (2008). *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia: Psikologi Industri*. Edisi keempat Liberty. Yogyakarta
- Bernardin, H. John, dan Joyce E.A Russel. (2003). *Human resource management (An Experimental Approach International Edition)*. Mc. Graw-Hill Inc. Singapore
- Bowen, D.E. and Lawler, E.E., 1992,. The empowerment of service workers: what, why, how, and when, *Sloan Management Review*, 33 (3) : 31-39.

- Davis, Keith dan Newstrom, 2000, *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ciptani, Monika Kussetya. 2000. Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar. *Jurnal akuntansi dan keuangan, Vol.2 ,No.1*
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian. Manajemen*. Semarang:FE UNDIP
- Filippo, Edwin, B. 1994. *Manajemen Personalia*.Terjemahan oleh Moh.Masud.Edisi keenam. Erlangga, Jakarta
- Fraser T.M, 1993, *Human Stress, Work and Satisfaction*, Jakarta: Pustaka Binaman Persindo
- Ghozali, Imam. 2011. *Model Persamaan Struktural dan Aplikasi dengan Program. Amos 21*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hall, Matthew. 2008. The Effect of Comperhensif Performance Measurement System on Role Clarity, Psychological Empowerment and Managerial Performane. *Accounting, Organizations and Society 33 (2-3): 141-163*
- Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999).*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. Akuntansi & Manajemen*.Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga
- Januari Cindi Ismi, Hamidah Nayati Utami, Ika Ruhana (2015), Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja (Studi pada Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Wilayah Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 24 No. 2*
- Kaplan, R.S., and D.P. Norton., 1992. The Scorecard: Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review 70: 71-79*.
- Kaplan, Robert S. and David P. Norton, 2000.*Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, Erlangga : Jakarta
- Lau Chong M. And Brigitte Oger, 2012, An empirical study of the effects of nonfinancial performance measures on employee behaviours, UWA Business School The University of Western Australi
- Liliweri Alo. 1997. *Komunikasi Antarpribadi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Lawler, E. E., 1992. *The Ultimate Advantage: Creating the High Involvement Organization*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Lau, C.M., & Sholihin, M. 2005. Financial and Nonfinancial Performance Measures: How do They Affect Job Satisfaction? *The British Accounting Review, vol 37 (4): 401*
- L.Lynch Richard & F.Cross, 1993, *Performance Measurement System*, Handbook of Cost Management, Edisi Ketiga, New York

- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi, Edisi 10*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Martoyo Susilo, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Yogyakarta: BPFE
- Mawarni Sri, Yuliansyah (2015), Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Non-Finansial Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian, Job Tension Sebagai Faktor Pemediasi, *Jurnal SNA XVIII Medan*
- Riduwan, 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung
- Robbins Stephen P., 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Robbins, Stephen P, (2006). *Perilaku Organisasi Edisi Bahasa Indonesia*. Trj. Benyamin Molan. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia
- Siagian, Sondang.S., 1997, *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Penerbit, Bina Aksara.
- Sinulingga Monica Carolina, Yuliansyah, Oktavia Reni, 2013, Pengaruh Pengukuran Kinerja Non-Keuangan Terhadap Kinerja Karyawan: Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Sebagai Faktor Pemediasi (Studi Kasus di Kepolisian Kota Bandar Lampung), *e-journal Unila*
- Solimun. 2002, *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos*. Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Parsada: Jakarta
- Wiyono Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0 : Percetakan STIM YKPM*. Yogyakarta
- Yuliansyah, Mohd Shahril Ahmad Razimi 2015, Non-financial performance measures and managerial performance: the mediation role of innovation in an Indonesian stock exchange listed organization, *Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 4, 2015*
- Yuwono, dkk. 2004. *Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wong-On-Wing, B., Lan Guo, dan Gladie Lui, 2010. Intrinsic and Extrinsic Motivation and Participation in Budgeting: Antecedents and Consequences. *Behavioral Research in Accounting Volume 22*
- PP No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA *BARBERSHOP*

Niken Kusumawardani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: nicken_kusumawardani@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to; 1) Determine the effect of education level on the preparation of SAK ETAP financial statements; 2) Determine the influence of educational background on the preparation of SAK ETAP financial statements; 3) Determine the effect of business scale on the preparation of SAK ETAP financial statements; 4) Determine the effect of business experience on the preparation of SAK ETAP financial statements. The sample of this research is the Barbershop Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Tanjung Senang District. This sampling method uses random sampling. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the level of education, educational background, and business scale did not significantly influence the preparation of SAK ETAP financial statements. Only business experience has a significant effect on the preparation of SAK ETAP financial statements.

Keywords: *Level of education, Educational background, Business scale, Business experience, and Entity Financial Accounting Standards without Public Accountability (SAK ETAP).*

A. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian koperasi dan UMKM pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 57.900.000 unit dan diperkirakan akan terus meningkat. Ditambah lagi kelompok usaha ini juga memiliki keunggulan yang sudah terbukti, mulai dari kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja, ketahanan terhadap guncangan krisis ekonomi, dan berperan penting dalam perekonomian ASEAN, terbukti adanya beberapa UMKM Indonesia yang mampu menembus pasar dunia. Berdasarkan fenomena inilah UMKM terus menjamur di Indonesia.

Barbershop atau pangkas rambut merupakan salah satu jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak bermunculan di kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan iklim usaha yang kian kondusif dan juga pertumbuhan penduduk yang terjadi dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan penduduk kota Bandar Lampung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2015	979.287
2014	960.695
2013	942.039
2012	902.885
2011	891.374

(Sumber: <https://bandarlampungkota.bps.go.id> di update 10 Jan 2018)

Faktor lain yang menjadi alasan menjamurnya iklim usaha *barbershop* adalah kebutuhan masyarakat akan jasa pangkas rambut yang semakin meningkat, yaitu semakin banyak jenis usaha sejenis yang muncul sehingga meningkatkan persaingan antar usaha sejenis. Dalam usaha mempertahankan keberlangsungan usaha dibutuhkan kesiapan tersendiri dari pelaku usaha tersebut. Para pelaku usaha *barbershop* tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pelayanan namun juga mampu menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya menjalankan operasional efektif dan efisien, manajemen mampu memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Produk berupa laporan keuangan menjadi salah satu sarana yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Laporan keuangan memberikan informasi terkait sumber daya dan penggunaan dalam operasional usaha.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan pedoman standar keuangan yang bertujuan mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih implementatif. Laporan keuangan ditujukan bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, salah satunya memudahkan manajemen dalam memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam aktivitas operasi dan mengetahui pos-pos penerimaan dan pengeluaran secara terinci, sedangkan bagi pihak eksternal memudahkan para investor untuk memberikan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM. Sehubungan dengan diberlakukannya IFRS di Indonesia, maka entitas bisnis tanpa akuntabilitas publik, seperti UMKM dan koperasi, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada SAK ETAP, yaitu: (1) diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, (2) pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks, (3) perbedaan dengan PSAK No.27/1998 tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA), (4) Laporan Keuangan dengan ETAP, yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tergolong masih baru, oleh karena itu hal terpenting dari proses implementasi SAK ETAP adalah adanya pemahaman yang baik akan isi aturan SAK ETAP terlebih dahulu, sebelum nantinya akan digunakan dalam proses implementasi aturan tersebut dalam usahanya. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum menyajikan laporan keuangannya

berdasarkan SAK ETAP bahkan masih banyak yang belum mampu menyajikan sesuai dengan standar yang ada.

Solovida (2003) melakukan penelitian terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Jawa Tengah. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa masa memimpin perusahaan, pendidikan formal pemilik/manajer, pelatihan akuntansi yang diikuti pemilik/manajer, umur perusahaan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Tuti dan Dwijayanti (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel lama usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sedangkan latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, pemberian informasi dan sosialisasi, dan ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penelitian tersebut. Sebagian besar responden penelitian menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi/informasi mengenai SAK ETAP.

Kholis (2014) melakukan penelitian dengan metode studi kasus pada UKM Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan hanya variabel tingkat pendidikan dan pengalaman usaha, sedangkan variabel skala usaha dan masa jabatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan laporan informasi akuntansi.

Oktariatama (2015) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman bagian akuntansi koperasi atas standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik pada koperasi di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan jenjang pendidikan, pemberian informasi dan sosialisasi, dan masa tugas pekerjaan bagian akuntansi koperasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap pemahaman atas SAK ETAP, sedangkan variabel latar belakang pendidikan bagian akuntansi koperasi tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman atas SAK ETAP. Berdasarkan fenomena dan kajian penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Business Entity atau *Entity Concept* merupakan konsep dasar akuntansi yang menyatakan bahwa entitas akuntansi adalah organisasi yang terpisah dari kepentingan pemilik. Konsep ini menitikberatkan pada pemisahan transaksi bisnis perusahaan dengan transaksi bisnis pemilik. Operasional perusahaan terpisah dari kepentingan pribadi pemilik. Informasi akuntansi harus didasarkan pada data yang paling dapat diandalkan. Pedoman ini berdasarkan pada prinsip reliabilitas (*reliability principle*). Data yang andal adalah data yang dapat diverifikasi artinya memiliki bukti pendukung yang menguatkan kejadian tersebut. Prinsip biaya (*cost principle*) adalah aktiva atau jasa yang diperoleh harus didasarkan pada biaya aktualnya atau biaya perolehannya.

Menurut Ajzen (1991) *Theory Planned of Behavior (TPB)* ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*) karena manusia adalah makhluk rasional yang mampu menggunakan informasi-informasi secara sistematis untuk memikirkan implikasi dari tindakan mereka untuk berperilaku tertentu. Berdasarkan *Theory Planned of Behavior (TPB)*, sikap seseorang merupakan kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu sehingga memunculkan intense untuk berperilaku yang ditentukan oleh sikap. SAK ETAP dibuat dengan tujuan membantu proses penyelenggaraan akuntansi secara lebih mudah dan sederhana bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal ini diharapkan mampu mempengaruhi penggunaan SAK ETAP pada usaha *barbershop* dalam menyajikan laporan keuangan.

Theory Planned of Behavior (TPB) juga menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang mampu berfikir logis dan rasional, manusia cenderung menggunakan informasi yang diperolehnya secara sistematis untuk memikirkan implikasi tindakan dan pengambilan keputusan strategis. Penggunaan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga para pelaku usaha *barbershop* dapat merasakan dampak terhadap proses pengidentifikasian transaksi dan penyajiannya.

Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam SAK ETAP (2009) Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akubilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pengguna yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, yaitu: investor, lembaga pembiayaan, pemerintah, masyarakat dll.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih cepat diperkenankan. Komponen laporan keuangan yang disajikan menurut SAK ETAP tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. IAI (2009) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Republik Indonesia No.20 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yang disebut dengan usaha mikro adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000

Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000

Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Kemudahan daya tangkap seseorang dalam menerima suatu hal baru dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Seseorang dengan jenjang pendidikan tinggi akan terbiasa memahami hal baru dengan lebih mudah dan cepat dibanding orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Gray (2006) dan Van Hermet et al. (2011) menyatakan bahwa kemampuan seseorang dalam menyerap pengetahuan baru akan meningkat jika memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Solovida (2003) menyatakan kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah ini sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Andriani et al (2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal manajer dalam usaha UMKM, maka semakin memahami penggunaan informasi akuntansi. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman SAK ETAP. Pratiwi et al (2016) menyatakan bahwa pendidikan pemilik UMKM berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa penelitian maka hipotesis pertama dinyatakan:

H₁: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Theory Planned Of Behavior mengasumsikan bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu berfikir rasional menggunakan informasi yang diperolehnya untuk memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mengambil keputusan. Teori ini membantu menjelaskan pengaruh latar belakang pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha *barbershop* yang dijadikan sebagai sumber dasar pengetahuan dan informasi yang mampu

memudahkan dalam memahami isi aturan SAK ETAP. Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Aufar (2014) yang membuktikan latar belakang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Andriani, et al (2014) juga menyatakan bahwa latar belakang pendidikan merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh cukup besar dalam proses implementasi dan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM. Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa pengusaha UMKM yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi cenderung lebih lama dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Oleh karena itu, bagian akuntansi koperasi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi diyakini mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai SAK ETAP. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂ : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Setiyadi (2007) menyatakan skala usaha yang bisa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah: (a) tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu; (b) tingkat penjualan merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu; (c) total utang merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu; (d) total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Hasil penelitian Murniati (2002) menemukan adanya pengaruh yang positif signifikan antara skala usaha dan penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi. Demikian juga dengan penelitian Holmes dan Nicholls (1988) menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap tingkat penyediaan informasi akuntansi. Hal ini diperkuat juga dari hasil penelitian Mulyaga (2016) yang menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP. Berdasarkan kajian tersebut, maka hipotesis yang dibuat adalah:

H₃: Skala usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Salah satu fungsi dasar *Theory Planned of Behavior (TPB)* yaitu *perceived behavioral control* yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan persepsi seseorang untuk menentukan perilakunya. Kaitan dalam penelitian ini adalah pengalaman usaha yang diperoleh selama menjalankan usaha diharapkan mampu meningkatkan persepsi pemilik usaha barbershop terhadap isi aturan SAK ETAP dan mengimplementasikannya. Foster (2001) menyatakan lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, serta jenis pekerjaan dapat menunjukkan pengalaman kerja seseorang. Orang yang dikatakan berpengalaman mempraktekkan teori yang pernah didapat dari hasil proses belajar

atau berpendidikan sehingga diharapkan dapat berkontribusi ditempatnya bekerja. Penelitian Wijayanti (2015) juga menemukan bahwa masa tugas pekerjaan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Sigit (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pemahaman SAK ETAP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha *barbershop* dengan pengalaman usaha yang lama akan lebih memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

H₄: Pengalaman usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) metode kuantitatif merupakan sumber data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data primer yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu para pelaku usaha *barbershop* di wilayah Kota Bandar Lampung. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh tingkat pendidikan (X_1), latar belakang pendidikan (X_2), skala usaha (X_3), pengalaman usaha (X_4) terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP (Y). Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah pengusaha *barbershop* yang ada di Kecamatan Tanjung Senang.

Pada penelitian ini terdapat variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Menurut Sanusi (2016) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebas diwakilkan oleh tingkat pendidikan (X_1), latar belakang pendidikan (X_2), skala usaha (X_3), dan pengalaman usaha (X_4). Variabel dependen atau variabel terikat diwakilkan oleh penyusunan laporan keuangan SAK ETAP (Y). Seluruh variabel dalam penelitian ini akan diukur menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Kuesioner merupakan hasil telaah penelitian terdahulu dan analisis peneliti dalam mengukur tiap-tiap variabel yang digunakan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik regresi berganda. Sebelum dianalisis secara statistik data terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Menurut Nunally (1969) dalam Ghozali (2001), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$, sedangkan validitas dalam penelitian ini diukur dengan digunakan *coeficient corelation pearson* yaitu dengan

menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2001). Ini menggambarkan instrumen penelitian yang dipakai semua valid.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan program SPSS 22.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

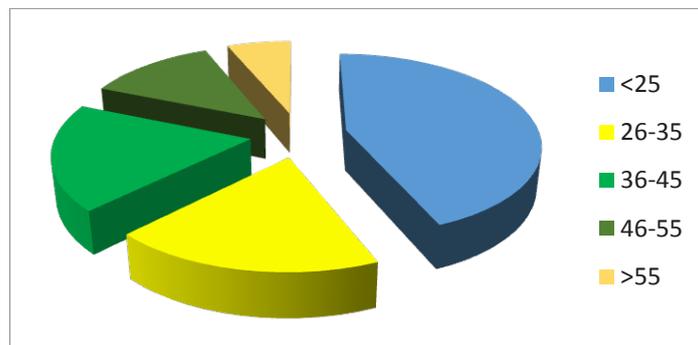
Keterangan :

- Y : Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP
- X₁ : Tingkat Pendidikan
- X₂ : Latar Belakang Pendidikan
- X₃ : Skala Usaha
- X₄ : Pengalaman Usaha
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- ε : Error

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

UMKM *barbershop* yang ada di kecamatan Tanjung Senang pada umumnya beranggotakan lima atau enam orang, yang memiliki tugas sebagai pemangkas rambut dan satu orang selaku kasir. Rata-rata pendapatan per tahun kurang dari Rp100.000.000. Responden penelitian seluruhnya laki-laki, mulai dari pemilik hingga karyawan usaha *barbershop*.

Gambar 1. Profil Responden Berdasarkan Umur

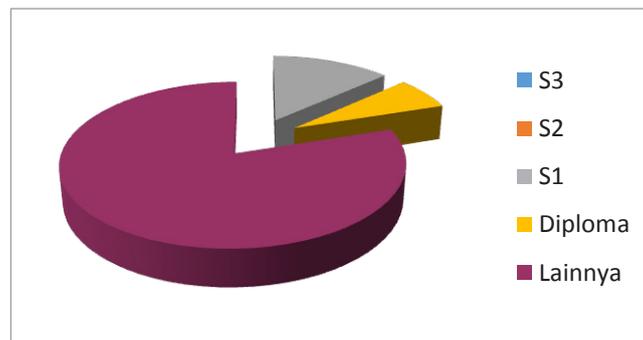


(Sumber: Data primer yang diolah, 2018)

Gambar 4.1.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki sebaran rentang umur sebagai berikut, kelompok umur dalam rentang < 25 tahun, yaitu sebanyak 7 orang atau 47% responden. Sedangkan kelompok umur dalam rentang 26-35 tahun, yaitu

sebanyak 3 orang atau 20% responden. Kelompok umur dalam rentang 36-45 tahun, yaitu sebanyak 3 orang atau 20% responden. Kelompok umur dalam rentang 46-55 tahun, yaitu sebanyak 2 orang atau 13% responden dan kelompok umur >55 tahun, yaitu sebanyak 1 orang atau 7% responden. Profil responden berdasarkan jenjang pendidikan ditunjukkan dalam gambar 4.1.2.

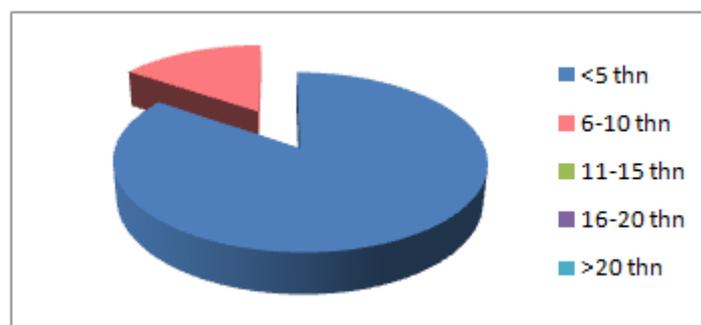
Gambar 2. Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan



(Sumber: Data primer yang diolah, 2017)

Gambar 4.1.2 menunjukkan bahwa responden penelitian yang memiliki jenjang pendidikan S1 sebanyak 2 orang atau 13% responden, sedangkan responden yang memiliki jenjang pendidikan Diploma sebanyak 1 orang atau 7% responden, dan sebanyak 80% responden atau berjumlah 12 orang adalah memiliki jenjang pendidikan SMA atau sederajat atau SMP. Untuk jenjang pendidikan S3 tidak ada responden yang memiliki jenjang pendidikan tersebut. Profil responden berdasarkan masa kerja ditunjukkan dalam gambar 4.1.3.

Gambar 3. Profil Responden Berdasarkan Pengalaman usaha



(Sumber: Data primer yang diolah, 2017)

Gambar 4.1.4 menunjukkan bahwa responden penelitian sebagian besar memiliki pengalaman kerja atau usaha dalam rentang waktu <5 tahun, yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 73%, kemudian responden yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 2 orang

atau sebesar 13%, sedangkan tidak ada responden yang memiliki masa kerja 11-15 tahun, 16-20 tahun dan > 20 tahun.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur tingkat validitas dari setiap pertanyaan digunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung masing-masing skor dari setiap butir pertanyaan dengan skor total nya (Ghozali, 2007). Hasil pengujian menggunakan program SPSS22 menunjukkan nilai *coefficient correlation pearson* pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel uji validitas. Dari hasil pengolahan data uji validitas variabel penelitian seluruh pertanyaan yang mewakili variabel penelitian memiliki nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan pada variabel konstruk penelitian adalah valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007). Pengujian dilakukan dengan metode pengukuran sekali saja, artinya pertanyaan hanya diberikan satu kali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Menurut Nunnally (1960) dalam Ghozali (2007) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha > 0, 60. Hasil pengujian menggunakan SPSS 22 menunjukkan nilai Cronbach Alpha variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Tingkat pendidikan (X1)	0,739	0,60	Reliabel
Latar belakang pendidikan (X2)	0,613	0,60	Reliabel
Skala usaha (X3)	0,716	0,60	Reliabel
Pengalaman usaha (X4)	0,660	0,60	Reliabel
Penyusunan laporan keuangan SAK ETAP (Y)	0,756	0,60	Reliabel

(Sumber: Data primer yang diolah, 2018)

Berdasarkan tabel hasil reliabilitas variabel penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha variabel penelitian masing-masing lebih besar dari 0, 60 yang artinya bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau kuesioner tersebut reliabel. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas maka dilakukan uji asumsi

klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu dalam pengujian hipotesis yang menggunakan alat uji regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji yaitu, apakah variabel tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, skala usaha dan pengalaman usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regressions*) yaitu dengan melihat tingkat signifikansi dari masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat diketahui bahwa hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hasil uji hipotesis SPSS 22 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda
Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP**

Model	Variabel	Standardized Coeficient	t	Sig
		Beta		
	Tingkat pendidikan (X1)	0,127	0,568	0,576
	Latar belakang pendidikan (X2)	1,183	0,817	0,423
	Skala usaha (X3)	0,106	1,328	0,19
	Pengalaman usaha (X4)	0,125	0,037	0,046
	F : 4,920	Sig : 0,463		
	R : 0,704			
	R square : 0,496			
	Adj. R. square : 0,395			

(Sumber: Data primer yang diolah, 2018)

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai *Adjusted R2* pada variabel dependen penyusunan laporan keuangan SAK ETAP adalah 0.395, hal ini berarti bahwa 39,5% variasi penyusunan laporan keuangan SAK ETAP dapat dijelaskan dari empat variabel independen yaitu tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, skala usaha dan pengalaman usaha. Sedangkan sisanya yaitu 60,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Hasil uji ANOVA atau uji F menunjukkan angka 4,920 dengan *p-value* 0,463. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan memprediksi variabel dependennya. Pengujian terhadap keempat hipotesis dapat dilihat dari nilai koefisien β dan *p-value* (signifikan t) dari tiap-tiap variabel independen. Apabila nilai positif maka terdapat hubungan positif, demikian juga sebaliknya. Apabila *p-value* lebih kecil dari tingkat *alpha* yang digunakan, maka hipotesis alternatif berhasil didukung. Tingkat keyakinan (*confidence interval*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% ($\alpha = 5\%$), yang berarti mentoleransi tingkat penyimpangan

maksimum 5%. Untuk pengujian tersebut menggunakan program software SPSS22.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Pada tabel 4.4.1 menunjukkan ekspektasi kinerja ekspektasi kinerja mempunyai nilai $\rho = 0,576$ dengan koefisien regresi sebesar 0,127, sehingga hipotesis 1 ditolak, karena nilai ρ menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Hasil pengujian hipotesis 1 ini menggambarkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM Barbershop tidak mendorong terjadinya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini membawa konsekuensi bagi para pelaku UMKM Barbershop, untuk lebih memiliki kesadaran diri dalam penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, sehingga pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan relevan. Pengujian hipotesis 1 memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuti (2014) yang mendapatkan hasil bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini disebabkan, jenjang pendidikan seseorang juga mempengaruhi skill dan pengetahuan seseorang. Para pelaku UMKM Barbershop kebanyakan hanya menempuh pendidikan SMA/SMK dan tidak berlatar belakang ekonomi akuntansi dan manajemen.

Hipotesis 2 menyatakan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Dalam tabel 4.4.1 menunjukkan latar belakang pendidikan mempunyai nilai $\rho = 0,423$ dengan koefisien regresi sebesar 0,817, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa pengusaha UMKM yang berlatarbelakang pendidikan non akuntansi cenderung lebih lama dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Oleh karena itu, bagian akuntansi koperasi yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi diyakini mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai SAK ETAP. Dalam UMKM Barbershop banyak didominasi oleh para pelaku usaha diluar latar belakang pendidikan non akuntansi bahkan ada yang sudah pensiunan, sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP sangat sulit untuk dilakukan.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Dalam tabel 4.4.1 menunjukkan skala usaha mempunyai nilai $\rho = 0,19$ dengan koefisien regresi sebesar 0,106, sehingga hipotesis 3 ditolak. Nilai koefisien bertanda positif dan signifikansi $>0,05$ menunjukkan bahwa skala usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP pada UMKM Barbershop.

Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Prawesti (2017) skala usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di Kabupaten Sleman.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa pengalaman usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Dalam tabel 4.4.1 menunjukkan pengalaman usaha mempunyai nilai $\rho = 0,046$ dengan koefisien regresi sebesar 0,125, sehingga hipotesis 4 diterima, artinya bahwa variabel ini secara signifikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Hasil pengujian hipotesis 4 ini memberikan gambaran bahwa pengalaman usaha UMKM Barbershop mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap penyusunan laporan keuangan, pengalaman usaha yang relatif masih sedikit kurang dari lima tahun menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP pada UMKM Barbershop. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Wijayanti (105) yang menyatakan bahwa masa tugas pekerjaan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Sigit (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pemahaman SAK ETAP. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Susanto dan Yuliani (2012) serta penelitian Zahri 2014 bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait laporan keuangan.

Dari hasil pengolahan data, output SPSS22 yang dihasilkan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,127 X_1 + 1,183 X_2 + 0,106 X_3 + 0,125X_4 + e$$

Adapun hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Kesimpulan
H1	Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan SAK ETAP	Hipotesis Ditolak
H2	Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan SAK ETAP	Hipotesis Ditolak
H3	Skala usaha berpengaruh terhadap penyusunan SAK ETAP	Hipotesis Ditolak
H4	Pengalaman usaha berpengaruh terhadap penyusunan SAK ETAP	Hipotesis Diterima

(Sumber: Hasil Penelitian, 2018)

Dari tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, namun dari hasil pengujian dinyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Tingkat pendidikan yang mayoritas bukan lulusan S1 dan Diploma membuat tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan SAK ETAP pada UMKM Barbershop. Latar belakang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, dari hasil pengujian dinyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh jenjang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Mayoritas latar belakang pendidikan pelaku UMKM Barbershop bukan dari akuntansi sehingga kemampuan memahami dan menyajikan laporan keuangan masih jauh memadai. Transaksi operasional masih digabungkan dengan pengeluaran pribadi pemilik. Skala usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan

laporan keuangan SAK ETAP dan hasil pengujian menyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh skala usaha terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP. Kurangnya pemahaman dalam akuntansi menyebabkan skala usaha UMKM Barbershop tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, para pelaku usaha mayoritas hanya lulusan SMA dan bahkan SMP menjadi salah satu penyebabnya. Pengalaman usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP dan hasil pengujian menyatakan diterima, artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengalaman usaha dengan penyusunan laporan keuangan SAK ETAP pada UMKM Barbershop.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,576. Hasil ini menunjukkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tidak dipengaruhi dengan tingkat pendidikan.
2. Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,423. Hasil penelitian ini menunjukkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan.
3. Skala usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,19. Hasil ini menunjukkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tidak dipengaruhi dengan besarnya skala usaha.
4. Pengalaman usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SAK ETAP, dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu 0,046. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dipengaruhi oleh pengalaman usaha UMKM Barbershop.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran dalam penelitian ini:

1. Terkait metode teknik penelitian data sebaiknya tidak hanya menggunakan kuesioner, tetapi dapat melalui teknik wawancara atau observasi sehingga data yang diperoleh lebih kompleks.
2. Dalam penyusunan kuesioner lebih banyak menggunakan berbagai referensi sebagai pembanding.
3. Diperlukan adanya sosialisai terkait pembukuan sederhana, sehingga lebih mudah dipahami oleh para pelaku UMKM Barbershop yang bukan memiliki latar belakang akuntansi.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan peneliti pada teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih belum sempurna.
2. Keterbatasan waktu peneliti untuk mendapatkan data dari para pelaku UMKM Barbershop di Kota Bandarlampung khususnya Kecamatan Tanjung Senang.
3. Keterbatasan peneliti dalam menyebar kuesioner kepada pelaku UMKM Barbershop di Kecamatan Tanjung Senang, ada beberapa pelaku usaha tidak mau dimintai informasi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM *Barbershop* khususnya di Kecamatan Tanjung Senang dalam penyusunan laporan keuangan SAK ETAP sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi UMKM dalam meningkatkan Standar Akuntansi Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam suatu usaha dapat mempermudah pelaku usaha untuk terus memantau keadaan operasional usaha, arus keluar dan masuknya kas serta panduan untuk keberlangsungan usaha. Bagi pihak eksternal khususnya lembaga keuangan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan SAK ETAP dapat mempermudah dalam pengajuan kredit modal usaha bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Novi Sagita., Gede Adi Yuniarti, dan Ni Kadek Sinarwati. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Aktivitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3 No. 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Andriani, Lilya., Antawikrama Tungga Atmaja, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. "Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepretatif Pada Peggy Salon)". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Aufar, Arizali. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)". Bandung: Universitas Widyatama.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2014. *Teori Akuntansi International Financing Reporting System*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gray, C. 2006. "Absorptive Capacity, Knowledge Management and Innovation in Entrepreneurial Small Firms". *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, Volume 12 No. 6. Hal 345-360.
- Hastuti, Rina., Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu. 2017. "Pengaruh Jenjang Pendidikan dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus di Kampung Batik Laweyan)". *E-Journal Universitas Islam Batik Surakarta*, Volume 2 No. 02 2017: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Holmes, Scott dan Des Nicholls. 1988. "An Analysis of the Use of Accounting Information by Australian Small Business". *Journal of Small Business Management*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kholis, Irwan Nur. 2014. "Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, Pengalaman Usaha, dan Masa Jabatan Berpengaruh Terhadap Penerapan Laporan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada UKM Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)". Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Oktaritama, Edningsari Dewi. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Bagian Akuntansi Koperasi Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Purworejo)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prawesti, Ita. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*, Vol 7. Hal 17-31.
- Quaqli, Alberto and Paola Paolini. 2012. How is the IFRS for SME accepted in the European Context? An Analysis of the Homogeneity Among European Countries, Users and Prepares in the European Commission Questionnaire". *Elsevier Journal*.
- Rudiantoro, Rizki dan Sylvia Veronica Siregar. 2012. "Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 12 No. 1. Hal 1-21 Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seftianne. 2001. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 13 No. 1.
- Solovida, Grace Tiana. 2003. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah". *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Tuti, Rias dan S, Patricia F Dwijayanti. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP". The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014. Fakultas Bisnis

dan Pascasarjana UKWMS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> (10 Februari 2018).

Wijayanti, Annisa Fitri Dwi. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Atas Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/
KOTA SUMATERA SELATAN**

Putri Retno Aryani

Email: Putri.aryani21@yahoo.com

Kurnia Krisna Hari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: kkrisnahari@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed at determining the influence of economic growth, local revenue and general fund allocation toward appropriation of capital budget In Districts/City in South Sumatera Province. The samples used in this study were 11 districts/cities in South Sumatera Province in line with the source of Realization Report Budget (APBD) which was accessed from www.djpk.depkeu.go.id and Economic Growth which was obtained from the Central Statistics Agency of South Sumatera Province. The data used in this research was secondary data. The technique of analyzing the data was using multiple regression test.

Simultaneously, the results showed that Economic Growth, Local Revenue and General Fund Allocation had positive significant influence toward capital expenditures. While, partially, the results showed that Economic Growth had no positive significant influence toward Capital Expenditure, regional revenue had no positive significant influence toward Capital Expenditure, General Fund Allocation had positive significant toward Capital Expenditure.

Keywords: Economic Growth, PAD, DAU and Capital Expenditure.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun

karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Gambaran kebijakan pembangunan di suatu daerah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut Halim (2014: 107), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pertumbuhan ekonomi di daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. Menurut Halim (2014 : 102-104), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain dari PAD yang sah. Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

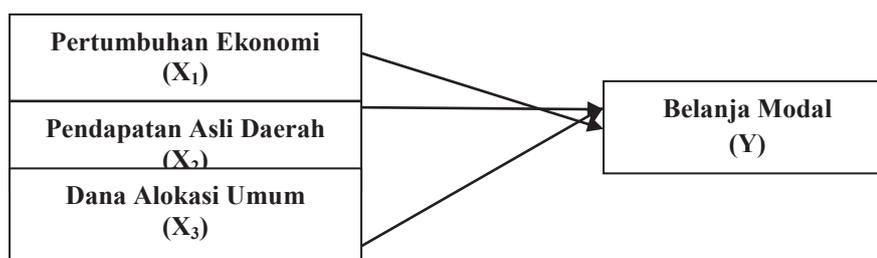
Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. DAU merupakan penyangga utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan sangat berkurang. Adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan Pemda bisa lebih mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat untuk membiayai belanja modal.

Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota dalam beberapa tahun berjalan proporsi DAU terhadap daerah masih sangat tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemda terhadap pasokan dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi PAD terhadap Anggaran.

Menurut penelitian yang dilakukan Mayasari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal serta penelitian yang dilakukan Sumarmi (2008) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal APBD.

Kerangka Hipotesis



Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu daerah tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya ekonomi investasi modal swasta maupun pemerintah. Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pada Pemerintahan daerah di Indonesia, Pendapatan cenderung mempengaruhi Belanja. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan di daerah yang menunggu kepastian DAU dulu baru menentukan alokasi belanja dalam APBD. Mayasari, dkk (2014) menyatakan bahwa yang mengatakan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁ = Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses *output* per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sehingga makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari landasan teori dan temuan empiris-empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H₂ = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang

berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Wertianti dan Dwirandra (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃ = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial.

Pada pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah antar pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu dana perimbangan adalah DAU yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Maslikah (2014) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Sukirno (2015: 423), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi

yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2015).

Menurut Siregar (2015: 31), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemda dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAU merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya

C. METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan diperoleh melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dan dibantu oleh program *Statistical Package For The Social Science (SPSS)*.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh gambaran nilai *mean* serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat diketahui bahwa nilai residual untuk data sebesar 0,691 yang berarti $> 0,05$ signifikansi residualnya berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik didapat bahwa nilai DW adalah 1.896 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +1 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan *output coefficients* nilai VIF masing-masing variabel pada kolom *output coefficients* untuk variabel X_1 sebesar 1,004 dan untuk variabel X_2 sebesar 2,447 dan variabel X_3 sebesar 2,447. Ketiga nilai variabel lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heterokedasitas

Berdasarkan hasil uji heterokedasitas didapat bahwa dari hasil Uji Glejser dilihat bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berada di atas 0,05 yang berarti model regresi tidak terdapat heterokedasitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil perhitungan analisis linier berganda melalui program SPSS, diperoleh persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 161779,475 - 5408,093X_1 + 0,001X_2 + 0,442X_3 + e$$

Dimana:

- 1) Konstanta sebesar 161779,475 menyatakan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), PAD dan DAU bernilai nol maka skor belanja modal sebesar 161779,475.
- 2) Koefisien regresi X_1 sebesar -5408,093 bernilai negatif menyatakan bahwa setiap pengurangan satu satuan skor Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1) akan mengurangi nilai belanja modal sebesar 5408,093 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.

- 3) Koefisien regresi X_2 sebesar 0,001 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor PAD (X_2) akan meningkatkan skor belanja modal sebesar 0,001 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.
- 4) Koefisien regresi X_3 sebesar 0,442 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor DAU (X_3) akan meningkatkan nilai belanja modal sebesar 0,442 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.

Uji Korelasi dan Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil perhitungan Uji Korelasi dan Determinasi (R^2) dengan melalui program SPSS dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar = 0,608 yang berarti bahwa hubungan atau tingkat asosiasi variabel bebas yaitu PDRB, PAD dan DAU dengan variabel terikat yaitu belanja modal adalah cukup.
- Angka *Adjusted R Square* (nilai koefisien determinasi (R^2)) sebesar 0,369 memberikan makna bahwa variabel PDRB, PAD dan DAU mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel belanja modal sebesar 36,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil Uji F dan Uji t

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317712245661.036	3	105904081887.01	5.657	.004 ^b
	Residual	542936739909.510	29	18721956548.604		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20, 2017

Dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 5,657 lebih besar dari F_{tabel} (2,934), hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,004 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak, H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.343	.190
	PDRB	-.351	.728
	PAD	.006	.995
	DAU	2.633	.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa *output* SPSS bahwa:

1) H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1) mempunyai hubungan negatif, hal ini berarti bila PDRB diturunkan, maka belanja modal juga turun. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 sebesar -0,351, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,045, maka $-t_{hitung} (-0,351) > t_{tabel} (-2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,728 ($0,728 > 0,05$), maka dapat disimpulkan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

2) H_0 ditolak dan H_a diterima.

PAD (X_2) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila PAD ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 sebesar 0,006, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,045, maka $t_{hitung} (0,006) < t_{tabel} (2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,995 ($0,995 > 0,05$), maka dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

3) H_0 ditolak dan H_a diterima.

DAU (X_3) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila DAU ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_3 sebesar 2,633, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,045, maka $t_{hitung} (2,633) > t_{tabel} (2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,013 ($0,013 < 0,05$), maka dapat disimpulkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pembahasan

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi saat ini pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya berfluktuatif pada setiap kabupaten/kota yang juga diikuti oleh belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena alokasi Belanja Modal suatu daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik, sedangkan perubahan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah disebabkan oleh perubahan PDRB melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber APBN untuk mendanai desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berdasarkan hasil uji statistik-F variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai signifikan 0,004. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, atau pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi dalam hal ini, faktanya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik-t mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai signifikan 0,728 ($\alpha = 0,05$). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan didominasi dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah kota Palembang. Pendapatan Asli Daerah terutama berasal dari pendapatan pajak daerah, lalu retribusi, lain-lain PAD serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah-nya dari sektor pendapatan pajak daerah sebab melihat kondisi Kota Palembang sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kota Palembang untuk menggali pajak daerahnya terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal yang sama untuk menggali kemampuan Pendapatan Asli Daerah-nya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam dan lain sebagainya.

Dari hasil analisis statistik-t terlihat bahwa Pendapatan Asli daerah sangat berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,995 ($\alpha = 0,05$). Demikian H_a yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Hal tersebut tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2013) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Melihat hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan pada kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan

infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kota Palembang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya Pemerintah Daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli daerah yang lebih besar.

Dari hasil analisis statistik-t terlihat bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,013 ($\alpha = 0,05$). Demikian H_a yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Artinya, pada saat terjadi peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Belanja Modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase yang cukup besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Jumlah ini mengindikasikan, bahwa Belanja Modal masih bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Transfer ini bermaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah jika terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU diperuntukkan untuk digunakan belanja Modal dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan.
- 2) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
- 3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
- 4) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.

Saran

- 1) Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lebih lengkap, dengan data APBD dan PDRB terbaru.
- 2) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto 2015*.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Yogyakarta: ANDI.
- Maslikah, Siti Haniatun. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
http://eprints.dinus.ac.id/17136/1/jurnal_15504.pdf. diakses 27 November 2017.
- Mayasari, Luh Putu Rani, dkk. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 2, No.1 Tahun 2014.
<http://download.portalgaruda.org>. diakses 28 November 2017.

- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarmi, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta*. <http://upy.ac.id/ekonomi>. Diakses tanggal 30 November 2017.
- Pardede dan dan Rehard Manurung. 2014. *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widianto, Andri, dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. <http://www.academia.edu/>. diakses tanggal 30 November 2017.

ANALISIS EFEK ANTESEDEN STRUKTUR MODAL PADA NILAI PERUSAHAAN

Ruli Indriani

Alumni FEB Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung

ruliindriani98@gmail.com

Ratna Septiyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

rseptiyanti@yahoo.com

Ninuk Dewi Kusumaningrum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

ninukdewi@gmail.com

Usep Syaipudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

usepsyaipudin@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to examine the antecedent variables of capital structure, such as profitability, firm size, investment opportunity set, managerial ownership, and dividend policy, and its effect on the firm value. We used 41 listed firms of the Indonesia Stock Exchange from manufacturing industry in 2012-2017 period. We used factor analysis to determine the representativeness of independent variables as the capital structure variables then we tested its effect on firm value by using multiple linear regression. The results indicate that profitability, firm size, investment opportunity set, managerial ownership, and dividend policy simultaneously have a statistically significance influence on capital structure. Partially, profitability has a statistically significance negative effect on capital structure, investment opportunity set has a statistically significance positive effect on capital structure, and managerial ownership has a statistically significance negative effect on capital structure, while firm size and dividend policy have no statistically effect on capital structure. This research give an empirical evidence that capital structure have a statistically significance positive effect on firm value. This result have an implication that the antecedent effect of capital structure is positive and statistically significance on firm value.

Keywords: *Antecedent Effect, Capital Structure, Firm Value, Factor Analysis.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut guna mempertahankan usaha yang dijalankannya. Terlebih lagi, dengan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perusahaan tentu akan menghadapi tantangan yang semakin ketat. Perusahaan perlu mengelola usahanya sedemikian rupa agar mencapai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya. Pada dasarnya tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perusahaan harus dapat dikelola dengan baik dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak pada kemakmuran para pemegang saham. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan perlu mendapat perhatian lebih agar tercapainya nilai perusahaan yang maksimal. Pengelolaan perusahaan dapat berasal dari berbagai aspek, misalnya berkaitan dengan modal yang tidak lepas dari keputusan pendanaan.

Dalam kegiatan pendanaan, ada dua sumber modal, yaitu *internal financing* dan *external financing*. *Internal financing*, dimana perusahaan mendapatkan dana melalui laba ditahan, sementara *external financing* diambil dari *debt* dan atau *equity* (Brigham dan Houston, 2006). Salah satu sumber modal perusahaan berasal dari *external financing*, biasanya berasal dari pinjaman dari luar perusahaan atau disebut dengan hutang. Hutang perusahaan seringkali dibandingkan dengan ekuitas yang dikenal dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu rasio untuk mengetahui struktur modal perusahaan (Linda, *et al.* 2017). Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan dan modal biaya rata-rata, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Linda, *et al.* 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2008) mengenai tingkat hutang pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI selama satu dekade, pada tahun 1993-2003 menunjukkan bahwa komposisi struktur modal masih lebih banyak didominasi oleh hutang dengan tingkat *leverage* di atas 60%. Artinya, perusahaan publik di Indonesia masih bergantung pada hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan mereka. Penentuan struktur modal tentu perlu diamati secara cermat karena akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penentuan struktur modal yang tidak optimal akan menimbulkan biaya tetap yang tinggi sehingga dapat berpengaruh buruk bagi perusahaan.

Rasio DER yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula risiko perusahaan karena pendanaan perusahaan dari hutang semakin tinggi yang mengakibatkan laba operasi yang diperoleh perusahaan turun akibat membayar beban bunga tetap. Selain itu, menyebabkan semakin banyak aliran kas yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan rasio DER, salah satunya adalah *Pecking Order Theory* yang menyatakan bahwa urutan penggunaan dana perusahaan, jika menggunakan dana dari pihak luar perusahaan maka manajer akan lebih dahulu menggunakan hutang.

Manajer lebih menyukai penggunaan hutang untuk pendanaan dari pihak luar perusahaan dari pada penerbitan saham baru, dengan pertimbangan biaya emisi hutang jangka panjang yang lebih murah daripada penerbitan saham (Weston dan Copeland, 1997).

Keputusan pendanaan atau penentuan struktur modal tentu dipengaruhi berbagai faktor. Faktor pertama adalah profitabilitas. Menurut Marfuah dan Nurlaela (2017) profitabilitas yang tinggi maka struktur modalnya juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh semakin tinggi, maka memungkinkan untuk penawaran hutang yang semakin tinggi, dikarenakan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan semakin besar. Selain itu, terdapat ukuran perusahaan yang mempengaruhi besarnya struktur modal perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar, artinya semakin besar pula pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dari perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula kemungkinan peningkatan pinjaman sebagai sumber pendanaannya. Sheikh dan Qureshi (2017) juga menyatakan ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan struktur modal.

Struktur modal juga dapat dipengaruhi oleh *investment opportunity set*. Linda, *et al.* (2017) menjelaskan bahwa *investment opportunity set* berkaitan dengan tersedianya aset riil, dan memiliki peluang dan kesempatan untuk investasi di masa depan, sehingga terjadi kombinasi diantara kedua hal tersebut. Kondisi ini menghasilkan set kesempatan investasi.

Kepemilikan manajerial adalah faktor lain yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka penggunaan hutang akan semakin menurun (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, kebijakan dividen juga mempengaruhi struktur modal dimana dengan adanya kebijakan dividen yang tinggi mengakibatkan laba ditahan sebagai sumber pendanaan menurun sehingga dapat memicu kenaikan penggunaan hutang. Suryani dan Khafid (2015) menyatakan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi struktur modal atau keputusan pendanaan perusahaan telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai peneliti. Namun, masih banyak hasil penelitian yang belum konklusi dikarenakan perbedaan waktu, tempat, populasi, jumlah sampel penelitian, dan lain-lain. Penelitian Marfuah dan Nurlaela (2017) menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tangiduk, *et al.* (2017) yang meneliti tema serupa menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Begitu pula dengan profitabilitas yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal.

Penelitian Ramli dan Papiyaya (2015) menemukan bahwa *investment opportunity set* berpengaruh positif terhadap struktur modal, berbanding terbalik dengan penelitian dari Fitriyah dan Hidayat (2011) yang menyatakan bahwa IOS berpengaruh negatif terhadap

DER. Menurut Wimelda dan Marlinah (2013) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan Mardiyati, dkk (2018) menyatakan tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. Sheisarvian, dkk (2015) menyatakan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan Suryani dan Khafid (2015) berpendapat ada hubungan positif antara kebijakan dividen dengan struktur modal.

Hasil yang berbeda pada pengujian tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan juga ditemukan. Penelitian Manoppo dan Arie (2016) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh tersebut diperkuat dengan penelitian dari Hasania, dkk (2016) yang menyatakan hal serupa. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Adanya *research gap* pada literatur terdahulu menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai struktur modal. Belum ada penelitian yang menguji pengaruh efek anteseden struktur modal secara komprehensif dalam kaitannya dengan nilai perusahaan. Penelitian ini menguji efek anteseden struktur modal terhadap nilai perusahaan. Pengujian efek anteseden struktur modal dilakukan dengan menggunakan metoda *factor analysis*, sehingga diperoleh suatu faktor yang komposisinya merupakan keterwakilan (*representative*) pengukuran efek anteseden atas variabel struktur modal dalam keterkaitannya dengan nilai perusahaan.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Modigliani and Miller (MM) Theory

Teori Modigliani and Miller merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958). Teori ini lebih dikenal dengan teori MM. Teori MM menyatakan bahwa nilai perusahaan dan *weighted average cost of capital* (WACC) tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Namun, asumsi pasar sempurna dari MM seperti tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, informasi simetris, tingkat bunga meminjam sama dengan tingkat bunga meminjamkan sebesar tingkat bunga bebas risiko adalah bertentangan dengan keadaan dalam dunia nyata (Rustam, 2015). Menurut Brigham dan Houston (2006) teori Modigliani dan Miller terbagi menjadi 2 kondisi, yaitu (1) tanpa pajak, diasumsikan bahwa jika tidak ada pajak perusahaan maka tidak terdapat pengaruh *financial leverage* terhadap nilai perusahaan. (2) dengan pajak perusahaan, dinyatakan bahwa nilai perusahaan yang memiliki hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak memiliki hutang.

Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan berkaitan dengan hubungan antara *principal* dan *agent* yang didalamnya terdapat kontrak kerjasama yang mengikat. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen

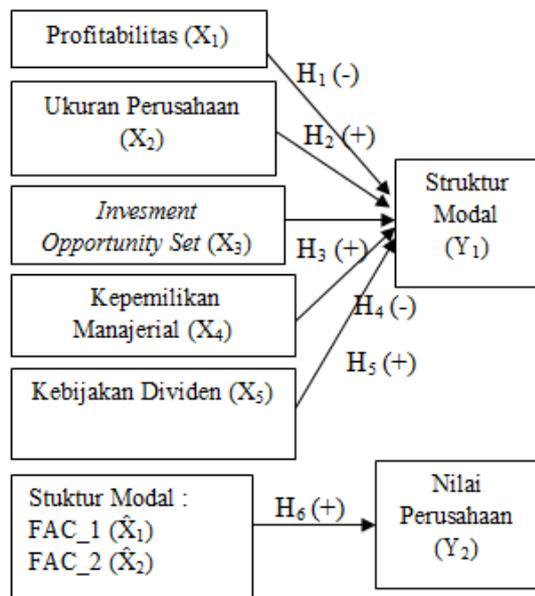
suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan tersebut terdapat perbedaan kepentingan keduanya sehingga memicu munculnya konflik (masalah keagenan). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa pemisahan atau perbedaan pengawasan dan struktur kepemilikan dapat meningkatkan biaya keagenan (*agency cost*). Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi biaya keagenan seperti meningkatkan kepemilikan dari dalam (*insider ownership*) atau kepemilikan manajerial, dan meningkatkan *dividen payout ratio*.

Pecking Order Theory

Pecking order theory dikemukakan oleh Myers dan Majluf pada tahun 1984 yang berkaitan dengan urutan keputusan pendanaan. Manajer akan lebih dahulu memilih menggunakan dana laba ditahan, lalu menggunakan hutang, dan menerbitkan saham sebagai pilihan terakhir. Menurut Weston dan Copeland (1997) Manajer lebih menyukai penggunaan hutang untuk pendanaan dari pihak luar perusahaan dari pada penerbitan saham baru, karena pertimbangan biaya emisi hutang jangka panjang yang lebih murah daripada penerbitan saham.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran berikut:



Menurut Hastalona (2013) mendefinisikan profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dalam suatu periode. Apabila profitabilitas atau laba perusahaan besar maka kemungkinan besar perusahaan akan dipandang oleh para investor atau kreditur memiliki prospek masa depan yang lebih bagus. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan mengurangi penggunaan hutang sebagai sumber pendanaannya.

Hal ini sesuai dengan *Pecking Order Theory* yang mengemukakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk berhutang (Angelya dan Arilyn, 2017). Hasil penelitian dari Masnoon dan Saeed (2014) dan Atiqoh (2016) variabel ini berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Artinya, semakin tinggi profitabilitas maka semakin kecil proporsi penggunaan hutang sebagai pendanaan atau struktur modal perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan seberapa besar kebijakan keputusan pendanaan (struktur modal). Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2010) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aktiva. Ukuran besar kecilnya perusahaan ini diukur melalui logaritma natural dari total aset (\ln total aset). Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan penjualan (Titman dan Wessels, 1988). Apabila perusahaan semakin besar maka semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan, baik itu dari kebijakan hutang atau modal sendiri (*equity*) dalam mempertahankan atau mengembangkan perusahaan. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Hal ini akan mempermudah perusahaan dengan ukuran besar untuk memperoleh pinjaman dari kreditur. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah mendapat pendanaan dari hutang karena memiliki nilai aset yang dijadikan jaminan lebih tinggi sehingga para pemberi pinjaman akan merasa lebih aman. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Sheikh dan Qureshi (2017) dan Marfuah dan Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin besar juga struktur modal pada perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Perusahaan yang memiliki kesempatan investasi atau pertumbuhan yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang lebih besar. Kebutuhan dana pada perusahaan akan semakin besar seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak hutang. Hal itu diperkuat oleh penelitian Ramli dan Papilaya (2015) serta Linda, *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa semakin besar IOS atau kesempatan investasi perusahaan, maka perusahaan cenderung menggunakan hutang lebih banyak dalam struktur modalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat diajukan adalah:

H₃: Investment opportunity set berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperkecil kemungkinan adanya konflik dalam perusahaan akibat *agent* dan *principal* adalah dengan cara memperbesar kepemilikan manajerial. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin kecil penggunaan hutang perusahaan. Pengaruh negatif tersebut diperkuat oleh penelitian dari Wimelda dan Marlinah (2013) serta Sheisarvian, dkk (2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang dapat diajukan adalah:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

Struktur modal dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen yang berkaitan dengan tinggi rendahnya laba ditahan suatu perusahaan. *Pecking order theory* menjelaskan bahwa urutan pertama pendanaan perusahaan berasal dari *internal financing* yaitu laba ditahan, kemudian disusul dengan *external financing* berupa hutang. Apabila laba ditahan dirasa cukup sebagai sumber pendanaan maka tidak diperlukan lagi *external financing*. Oleh karena itu, apabila kebijakan dividen menetapkan dividen yang dibagikan lebih besar maka laba ditahan perusahaan akan semakin kecil sehingga diperlukan lebih banyak *external financing* berupa hutang. Pengaruh positif antara kebijakan dividen dengan struktur modal diperkuat oleh penelitian dari Suryani dan Khafid (2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima yang dapat diajukan adalah:

H₅: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap struktur modal

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal dari luar perusahaan yang biasanya berupa hutang jangka panjang dengan modal sendiri (*shareholder's equity*) sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Perusahaan dengan prospek masa depan yang baik memerlukan pendanaan yang besar untuk membiayai operasional usahanya yang berkaitan dengan keinginan para pemegang saham untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi terwujudnya kemakmuran para pemegang saham. Oleh karena itu, struktur modal akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sesuai dengan teori MM yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan penggunaan hutang dengan asumsi adanya pajak karena biaya bunga hutang dapat dijadikan pengurang dalam pembayaran pajak. Linda, *et al* (2017) juga menyatakan bahwa dengan penggunaan struktur modal yang optimal akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian dari Manoppo dan Arie (2016) dan Hasania, dkk (2016) memperkuat bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam yang dapat diajukan adalah:

H₆: Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan, seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. Adapun daftar perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian ini seperti pada Lampiran 1

Tabel 1 Hasil *Purposive Sampling*

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017	157
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2012-2017	(31)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2012-2017	(61)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait variabel penelitian selama periode penelitian yaitu tahun 2012-2017	(24)
Total sampel perusahaan per tahun		41
Total sampel perusahaan tahun 2012-2017		246

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 2010). Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam hal ini rasio profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Kasmir, 2016). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi pula laba yang diperoleh dan menunjukkan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan asetnya. *Return on Assets* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan besarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kekuatan lebih dalam memperoleh pendanaan

eksternal dalam kemudahan masuk ke pasar modal, dikarenakan perusahaan besar memiliki nilai jaminan yang besar (Himawan dan Wibowo, 2016). Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural dari total aktiva. (Hartono, 2015). Merujuk pada penelitian Marfuah dan Nurlaela (2017) secara sistematis ukuran perusahaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset})$$

Investment Opportunity Set

Investment opportunity set (IOS) menurut Gaver dan Gaver (1993) yang dikutip oleh Hidayah (2015) bersifat tidak dapat diobservasi karena merupakan variabel tersembunyi (laten) sehingga untuk dapat mengetahui ukuran suatu IOS maka diperlukan proksi IOS. Secara umum proksi IOS diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu berdasarkan harga (*price-based proxies*), berdasarkan investasi (*investment-based proxies*), dan berdasarkan varian (*variance measures*). Hasil penelitian Adam dan Goyal (2008) menunjukkan bahwa rasio *book-to-market of assets* dan *equity* adalah salah satu proksi potensi pertumbuhan yang valid, selain itu mempunyai korelasi paling tinggi dengan pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan proksi MVE/BVE (*market to book value of equity*) yang termasuk dalam kategori proksi berdasarkan harga. Merujuk pada penelitian Linda, *et al.* (2017) MVE/BVE diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{MVE/BVE} = \frac{\text{Lembar saham yang beredar} \times \text{harga penutupan}}{\text{Total ekuitas}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki saham dalam perusahaan atau dengan kata lain bertindak sebagai pemegang saham juga. Merujuk pada penelitian Sheisarvian, *dkk* (2015) kepemilikan saham dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keputusan seberapa besar proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau tidak membagikannya dalam bentuk laba ditahan yang dapat digunakan sebagai pendanaan perusahaan. Menurut Sartono (2010) besar kecilnya dividen sangat tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh dan proporsi laba yang dibagikan dalam bentuk dividen atau *dividend payout ratio*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *dividend payout ratio* (DPR) untuk melihat kebijakan dividen. *Dividend payout ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$DPR = \frac{\text{Dividen per saham}}{\text{Laba bersih per saham}}$$

Adapun laba bersih per saham (EPS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$EPS = \frac{\text{Pendapatan setelah pajak}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Dalam hal ini struktur modal diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2016) DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nilai DER yang semakin kecil menandakan bahwa perusahaan memiliki jaminan terhadap penggunaan hutang yang lebih besar dan sebaliknya. Merujuk pada Brigham dan Houston (2006) DER dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2013). Nilai perusahaan dapat dianalisis melalui beberapa rasio seperti *Price Earning Ratio* (PER), *Price Book Value Ratio* (PBV), *Market Book Ratio* (MBR), *Dividen Yield Ratio*, serta Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan Tobin's Q dalam mengukur nilai perusahaan. Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). Alasan penulis menggunakan Tobin's Q karena adanya beberapa keunggulan dari pengukuran ini, seperti mencerminkan modal intelektual perusahaan, mencerminkan sentimen pasar dan lainnya (Smithers dan Wright, 2008). Rumus Tobin's Q menurut Smithers dan Wright (2008) yaitu:

$$TQ = \frac{EMV + D}{EBV + D}$$

Keterangan:

- TQ : Nilai perusahaan
- EMV : Nilai pasar ekuitas ($EMV = \text{Closing price} \times \text{Jumlah saham}$)
- D : Nilai buku dari total hutang
- EBV : Nilai buku dari total ekuitas

Penelitian ini menguji variabel-variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependennya sehingga menggunakan model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

Model 1 $DER = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$

Model 2 $TQ = \alpha_0 + \beta_1 \hat{X}_1 + \beta_2 \hat{X}_2 + \varepsilon$

Keterangan:

- DER : Debt to Equity Ratio
- TQ : Tobin's Q
- α_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
- X1 : Profitabilitas
- X2: Ukuran perusahaan
- X3 : Invesment opportunity set
- X4 : Kepemilikan manajerial
- X5 : Kebijakan dividen
- \hat{X}_1 : FAC_1
- \hat{X}_2 : FAC_2
- ε : Variabel pengganggu

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
ROA	246	0,00084	0,40377	0,0965802	0,08694593
SIZE	246	25,57957	33,32035	28,4033562	1,62335867
IOS	246	0,00193	82,44443	4,0037017	9,39654131
KM	246	0,00000	0,38027	0,0385705	0,07737219
DPR	246	0,00000	4,59277	0,3259337	0,46900009
DER	246	0,00057	5,15242	0,9001750	0,78529627
TQ	246	0,17797	23,28575	2,3844011	3,18685645

Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary ^b		
Model Regresi	R Square	Adjusted R Square
M1	0,260	0,245
M2	0,838	0,837

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 24

Pengujian hipotesis ini telah lolos uji asumsi klasik. Pada Tabel 3 untuk model regresi 1 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yaitu *Adjusted R Square* (Adj R²) memiliki

nilai 0,245 atau 24,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu struktur modal sebesar 24,5%, sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan, untuk model regresi 2 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi memiliki nilai 0,837 atau 83,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel struktur modal dalam menjelaskan variabel nilai perusahaan sebesar 83,7%, sedangkan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

2) Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a		
Model Regresi	F	Sig.
M1	16,864	0,000 ^b
M2	630,447	0,000 ^b

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 24

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa model regresi 1 memiliki nilai F sebesar 16,864 dengan signifikansi 0,000, serta model regresi 2 memiliki nilai F sebesar 630,447 dengan signifikansi 0,001 (signifikansi < 0,05). Nilai tersebut menunjukkan nilai signifikansi F < 0,05, artinya baik model regresi 1 maupun model regresi 2 bersifat fit dan layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

3) Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model Regresi		Unstandardized Coefficients	t	Sig.	Kesimpulan Hipotesis
		B			
M1	(Constant)	2,291	2,648	0,009	
	ROA	-5,027	-7,050	0,000	Terdukung
	SIZE	-0,036	-1,163	0,246	Tidak terdukung
	IOS	0,049	7,738	0,000	Terdukung
	KM	-2,056	-3,411	0,001	Terdukung
	DPR	-0,032	-0,311	0,756	Tidak terdukung
M2	(Constant)	2,384	29,074	0,000	
	FAC_1	2,879	35,031	0,000	Terdukung
	FAC_2	0,477	5,805	0,000	Terdukung

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 24

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal

Pada hasil penelitian ini diketahui adanya pengaruh negatif dan signifikan profitabilitas terhadap struktur modal, sehingga hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, **terdukung**.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)* yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA artinya semakin baik posisi perusahaan dalam penggunaan asetnya. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya pengaruh yang signifikan yang berarti profitabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan struktur modal. Perusahaan yang memiliki laba yang lebih besar akan memilih untuk menggunakan laba tersebut sebagai sumber pendanaan dan mengurangi sumber pendanaan dari *external financing*, seperti penggunaan hutang.

Hasil penelitian ini mendukung *Pecking Order Theory* yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk berhutang. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Masnoon dan Saeed (2014) dan Atiqoh (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Namun, tidak konsisten dengan hasil penelitian dari Tangiduk, *et al.* (2017) dan Maryanti (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diketahui tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal **tidak terdukung**.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aset, dimana ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural dari total aset (\ln total aset). Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan semakin besar pula kebutuhan pendanaan untuk mempertahankan atau mengembangkan perusahaannya.

Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Hal ini akan mempermudah perusahaan dengan ukuran besar untuk memperoleh pinjaman dari kreditur. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, artinya ukuran perusahaan bukan merupakan faktor penentu struktur modal. Ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin perusahaan untuk memilih menggunakan hutang yang lebih besar, karena dengan ukuran perusahaan yang lebih besar dapat memungkinkan untuk mendapatkan dana dari luar berupa transaksi saham dalam pasar modal

atau lebih memilih menggunakan profit perusahaan semaksimal mungkin yang tidak memiliki risiko seperti penggunaan hutang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tangiduk, *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun, tidak konsisten dengan penelitian Tamam dan Wibowo (2017) serta Darajati dan Hartomo (2015) yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap struktur modal.

Pengaruh *Investment Opportunity Set* terhadap Struktur Modal

Pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan *investment opportunity set* terhadap struktur modal, sehingga hipotesis ketiga yaitu *investment opportunity set* berpengaruh positif terhadap struktur modal, **terdukung**.

Investment opportunity set (IOS) merupakan suatu kombinasi antara aktiva riil dengan kesempatan di masa depan yang dapat menghasilkan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesempatan di masa depan yang baik akan memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa pengukuran IOS yang dapat digunakan salah satunya adalah berdasarkan harga yaitu menggunakan *market to book value of equity*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel *investment opportunity set* terhadap struktur modal, artinya variabel ini memiliki peran yang cukup penting dalam keputusan pendanaan atau struktur modal. Jika *investment opportunity set* mengalami peningkatan, maka perusahaan akan cenderung meningkatkan pula struktur modalnya berupa penggunaan hutang (*external financing*) untuk mencukupi kebutuhan peningkatan investasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ramli dan Papilaya (2015) dan Linda, *et al.* (2017) yang menyatakan semakin tinggi IOS maka perusahaan akan menggunakan hutang lebih banyak dalam struktur modalnya. Namun, tidak konsisten dengan hasil penelitian dari Fitriyah dan Hidayat (2011) yang menyatakan bahwa *investment opportunity set* berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Struktur Modal

Kepemilikan manajerial jika dilihat dari hasil penelitian ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal, **terdukung**.

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial menjadi salah satu faktor dalam penentuan struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia.

Konflik kepentingan antara agen dengan principal atau biasa disebut dengan masalah agensi dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan manajerial didalamnya, karena dalam pengelolaan perusahaan, manajemen memiliki peran yang sangat penting, di mana

manajemen lebih paham berkaitan informasi pengelolaan perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan hutang yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah struktur modal atau penggunaan hutang perusahaan. Hal itu menunjukkan tingginya intervensi pemilik saham yang sekaligus sebagai pihak manajemen dalam penentuan keputusan penggunaan hutang tersebut.

Pengaruh negatif yang ditunjukkan dari hasil uji t menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin besar pula peran manajerial untuk memperkecil penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian Sheisarvian, dkk (2015) dan Wimelda dan Marlinah (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Namun, tidak selaras dengan penelitian Sari, dkk (2013) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Struktur Modal

Hasil uji t sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan demikian, hipotesis kelima, yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap struktur modal, **tidak terdukung**.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh kebijakan dividen terhadap struktur modal, artinya semakin tinggi kebijakan dividen yang ditetapkan perusahaan tidak menjamin bahwa semakin rendah laba ditahan yang dimiliki perusahaan sehingga membutuhkan asupan dana dari luar, yaitu dari hutang. Namun, semakin tinggi kebijakan dividen atau semakin tingginya dividen yang dibagikan perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan memperoleh laba yang lebih besar (profitabilitas tinggi), sehingga dalam kondisi tersebut perusahaan memiliki kemampuan lebih untuk membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri, tanpa berpengaruh terhadap penggunaan hutang. Selain itu, dengan adanya kebijakan dividen yang tinggi memungkinkan para investor memberikan respon positif terhadap perusahaan sehingga jika perusahaan tetap menginginkan dana dari luar maka lebih mudah mendapatkannya dari transaksi saham di pasar modal dibandingkan harus menggunakan hutang.

Hipotesis kelima yang dinyatakan tidak terdukung, di mana tidak adanya pengaruh kebijakan dividen terhadap struktur modal selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wimelda dan Marlinah (2013) serta Sari, dkk (2013). Namun, tidak selaras dengan penelitian dari Larasati (2011) dan Sheisarvian, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji t sebelumnya menunjukkan variabel struktur modal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis keenam yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, **terdukung**.

Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi para pemegang, di mana nilai perusahaan yang tinggi dapat berdampak baik bagi kemakmuran pemegang saham. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan perlu diperhatikan oleh manajemen untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi penggunaan hutang maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh dengan baik dan memiliki peluang investasi yang besar di masa mendatang tentu memerlukan asupan dana yang besar pula, sehingga penggunaan hutang dari luar merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan. Penggunaan hutang yang lebih besar juga menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya di masa depan atau dapat menunjukkan bahwa terdapat risiko bisnis yang rendah, sehingga hal itu direspon positif oleh investor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Modigliani and Miller Theory* yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan penggunaan hutang dengan asumsi adanya pajak karena besarnya biaya bunga hutang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam pembayaran pajak. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hasania, dkk (2016) dan Manoppo dan Arie (2016) yang menyatakan hal yang sama, yaitu struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, tidak sejalan dengan Manihuruk, *et al.* (2016) dan Syardiana, *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil uji asumsi klasik diperoleh hasil uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak adanya variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Selain itu, berdasarkan uji faktor analisis diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas dapat mewakili sebagai nilai struktur modal yang baru untuk mengetahui konsekuensi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian, berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa dalam model regresi 1 terdapat tiga variabel bebas yang terdukung, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, *investment opportunity set* berpengaruh positif signifikan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan, dua variabel bebas lainnya dinyatakan tidak terdukung, antara lain ukuran perusahaan dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Kemudian, untuk model regresi 2 diketahui bahwa variabel struktur modal dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efek anteseden struktur modal terhadap nilai perusahaan adalah positif dan signifikan secara statistik.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Investor atau kreditur sebaiknya dapat lebih cermat dalam pengambilan keputusan investasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam pertimbangan pengambilan keputusan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasilnya dapat digeneralisir tidak hanya untuk perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membagi *setting* atau fokus perusahaan yang memiliki perbedaan tingkat tarif pajak yang dapat memengaruhi struktur modal.

REFERENSI

- Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Angelya, Shelvy dan Erika Jimena Arilyn. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 19 No. 1a. Issue 5, pp. 313-319.
- Ashraf, Tanveer dan Rasool Safdar. 2013. Determinants of Leverage of Automobile Sector Firms Listed in Karachi Stock Exchange by Testing Pecking Order Theory. *Journal of Business Studies Quarterly*. Vol. 4 No. 3. pp. 73-83.
- Atiqoh, Zummatul. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan, Size, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Saham terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 5 No.5.
- Babu, Suresh., dan G.V Chalam. 2014. Key Factors Influencing Capital Structure Decision of Indian Computer Software Industry. *Indian Journal Of Applied Research*. Vol. 4 No.6. pp103- 105.
- Basil, Al-Najjar. 2011. The Inter-Relationship Between Capital Structure and Dividend Policy: Empirical Evidence from Jordanian Data. *International Review of Applied Economics*. Vol.25 No. 2. pp. 209-224.
- Brealey, Richard A., Stewart C. Myers., and Franklin Allen. 2011. *Principle of Corporate Finance, Tenth Edition*. United States of America : New York, McGraw-Hill Irwin.
- Binangkit, Bagas dan Sugeng Raharjo. 2014. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan dan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Aktual edisi Pebruari 2014*. Vol 1. No.2. pp. 24-34.

- Brigham, E.F. dan J.F. Houston. 2006. *Fundamentals of Financial Management. Tenth Edition. Cengage Learning Asia. Singapore. Terjemahan A.A. Yulianto. Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Jilid dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Christiawan, Yulius Jogi dan Josua Tarigan. 2007. Kepemilikan Manajeral: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 9 No. 1. pp. 1-8.
- Cortez, Michael Angelo, dan Stevie Susanto. 2012. The Determinants Of Corporate Capital Structure: Evidence From Japanese Manufacturing Companies. *Journal of International Business Research*. Vol. 11 No.3. pp 121-134.
- Darajati, Tuntun Sriwahyuni dan Deny Dwi Hartomo. 2015. Struktur Modal Sektor Perbankan Pada Saat Krisis Keuangan. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. Vol. 15 No. 1. pp 17-32.
- Djumahir, 2005. Pengaruh Variabel-Variabel Tax Shield dan Non-Tax Shield Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Wacana*. Vol. 8 No. pp. 302-321
- Fahmi, Irham. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan. Edisi Ke-4*. Bandung: Alfabeta.
- Fitriyah, Fury K. dan Dina Hidayat. 2011. Pengaruh kepemilikan institusional, set kesempatan investasi dan arus kas bebas terhadap utang. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 1 No. 1. pp. 31-42.
- Fuad, Yanuar Cristie. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal, Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4 No. 2. pp 1-9.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F, Black, William C, Babin Barry J and Anderson Rolph E. 2010. *Multivariate Data Analysis A Global Perspective. Seventh Edition*. Pearson.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya, Edisi pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, Jogiyanto. 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesepuluh*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasania, Zuhria, Sri Murni, dan Yunita Mandagie. 2016. Pengaruh Current Ratio, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Dan Roe Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 03. pp. 133-144.
- Hasnawati, Sri. 2005. Dampak Set Peluang Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta. *JAAI*. Vol. 9 No. 2. pp. 117-126.
- Hastalona, Dyna. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5 No.1.

- Hidayah, Nurul. 2015. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 19 No. 03. Pp. 420-432.
- Hidayat, Riza., dan Sudarno. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2 No.2.
- Himawan, Andreas dan Satriyo Wibowo. 2016. Pengaruh *Non-Debt Tax Shield*, Tangibilitas, *Human Capital*, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap *Financial Leverage* Pada Sektor Komunikasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 18 No.2. pp. 217-226.
- Husnan, Suad. 2013. *Manajemen Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Indahningrum, Rizka Putri dan Ratih Handayani. 2009. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 11 No. 3. pp. 189-207.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 No. 4. pp. 305-360.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Larasati, Eva. 2011. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 16 No. 2. pp 103-107.
- Linda, Maya Febrianty Lautania, dan Muhammad Arfandynata. 2017. Determinan Kebijakan Hutang: Bukti Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1. pp 91-112.
- M. Rustam. 2015. Penentuan Struktur Modal Optimal Pada Perusahaan Sektor Properti, *Real Estate*, dan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 4 No. 1. pp. 94-124.
- Manihuruk, Wiston, Djumahir, dan Sumiati. 2016. Determinants of Capital Structure and the Role of Capital Structure on Firm Value. *European Journal of Business and Management*. Vol. 8 No.26. pp. 182-194.
- Manoppo, Heven dan Fitty Valdi Arie. 2016. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4 No.2. pp. 485-497.
- Mardiyati, Umi, Qothrunnada, dan Destria Kurnianti. 2018. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. Vol 9 No. 1. pp. 105-124.
- Marfuah, Safitri Ana dan Siti Nurlaela. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Asset, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan *Cosmetics And Household* Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol. 18 No. 01. pp. 16-30.
- Margaretha, Farah dan Aditya Rizky Ramadhan. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12 No. 2. pp. 119-130.
- Maryanti, Eny. 2016. Analisis Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 1 No. 2.
- Mas'ud, Masdar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal dan Hubungannya Terhadap Nilai Perusahaan. *Manajemen dan Bisnis*. Vol. 7 No.1.
- Masnoon, Maryam dan Abiha Saeed. 2014. Capital Structure Determinants of KSE Listed Automobile Companies. *European Scientific Journal*. Vol. 10 No. 13. pp 451-461.
- Modigliani, Franco dan Merton H. Miller. 1958. The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment. *American Economics Review*, 48, 261-297.
- Murhadi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Myers, Stewart C. 1977. Determinants of Corporate Borrowing. *Journal of Financial Economics*. 5. 147- 175.
- Myers, Stewart C. and Nicholas S. Maljuf. 1984. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investor Do Not Have. *Journal of Financial Economics*. Vol. 13 No. 2. pp. 187-221.
- Nurfina, Hida Efri dan Endang Tri Widyarti. 2016. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Management*. Vol. 5 No. 3. pp. 1-10.
- Ramli, Moh. Rusman dan Frans Papilaya. 2015. Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 12 No.3. pp. 411 – 420.
- Rely, Gilbert dan Dr. Herry Sunarto. 2017. Determinants of Capital Structure *Journal on Business Review*. Vol. 5 No. 2.
- Riyadi, Syamsul. 2018. Analisis Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Sinar Manajemen*. Vol. 5 No. 1. pp. 38-43.
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

- Rodoni, Ahmad dan Herni Ali. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rumondor, Regina, Maryam Mangantar, dan Jacky S.B. Sumarauw. 2015. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Plastik Dan Pengemasan Di BEI. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 3 No.3. pp. 159-169.
- Rustam, M. 2015. Penentuan Struktur Modal Optimal Pada Perusahaan Sektor Properti, *Real Estate*, dan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 4 No. 01. pp 94-124.
- Sari, Dessy, Handa., Atim, Djazuli., dan Siti Aisjah. 2013. Determinan Struktur Modal dan Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 11 No. 1. pp 77-84.
- Sari, Nurshadrina Kartika, Isti Fadah, dan Hari Sukarno. 2012. Determinan Struktur Modal Bank. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 17 No. 1. pp 71 – 88.
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan; Aplikasi dan Teori*. Yogyakarta: BPFE.
- Savitri, Enni, Ubud Salim, Armanu, dan Djumahir. 2012. Variabel Anteseden dari Struktur Modal: Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 10 No.1. pp. 85-96.
- Sheikh, Nadeem Ahmed dan Muhammad Azeem Qureshi. 2017. Determinants of capital structure of Islamic and conventional commercial banks: Evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 10. No.1. pp.24-41.
- Sheikh, Nadeem Ahmed dan Zongjun Wang. 2011. Determinants of capital structure An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan. *Managerial Finance*. Vol. 37 No.2. pp.117-133.
- Sheisarvian, Revi Maretta, Nengah Sudjana, dan Muhammad Saifi. 2015. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang. Vol.22 No.1. pp. 1-9.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lutfi. 2011. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis, Edisi 2*. Medan: USU Press.
- Smart, S.B., W.L. Megginson and L.J .Gitman. 2004. *Corporate Finance. 2nd Edition*. Mason: Thomson
- Sofat, Rajni dan Sukhdev Singh. 2017. Determinants of capital structure: an empirical study of manufacturing firms in India. *International Journal of Law and Management*. Vol. 59. Issue: 6. pp.1029-1045.
- Sofilda, Eleonora dan Maryani. 2007. Analisa Faktor Penentu Stuktur Modal Perbankan di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 7 No.3. pp. 351-366.
- Soleman, Rusman. 2008. Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Leverage. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.12 No.3. pp. 411 – 420.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suryani, Ade Dwi dan Muhammad Khafid. 2015. Pengaruh Free Cash Flow, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Deviden dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Vol. 4 No. 1. pp. 20- 28.
- Susanto, Yulius Kurnia. 2011. Kepemilikan Saham, Kebijakan Deviden, Karakteristik Perusahaan, Risiko Sistematik, Set Peluang Investasi dan Kebijakan Hutang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 13 No. 3. pp. 195-210.
- Syardiana, Gita, Ahmad Rodoni, dan Zuwesty Eka Putri. 2015. Pengaruh Invesment Opportunity Set, Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Return on Asset Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntabilitas*. Vol. 8 No.1. pp 39-46
- Tamam, Dede Badru dan Satriyo Wibowo. 2017. Pengaruh Tangibility, Profitability, Liquidity, Firm Size, dan Non Debt Tax Shield Terhadap Capital Structure Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 19 No. 1. pp 129-135.
- Tangiduk, Desmianti, Paulina Van Rate, dan Johan Tumiwa. 2017. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No.2. pp 874-883.
- Titman, S., dan Wessels, R. 1988. The Determinant of Capital Structure Choise. *Journal of Finance*. Vol. 43 No.1. pp. 106-131.
- Weston, J. Fred dan Copeland, Thomas E. 1997. *Manajemen Keuangan Edisi 9*. Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Keempat*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wimelda, Linda, dan Aan Marlinah. 2013. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan. *Media Bisnis*. Vol. 5 No. 3. pp. 200-213.

Lampiran 1

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk	ADES
2	PT ARGHA KARYAPRIMAINDUSTRY Tbk	AKPI
3	PT ALKINDO NARATAMA Tbk	ALDO
4	PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk	AMFG
5	PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk	ASII
6	PT ASTRA OTOPARTS Tbk	AUTO

7	PT SEPATU BATA Tbk	BATA
8	PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk	BUDI
9	PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk	CEKA
10	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk	CPIN
11	PT DELTA DJAKARTA Tbk	DLTA
12	PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk	DVLA
13	PT GUDANG GARAM Tbk	GGRM
14	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.	HMSP
15	PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk	IGAR
16	PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk	INAI
17	PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk	INCI
18	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk	INTP
19	PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk	JPFA
20	PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk	KAEF
21	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk	KDSI
22	PT KALBE FARMA Tbk	KLBF
23	PT LION METAL WORKS Tbk	LION
24	PT LIONMESH PRIMA Tbk	LMSH
25	PT. NIPRESS Tbk	NIPS
26	PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk	PICO
27	PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk	RICY
28	PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk	ROTI
29	PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk	SCCO
30	PT SEKAR BUMI Tbk	SKBM
31	PT SEKAR LAUT Tbk	SKLT
32	PT SELAMAT SEMPURNA Tbk	SMSM
33	PT INDO ACIDATAMA Tbk	SRSN
34	PT SIANTAR TOP Tbk	STTP
35	PT MANDOM INDONESIA Tbk	TCID
36	PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk	TOTO
37	PT Trias Sentosa Tbk	TRST
38	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk	ULTJ
39	PT. NUSANTARA INTI CORPORA Tbk	UNIT
40	PT UNILEVER INDONESIA Tbk	UNVR
41	PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk	WIIM

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SUKU BUNGA BI TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada BUS di Indonesia)**

Sindy Silvy Rosa

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: sindyafrizal12@gmail.com

Mia Kusumawaty

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: miakusumawaty@gmail.com

ABSTRACT

The research objective was to determine the effect of murabaha financing and interest rate BI to Revenue Margin On Islamic Banking simultaneously and partially. This type of research is associative research. The data digunakan adalah secondary data, where the data is murabaha financing resources and Bank Indonesia interest rate and margin murabaha year 2011-2015 at six banks listed in Indonesia. Data collection techniques in this study is documentation. Data analysis techniques used in this research is qualitative analysis techniques. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis.

The results of this study showed that simultaneous Murabahah Financing and Interest Rates Bank Indonesia influence Revenue Margin Murabaha Islamic Banking in Indonesia. Partially Financing Murabahahm significant effect on Income Margin Murabaha Islamic Banking in Indonesia, while the interest rate of Bank Indonesia partially no significant effect on Income Margin Murabaha Islamic Banking in Indonesia

Keywords: Murabahah, Indonesia Bank Interest Rate, Revenue Margin Murabahah.

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga

atau bagi hasil usaha: pertama, Bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan kedua, Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip bagi hasil. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan empat pola penyaluran yaitu bagi hasil, jual beli, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah secara alamiah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Pada kategori produksi difasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudhrabah* dan *musyarakah*, sedangkan kegiatan distribusi difasilitasi melalui skema jual beli yaitu *murabahah*.

Meskipun banyak prinsip penyaluran dana yang dipakai oleh bank syariah namun, jual beli akad *murabahah* yang sering digunakan. Karena, produk *murabahah* ini sangat sering ditawarkan oleh bank syariah sehingga sangat dikenal dikalangan masyarakat luas. Menurut Wiroso (2011: 73), *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam penentuan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Mengenai pengambilan keuntungan, menurut pendapat Adi Warman A.Karim (2011: 254) terdapat beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset-Liability Commite*) bank syariah. Yakni, *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interst* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penentapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai mark up yang tetap).

Selain dari besarnya pembiayaan *murabahah*, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat *margin murabahah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Bank syariah dalam memperhitungkan keuntungan *murabahah* menggunakan pendekatan *base lending rate*, hal tersebut dikarenakan belum adanya rumusan baku mengenai perhitungan keuntungan *murabahah*.

Berdasarkan fenomena mengenai penetapan tingkat margin *murabahah*, bahwa bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* bank konvensional sebagai perhitungan keuntungan *murabahah*. Sehingga, unsur-unsur yang terkandung dalam *base lending rate* yang diungkap oleh wiroso (2005, 92) yaitu ekspektasi bagi hasil, biaya *overhead*, keuntungan dan premi resiko. Sedangkan menurut perwataatmadja (dalam nugroho, 2005) *cost recovery* (proyeksi biaya operasi dibagi target volume pembiayaan *murabahah*) dan keuntungan yang diinginkanlah yang akan mempengaruhi besarnya *margin murabahah*. Tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI Terhadap Jumlah Margin *Murabahah* pada Perbankan Syariah secara Simultan dan Parsial.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”.

Fungsi dari bank syariah sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan tujuan bank syariah adalah “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan Murabahah

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i, 2005: 101). Definisi lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntunagn (margin) yang disepakati oleh penjual (Karim, 2008: 113).

Muslim harus mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam syariah, agar harta yang dimiliki halal dan baik, seperti kita mengetahui jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah (hubungan manusia dengan manusia), dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang.

Pertukaran uang dengan barang yang biasa dikenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang *ribawi* (secara kasat

mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang *ribawi* seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering dan garam dengan garam maka pertukarannya agar sesuai syariah harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihanannya adalah riba (Sri dan Wasilah, 2012: 168).

Tingkat Suku Bunga

Suku Bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen (%).

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). (Kasmir, 2010: 133).

Suku bunga Bank Indonesia

BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUABO/N). Pergerakan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Margin Murabahah

Pengertian tingkat margin menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, "Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya".

Penjelasan lain tentang margin dalam menentukan jangka waktu pembiayaan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran (Adiwarman, 2011 :280).

Menurut PSAK NO.23 pendapatan adalah sebagai berikut:

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut solihin (2010: 492) *margin* keuntungan/ *mark up* merupakan:

“Persentase tertentu yang ditetapkan pertahun: jadi jika perhitungan *margin* keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi *murabahah*, salam istisna dan ijarah disebut sebagai piutang. Besaran piutang tersebut tergantung pada plafond pembiayaan yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan”.

Jadi pendapatan *margin murabahah* adalah penerimaan dana (Arus Masuk Bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan

Hipotesis Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya mark-up adalah kebutuhan syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan stabilitas barang-barang *murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu.

Murabahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang disemua bank islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin sehingga pendapatan margin *murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah: Pembiayaan *Murabahah* Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen pembiayaan *murabahah* dan suku bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 6 Perbankan Syariah yang terdaftar di Indonesia (Online) diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>.

Operasionalisasi Variabel

***Murabahah* (X_1)**

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i, 2005: 101). Indikator digunakan Pembiayaan margin yang sudah ditetapkan.

Suku Bunga Bank Indonesia (X_2)

Suku bunga bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Indikator yang digunakan adalah Inflasi.

Pendapatan Margin *Murabahah* (Y)

Pendapatan margin murabahah yaitu selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan. Indikator yang digunakan adalah Persentasi dari harga pokok.

Data yang Diperlukan

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dimana data yang didapatkan secara tidak langsung dapat dijadikan sumber informasi data pembiayaan murabahah dan Suku Bunga Bank Indonesia tahun 2011-2015, serta Pendapatan Margin *Murabahah* tahun 2011-2015 Pada 6 Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dilakukan dengan menyalin maupun mengutip dokumen pada 6 Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan penelitian.

Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif digunakan dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang sesuai dengan penelitian untuk menilai hasil data tersebut diuji melalui pengujian statistik yang dibantu oleh aplikasi program *Statistical Product and Service Solution/SPSS*.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan suku bunga Bank Indonesia terhadap pendapatan margin *murabahah* adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Profitabilitas
- A = Konstanta (nilai Y bila X = 0)
- b₁b₂ = Koefisien regresi
- X₁ = *Murabahah*
- X₂ = *Musyarakah*
- e = error

(Sugiyono, 2014: 277).

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data dan Analisis

Bank yang diambil sudah terdaftar dan diakui oleh Bank Indonesia sebagai Bank Syariah, terdapat 12 Bank Syariah yang ada di Indonesia, akan tetapi yang memenuhi kriteria untuk diteliti hanya sebanyak 6 Bank. Jumlah data yang dipakai sebanyak 30 (6x5) untuk periode Tahun 2011 sampai 2015. Penelitian menggunakan 3 variabel yaitu Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesai dan Pendapatan Margin *Murabahah*.

Unsur yang digunakan untuk mengetahui terdapatnya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan suku bunga Bank Indonesia terhadap pendapatan margin *murabahah* maka penulis melakukan pengolahan data dibantu oleh (*Statistical Product and Service Solution/SPSS*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients	Std. Error	Coefficients	Beta		
1 (Constant)	373.136	567.094			.658	.516
Murabahah	.077	.005	.955		15.586	.000
Suku Bunga	-25.827	83.487	-.019		-309	-.759

a. Dependent Variable: Margin

Sumber: Data Hasil SPSS diolah Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas hasil uji regrisi linier berganda, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 373,136 + 0,077X_1 - 25,827X_2 + \varepsilon$$

Hasil ini menunjukkan jika nilai variabel Murabahah (X_1) dan Suku Bunga Bank Indonesia (X_2) nilainya adalah 0, maka Pendapatan Margin Murabahah nilainya adalah 373,136. Sedangkan jika variabel Murabahah dinaikan 100% (dengan asumsi bahwa nilai koevisien variabel lain konstan atau tidak berubah), maka akan mengakibatkan adanya peningkatan Pendapatan Margin Murabahah sebesar 0,077, koefisien bernilai positif, dan jika variabel Suku Bunga Bank Indonesia dinaikan 100% (dengan asumsi bahwa nilai koevisien variabel lain konstan atau tidak berubah), maka akan mengakibatkan adanya penurunan Pendapatan Margin Murabahah sebesar -25,827, koefisien bernilai negatif.

Uji Model

Semakin melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terdistribusi dengan normalitas, terbatas dari multikolinieritas, terbebas dari heteroskedasitas dan terbatas dari autokorelasi.

Uji Normalitas

dapat disimpulkan bahwa grafik Normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebrannya mengikuti arah garis diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Tolerance
2. Tidak terjadi multikolonearitas, jika nilai tolerance $> 0,10$.
3. Terjadi Multikolinearitas, jika nilai tolerance $< 0,10$.
4. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)
 1. Tidak Terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF $< 10,00$
 2. Terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF $> 10,00$

Berdasarkan *Output* SPSS di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi karena nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 1,447. Karena nilai DW berkisar antara -2 dan +2, hal ini menunjukkan bahwa dalam persamaan regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.600E7	2	1.800E7	127.326	.000 ^a
Residual	3816671.25827		141358.195		
Total	3.981E7	29			

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga , Murabahah

b. Dependent Variable: Margin Murabahah

Sumber: Data Hasil SPSS diolah Tahun 2017

Dari hasil analisis di atas Uji Anova F test diperoleh F_{hitung} sebesar 127,326 sedangkan F_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,05 diperoleh F_{tabel} sebesar 3,354. **nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel}$ (127,326 > 3,354)**, Hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul adalah sebesar 0,0000. Berdasarkan kriteria pengujian, karena **nilai sig F < 0,05 (0,0000 < 0,05)** berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Maka kesimpulannya pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Margin Murabahah Perbankan Syariah.

Uji Secara parsial (t)

Hasil Uji Secara Parsial

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	.658	.516
Murabahah	15.586	.000
Suku Bunga	-.309	.759

a. Dependent Variable: Margin Murabahah

Sumber: Pengolahan Data SPSS Tahun 2017

Ha diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

Dari tabel di atas terlihat t_{hitung} untuk variabel pembiayaan Murabahah (X_1) adalah 15,586 maka hasilnya $t_{hitung} > t_{tabel} = 15,596 > 2,048$ sehingga Ho ditolak sehingga berpengaruh signifikan. Maka kesimpulannya secara parsial pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Margin Murabahah.

Sedangkan untuk nilai t_{hitung} variabel Suku Bunga Bank Indonesia (X_2) adalah -0,309 maka hasilnya $t_{hitung} < t_{tabel} = -0,309 < 2,048$ sehingga Ho diterima. Maka kesimpulannya bahwa Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh secara parsial terhadap Margin Murabahah.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.897	375.976	1.447

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Murabahah

b. Dependent Variable: Margin Murabahah

Sumber: Pengolahan Data SPSS Tahun 2017

Besarnya angka *Adjusted R Square* atau nilai koefisien determinasi adalah 0,897. Artinya bahwa variabel Pendapatan Margin Murabahah dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan Murabahah dan suku bunga bank Indonesia sebesar 89,7% atau besarnya pengaruh pembiayaan murabahah dan suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan margin murabahah adalah sebesar 89,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 89,7\% = 10,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti faktor Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, dan Faktor lainnya. Nilai *Adjusted R Square* berkisar antara 0 sampai 1, catatan semakin kecil nilai *Adjusted R Square*, maka semakin lemah hubungan antara variabel-variabel tersebut.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, total tingkat penyaluran pembiayaan murabahah dan suku bunga bank Indonesia Perbankan Syariah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan, dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah.

Hasil ini dibuktikan nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel} (127,326 > 3,354)$ dan nilai $sig F < 0,05 (0,0000 < 0,05)$. Hal ini berarti bahwa besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan

besarnya pembiayaan yang disalurkan serta keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tingkat pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, dan pada pendapatan Margin *Murabahah* juga mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis. Kecenderungan penurunan pembiayaan *Murabahah* disebabkan nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah setiap tahunnya berkurang dikarenakan nasabah lebih memilih pembiayaan lain dibandingkan pembiayaan murabahah dan juga nasabah memilih berpindah bank lain.

Hasil yang diperoleh dari uji regresi linier berganda nilai koefisien variabel Murabahah (X_1) sebesar 0,077, artinya jika variabel Murabahah dinaikan 100% maka mengakibatkan adanya peningkatan pendapatan Margin Murabahah sebesar 0,077. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Murabahah (X_1) dengan Pendapatan Margin Murabahah (Y). Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin meningkat pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah.

Berdasarkan tingkat signifikan nilai t_{hitung} 15,596 > nilai t_{tabel} 2,048 dengan kriteria pengujian nilai t_{sig} 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dikarenakan penerimaan angsuran pendapatan margin yang dilakukan secara tunai.

Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, suku bunga Bank Indonesia mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan, sedangkan pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis. Peningkatan dan penurunan suku bunga Bank Indonesia tergantung inflansi dan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Hasil yang diperoleh dari uji regresi linier berganda nilai koefisien variabel Musyarakah (X_2) sebesar -25,827, artinya jika variabel suku bunga Bank Indonesia dinaikan 100% maka mengakibatkan adanya penurunan Pendapatan Margin Murabahah sebesar -25,827. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel suku bunga Bank Indonesia (X_2) dengan Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah.

Berdasarkan tingkat signifikan nilai $t_{hitung} -0,309 < \text{nilai } t_{tabel} 2,048$ dengan kriteria pengujian nilai $t_{sig} 0,759 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah. Suku bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif dikarenakan lebih tingginya suku bunga Bank Indonesia dari pada Pendapatan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} adalah $15,596 > 2,048$ dengan nilai signifikan ($P \text{ value} = 0,000 < \alpha = 0,05$). Sedangkan Suku Bunga Bank Indonesia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} adalah $-0,309 < 2,048$ dengan nilai signifikan ($P \text{ value} = 0,759 > \alpha = 0,05$).
2. Hasil pengujian secara silmutan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 127,326 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,354 dan nilai signifikan $\alpha = 0,05$. Pendapatan signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga Bank Indonesia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka ada beberapa saran untuk perusahaan/ bank dan bagi peneliti selanjutnya yang membahas dengan judul yang sama. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam penetapan persentasi pendapatan Margin Murabahah sebaiknya tidak lebih besar dari pada suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbankan Syariah di Indonesia agar mengkaji kembali perhitungan Pendapatan Margin Murabahah, karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah, selain dari pembiayaan murabahah dan suku bunga Bank Indonesia. Perbankan syariah alangkah baiknya lebih selektif serta memperketat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan mempertegas dalam memberikan saksi kepada nasabah yang lalai, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari nasabah sehingga akan berdampak pada pendapatan margin murabahah yang diterima
2. Penelitian selanjutnya dapat juga dimasukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah perbankan syariah seperti unsur lainnya seperti faktor Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Biaya Oprasional dan Faktor lain yang mempengaruhinya.

REFERENSI

- Achmad Solihin. 2010. *MySQL 5 Dari Pemula Hingga Mahir*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Adiwarman Karim. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman, Karim. 2011. *Bank Islam "Analisis Fiqih Dan Keuangan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Binti Nur Asiyah. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Cetakan kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwi Priyanto. 2012. *Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non Parametrik dengan Statiscal Product and Service Solution (SPSS)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Ely, dkk. 2012. *Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Akuntansi (Online).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kenda Satya. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah*. Jurnal Ekonomi Bisnis. (Online).
- Lianana dan Lili Syafitri. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Pt Bank Mandiri Syariah*. Jurnal akuntansi (Online).
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23 Tahun 2010 Tentang Pendapatan.
- Sabiq Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kelima belas. Bandung: Alfabet
- Sunjoyo, dkk. 2013. *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Cetakan kesatu. Bandung: ALFABETA.
- Syafi'i Antonio. 2005. *Bank Syariah Dari Teori ke Prakti*. Cetakan ke-9. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Warsono, dkk . 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- www.adln.lib.unair.ac.id

Pedoman Penulisan Jurnal Akuntansi Keuangan

1. Naskah berupa ringkasan hasil penelitian lapangan (empiris), penelitian kepustakaan dan karya ilmiah populer dalam Bahasa Indonesia belum dipublikasi dalam media cetak lain.
2. Fonts yang dipergunakan adalah Times New Roman ukuran 12 dan compatible dengan MS-Word. Lampiran riset seperti daftar pertanyaan dan instrumen lainnya harus dikirim bersama naskah. Pemuatan lampiran pada jurnal tergantung tersedianya ruang (halaman).
3. Keaslian Tulisan. Penulis harus menjamin keaslian artikel yang dikirim dalam bentuk surat pernyataan keaslian artikel. Pelanggaran hak cipta dan etika akademis menjadi tanggung jawab penulis.
4. Panjang artikel yang diserahkan antara 15-20 halaman 1 spasi, serta dilengkapi dengan abstrak sebanyak 100-250 kata. Penulisan abstrak serta menggunakan Bahasa Inggris dan disertai dengan keyword.
5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Judul, nama penulis, lembaga dan biodata
 - b) Abstrak
 - c) Batang Tubuh:
 - Untuk penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan:**
 1. Pendahuluan berupa latar belakang dan masalah.
 2. Landasan teori dan pengembangan hipotesis.
 3. Metoda penelitian.
 4. Analisis dan pembahasan.
 5. Simpulan dan saran.
 - File template dapat diunduh di:**
<https://drive.google.com/open?id=1Jo5I9fryZKINK6epFWYmtsCSfiQAXtvM>
 - Untuk karya ilmiah populer:**
 1. Pendahuluan berupa latar belakang dan masalah.
 2. Landasan teori (jika ada).
 3. Pembahasan.
 4. Simpulan.
 - d) Referensi
 - e) Lampiran
6. Penomoran sub judul mempergunakan huruf A, B, C, D sedang sub judul dengan angka Arab dan seterusnya.
7. Persamaan. Semua persamaan matematika atau rumus dituliskan pada garis terpisah ditengah halaman (centered). Persamaan atau rumus diberi nomor berurutan dengan angka Arab di dalam kurung pada margin kanan.
8. Catatan kaki. Catatan kaki pada halaman depan mempergunakan tanda asteriks (*), sedang pada teks menggunakan angka Arab secara urut. Catatan kaki hanya untuk memperjelas tulisan.

9. Tabel. Penomoran tabel mempergunakan angka Arab. Setiap tabel diberikan judul yang diikuti dengan penjelasan legend yang sesuai dengan isi tabel. Tabel yang dicetak pada kertas berukuran lebih besar, diserahkan apa adanya, tanpa perlu diperkecil dengan fotokopi. Tabel dicetak pada halaman terpisah di akhir tulisan. Letak tabel di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
10. Gambar, diagram, grafik. Penomoran mempergunakan angka Romawi, dicetak di tengah halaman (centered) terpisah dari teks, dan diletakkan pada akhir tulisan. Letak gambar, tabel, grafik di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
11. Referensi. Referensi dicetak di halaman akhir sebelum tabel dan gambar, spasi dubel, terpisah, urut abjad, dan dengan judul REFERENSI.
 - a. Referensi yang dikutip pada teks dapat dituliskan sebagai berikut:
 - o Pinches dan Taingo (1973) melaporkan bahwa
 - o Nilai-nilai sosial ditunjukkan (Stolle, 1976).
 - o Penyebutan halaman referensi yang dikutip, hanya untuk kutipan langsung. Nomor halaman dituliskan setelah tanda titik dua. Contoh:
 - (Pinches dan Taingo, 1973:17)
 - Pinches dan Taingo (1973:17)
 - o Penulisan sumber referensi di dalam teks dengan penulis lebih dari dua, dapat dituliskan satu nama dengan menambahkan dkk. Contoh:
 - (Zikmund dkk., 1977)
 - Zikmund dkk. (1977)
 - b. Penulisan referensi dalam daftar referensi.
 - o Buku teks (monograph)
Pyndyk, R.S. and D. L. Rubinfeld. 1987. *Econometric Model & Economic Forecasts*, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
 - o Artikel (periodicals)
Porcano, T.M. 1984a. *Distributive Justice and Tax Policy*, *The Accounting Review* 59 (October): 619-636.
_____. 1984b. *The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate Investment Intentions*. *The Journal of the American Taxation Association* 6 (Fall): 7-19.
 - o Artikel pada penerbitan kolektif. Brennan, M.J. dan E.S. Schwartz. 1994. *A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments*, dalam edisi Stern, Joel M. dan D.H. Chew Jr. *The Revolution Corporate Finance*, 2nd ed, Massachusetts; Blackwell Publisher.
 - o Artikel (website)
Standberg, C, 2005. *The Convergence of Corporate Governance and Corporate Sosial Responsibility: Though-Leader Study*. Diunduh dari <http://www.corostranberg.com/>